

Hubungan tekanan akuntabilitas, *audit judgment performance*, dan *effort*

Muhsin¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak

Kalimantan Barat

e-mail: muhsin_anis@yahoo.co.in

ARTIKEL INFO

Article history:

Available online 1 June 2016

Keywords:

Accountability pressure; effort; audit judgment performance, goal-setting theory.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the relationship between accountability pressure, audit judgment performance, and effort in the Audit Board of the Republic of Indonesia central (BPK RI central). The samples of the study were auditors that work in the Audit Board of the Republic of Indonesia central office in Jakarta. There were 285 questionnaires that were handed out, but only 198 questionnaires were handed in. There were only 90 data that can be analyzed. The data were analyzed using analysis technic of SEM program Warp PLS 4.0. The result of the study shows that the accountability pressure has positive and significant influence toward effort; effort has positive and significant influence toward audit judgment performance; and accountability pressure has positive and significant influence toward audit judgment performance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara tekanan akuntabilitas, *audit judgment performance*, dan *effort* (upaya) di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pusat (BPK RI Pusat). Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Pusat Jakarta. Sejumlah 285 eksemplar kuesioner dibagikan, 198 kuesioner kembali, tetapi hanya 90 data responden yang dapat dianalisis lebih lanjut. Data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis SEM program Warp PLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *effort* (upaya); *effort* (upaya) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment performance*, serta tekanan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment performance*.

Pendahuluan

Sejak tahun 1980-an telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam skala, ruang lingkup, dan pentingnya pengawasan kinerja di banyak negara (Power 2003; Hood et al. 2000; Downe dan Martin 2007; Talbot 2010). Lodge dan Hood (2010) menyatakan bahwa pembicaraan tentang audit atau peraturan terjadi secara besar-besaran (*massive*). Ada sedikit keraguan bahwa telah terjadi perkembangan kepentingan internasional dalam cara mengendalikan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja (Hood et al. 2004; Kelman 2007).

Audit, inspeksi dan badan penyelidikan sebagai badan pengawasan, telah memainkan peran kunci. Meskipun analisis klasik dari masalah yang dihadapi badan pengawas menunjukkan bahwa dampaknya akan dibatasi oleh kurangnya keberanian, pada kenyataannya terbukti tidak mampu memegang pengaruh yang besar atas perilaku manajer publik (Wilson dan Rachal 1977). Manajer publik seringkali terkena masalah dalam bidang pelayanan, dimana terjadi ketidakadilan, pemborosan, sehingga menjadi sorotan untuk dilakukan perbaikan (Humphrey 2003a; Downe dan Martin 2007; Audit Commission 2009). Akibat dari banyaknya permasalahan yang dialami oleh manajer publik, di antaranya adalah dapat menghambat karir, menyebabkan banyak stres, dan menghasilkan berbagai efek disfungsi (Woods dan Jeffrey 1998; Case et al. 2000; Humphrey 2003b; Munro 2004; Martin et al. 2010).

Sektor publik berbeda dengan sektor privat, karena sektor publik bersifat unik dan tidak bisa disamakan dengan sektor privat. Dittenhofer (2001) menyatakan bahwa keunikan kinerja sektor privat merupakan kepuasan masyarakat atau konsumen yang dikonversikan dalam profit perusahaan sebagai dasar untuk pengukuran kinerja, tetapi pada sektor publik atau pemerintah efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan anggaran sebagai alat pengukuran kinerja, pada kenyataannya kriteria tersebut sulit untuk diukur. Saat ini sektor publik mendapat

tekanan dari masyarakat yang menuntut agar kinerja (*performance*) Pemerintah Indonesia menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terjadi baik di daerah maupun di pusat. Tekanan tersebut harus disikapi oleh pemerintah dengan meningkatkan kinerja (*performance*) melalui pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Buddery et al. (2014) menyatakan bahwa setiap profesi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat agar martabat dan kualitas jasa profesionalnya dapat terjaga. Untuk membangun kepercayaan masyarakat maka perilaku para profesional perlu diatur agar kualitas hasil pekerjaannya dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya standar dan aturan etika profesi agar masyarakat dapat meyakini kualitas pekerjaannya. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan profesi yang mulia dan sangat terhormat karena pekerjaannya menuntut adanya pertanggung-jawaban (*accountability*) kepada publik. Profesi auditor dituntut untuk selalu menjaga sikap independen dan objektif pada saat melakukan audit laporan keuangan klien karena mereka dibayar oleh klien tersebut. Di sinilah sikap profesional akuntan diuji oleh keadaan sedemikian tersebut dalam menjalankan tugas-tugas audit.

Ashton dan Ashton (1995) menyebutkan bahwa penelitian *audit judgment performance* secara signifikan berpengaruh dalam beberapa bidang ilmu terapan termasuk kedokteran, hukum, kebijakan masyarakat, dan bisnis. Hasil penelitian terapan telah berpengaruh luas ke dalam dunia praktis. Salah satu disiplin ilmu dalam bisnis yang telah banyak dipengaruhi oleh *judgment* adalah ilmu akuntansi dan ilmu auditing. Penelitian *judgment* yang diterapkan dalam akuntansi dan audit telah berkembang selama 20 tahun terakhir, dan akan terus berkembang di masa yang akan datang, ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai *audit judgment* di Indonesia masih ada (Hartanto dan Kusuma 2001; Zulaikha 2006; Jamilah et al. 2007; Haryanto dan Subroto 2012; Praditaningrum dan Januarti 2012; Qimyatussa'adah et al. 2013). Hal ini dikarenakan *judgment* yang dibuat auditor merupakan sebuah pertimbangan subyektif dari seorang auditor dan sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi.

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Tekanan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk mempertanggung-jawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Tetlock 1983; 1985). Literatur audit menunjukkan bahwa tekanan akuntabilitas memberikan insentif bagi auditor untuk meningkatkan *judgment* (Ashton 1990; Cloyd 1997; Tan dan Kao 1999; DeZoort et al. 2006). Auditor dalam tekanan akuntabilitas memiliki *judgment* yang dapat berubah-ubah (*variability*) dibanding auditor yang tidak dalam tekanan akuntabilitas. Auditor termotivasi untuk meningkatkan *audit judgment* secara internal melalui kemampuan (*capability*) mereka dan eksternal melalui tekanan akuntabilitas kinerja mereka (Ashton 1990; Leung dan Trotman 2005).

Akuntabilitas juga diartikan sebagai “*the duty to provide an account (by no means necessarily a financial account) or reckoning of those actions for actions for which one is held responsible*” (Gray et al. 1996). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara akuntabilitas dan cara akuntansi dipandang secara tradisional, dalam hal ini pelaporan selalu menjadi akhir bagi berbagai proses akuntansi (Holland 2004).

Effort

Jumlah usaha kognitif yang dikeluarkan dalam tugas dapat ditingkatkan baik melalui lamanya upaya (*effort*) (misalnya bekerja lebih lama), intensitas upaya (*effort*) (misalnya bekerja lebih keras), atau melalui keduanya baik durasi/lamanya dan intensitas upaya (Cloyd 1997). Sebagai insentif untuk meningkatkan *audit judgment performance*, mekanisme yang dapat dirancang individu auditor untuk mengerahkan atau upaya untuk melakukannya dengan baik dalam tugas audit yang dilaksanakan (Libby dan Lipe 1992; Bonner dan Sprinkle 2002). Studi empiris sebelumnya dalam akuntansi menunjukkan bahwa insentif kinerja menyebabkan individu auditor dapat meningkatkan jumlah upaya (*effort*) yang ditujukan untuk tugas audit (Sanusi et al. 2007).

Bonner dan Sprinkle (2002) juga setuju dengan penelitian sebelumnya bahwa jumlah *effort* yang diberikan untuk menyelesaikan suatu tugas dapat dilihat dari arah *effort*, durasi *effort*, intensitas *effort*, dan pengembangan strategi. Arah *effort* mengacu pada tugas dimana individu memilih untuk terlibat. Durasi *effort* bermakna lamanya waktu seseorang mencurahkan sumber daya kognitif dan fisik untuk tugas tertentu. Intensitas *effort* dimaksudkan sebagai jumlah perhatian individu yang tercurah untuk tugas selama periode waktu tertentu. Sementara pengembangan strategi dapat dilihat dari perencanaan, inovasi, dan kesadaran dalam membuat pemecahan atas masalah yang dihadapi.

Chang et al. (1997) menemukan bahwa pembenaran/justifikasi mewakili insentif kinerja non-keuangan yang meningkatkan durasi/lamanya upaya (*effort*). Dengan demikian, ketika auditor diberikan insentif untuk

melakukan tugas, mereka diharapkan dapat meningkatkan jumlah upaya (*effort*). Efek langsung dari tekanan akuntabilitas dan *self-efficacy* pada *audit judgment performance* dimediasi oleh upaya (*effort*). Tekanan akuntabilitas dan *self-efficacy* juga mendorong upaya (*effort*) yang tinggi sehingga mempengaruhi *audit judgment performance*.

Audit Judgment Performance

Hogarth dan Einhorn (1992) mendefinisikan *judgment* sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. *Judgment* adalah perilaku yang paling dipengaruhi oleh persepsi situasi (Robbins dan Judge 2007). Jamilah et al. (2007) mengemukakan bahwa, *audit judgment* merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. Menurut Jamilah et al. (2007) *audit judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. *Judgment* sering dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas (Zulaikha 2006).

Audit judgment diperlukan pada empat tahap dalam proses audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit dan pelaporan audit (Mulyadi 2002). Salah satu contoh dari *audit judgment* adalah jika seorang auditor hendak menerima suatu perikatan audit maka harus melakukan *audit judgment* terhadap beberapa hal, yaitu: integritas manajemen, risiko luar biasa, independensi, kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan, dan pada akhirnya diambil keputusan menerima atau tidak suatu perikatan audit.

Pengembangan Hipotesis

Tekanan akuntabilitas dan *effort*

Teori penetapan tujuan (*goal-setting theory*) menyatakan persoalan-persoalan dan penemuan-penemuan yang akan sangat mengesankan sehubungan dengan pengaruh yang dimiliki oleh kekhususan tujuan, tantangan, dan umpan balik terhadap kinerja.

Locke (1997) mengemukakan bahwa niat untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberi tahu seorang auditor apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Bukti tersebut sangat mendukung nilai tujuan. Bisa dikatakan bahwa tujuan khusus meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima justru menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, dan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tidak ada umpan balik. Tujuan yang spesifik memperlihatkan tingkat hasil yang lebih tinggi daripada tujuan umum "lakukan yang terbaik". Kekhususan dari tujuan itu sendiri tampaknya bertindak sebagai stimulus internal.

Tetlock et al. (1992) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu hubungan antara individu pembuat keputusan dan dunia sosialnya. Hubungan akuntabilitas dapat mempengaruhi individu untuk memilih strategi sebagai persyaratan untuk menjelaskan jawabannya termasuk kompleksitas, defensif, atau akseptabilitas heuristik (Tetlock et al. 1992). Kennedy (1993) secara khusus mengidentifikasi kemampuan akuntabilitas untuk mengurangi atribusi kesalahan dan dampaknya (Tetlock 1983; 1985). Oleh karena itu, penelitian akuntabilitas untuk mendorong auditor terhadap *effort* pemikiran, untuk menjelaskan alasan proses akuntabilitas *judgment* mereka.

Sari et al. (2008) menyebutkan bahwa auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan menggunakan lebih banyak upaya (*effort*) bila dibandingkan dengan auditor yang memiliki akuntabilitas yang rendah. Dari pembahasan di atas maka hipotesis diusulkan sebagai berikut:

H1= Tekanan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *Effort*

Effort* dan *Audit Judgment Performance

Teori kognitif sosial Robbins (2006) menyatakan bahwa teori kognitif sosial menetapkan sebuah kerangka untuk pemahaman, prediksi dan tanggung jawab dari perilaku manusia. Teori ini mengidentifikasi perilaku manusia sebagai interaksi dari faktor perorangan, perilaku dan lingkungan. Jumlah usaha kognitif yang dikeluarkan dalam tugas dapat ditingkatkan baik melalui lamanya upaya (misalnya bekerja lebih lama) atau intensitas upaya (misalnya bekerja lebih keras), atau melalui baik durasi/lamanya dan intensitas upaya (Cloyd 1997). Sebagai insentif untuk meningkatkan *audit judgment performance*, mekanisme yang dapat dirancang individu auditor adalah dengan mengerahkan *effort* atau upaya untuk melakukannya dengan baik dalam tugas audit yang dilaksanakan (Libby dan Lipe 1992; Bonner dan Sprinkle 2002). Studi empiris sebelumnya dalam akuntansi menunjukkan bahwa insentif kinerja menyebabkan individu auditor dapat meningkatkan jumlah usaha yang ditujukan untuk tugas audit (Sanusi dan Iskandar 2007).

Chang et al. (1997) menemukan bahwa pembenaran/justifikasi mewakili insentif kinerja non-keuangan meningkatkan durasi/ lamanya upaya. Dengan demikian, ketika auditor diberikan insentif untuk melakukan tugas, mereka diharapkan untuk meningkatkan jumlah upaya (*effort*) untuk menyelesaikan tugas.

Kemampuan auditor untuk mengatasi lingkungan yang berbeda dan membuat kualitas *judgment* tergantung pada upaya (*effort*) mereka sendiri untuk meningkatkan kinerja (Bonner 1994). Upaya (*effort*) auditor untuk meningkatkan *judgment* dipengaruhi oleh faktor motivasi tertentu (Bonner 1994). Faktor motivasi meliputi dua dimensi, motivasi internal dan motivasi eksternal (Bandura 1997). Motivasi internal dibentuk dari dalam individu, sedangkan motivasi eksternal pada seseorang ditentukan oleh pihak eksternal atau situasi. Dari pembahasan diatas maka hipotesis diusulkan sebagai berikut:

H2 = *Effort* berpengaruh positif terhadap *Audit Judgment Performance*

Tekanan Akuntabilitas dan *Audit Judgment Performance*

Teori penentuan tujuan menjelaskan bahwa auditor lebih termotivasi oleh tujuan yang sulit disebabkan oleh 3 (tiga) hal. Pertama, tujuan yang sulit mengarahkan perhatian pada tugas yang sudah ada dan menjauh dari gangguan-gangguan yang tidak relevan. Tujuan yang menantang mendapatkan perhatian dan akhirnya cenderung membantu untuk lebih fokus. Kedua, tujuan yang sulit menambah semangat karena harus bekerja lebih keras untuk mencapainya. Ketiga, ketika dihadapkan pada tujuan yang sulit, auditor tetap berusaha untuk mencapainya, tujuan yang sulit membuat auditor menemukan strategi-strategi yang membantu untuk melakukan pekerjaan atau tugas dengan lebih efektif. Auditor harus mengusahakan sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sulit sehingga auditor sering memikirkan cara yang lebih baik untuk memulainya.

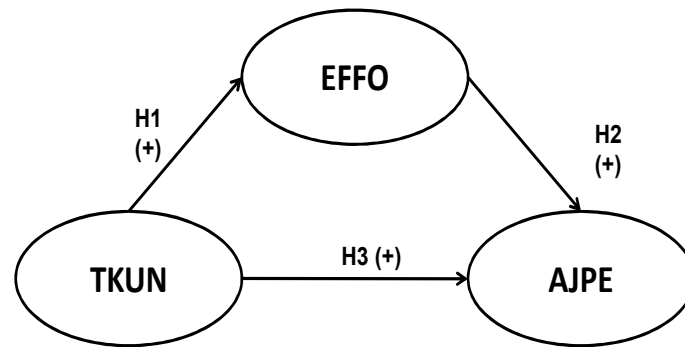
Menurut Jamilah et al. (2007) *audit judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. *Judgment* sering dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas (Zulaikha 2006). *Audit judgment* melekat pada setiap tahap dalam proses audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. *Audit judgment* diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikatakan bahwa *audit judgment* ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit. *Judgment* adalah perilaku yang paling dipengaruhi oleh persepsi situasi (Robin dan Judge 2007).

Beberapa studi *audit judgment* meneliti efek pada *audit judgment performance* dari berbagai bentuk, seperti: tekanan akuntabilitas, umpan balik (Leung dan Trotman 2005; Chang et al. 1997), pembenaran/*justification* (Peecher 1996) dan *review* (Tan dan Kao 1999; Tan et al. 2002). Studi ini mendukung gagasan bahwa auditor dengan tekanan akuntabilitas tinggi akan memiliki *audit judgment performance* yang lebih baik. Motivasi tinggi menyebabkan perbaikan terus menerus kinerja individu tersebut. Oleh karena itu, studi meneliti pengaruh tekanan akuntabilitas, yang diharapkan memotivasi auditor eksternal dalam meningkatkan *audit judgment performance*.

Auditor dalam proses audit memberikan opini dengan *judgment* yang didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 menyebutkan bahwa *audit judgment* atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam perioda satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan (Jamilah et al. 2007). Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat *audit judgment* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis ataupun non-teknis.

Auditor independen terus-menerus membuat *professional judgment* selama pekerjaan audit mereka (Gibbins 1984). Dalam proses pembuatan *judgment*, auditor menghadapi keadaan berbeda yang muncul dari beragam tugas pemeriksaan dengan berbagai tingkat kompleksitas. Dalam situasi yang berbeda, auditor perlu mempertimbangkan berbagai jenis informasi dan memilih prosedur audit yang tepat (Asare dan McDaniel 1996). Oleh karena itu, studi ini meneliti pengaruh tekanan akuntabilitas, yang diharapkan memotivasi auditor eksternal dalam meningkatkan *audit judgment performance*. Dari pembahasan di atas maka hipotesis 3 diusulkan sebagai berikut:

H3 = Tekanan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *Audit Judgment Performance*



Gambar 1. Model Penelitian

Keterangan :

TKUN = Tekanan Akuntabilitas; EFO = *Effort* (Upaya); AJPE = *Audit Judgment Performance*.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah auditor/pemeriksa pertama, pemeriksa muda, pemeriksa madya, dan pemeriksa utama, yang bertugas di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Pusat, Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *non-probabilitas* atau pemilihan *nonrandom*, dapat berupa *convenience sampling*, dimana salah satu jenis dari (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan karena peneliti menyadari bahwa yang memiliki informasi baik dan benar mengenai audit *judgment* adalah auditor/pemeriksa (Indriantoro dan Supomo 2002).

Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang menduduki jabatan pemeriksa pertama, pemeriksa muda, pemeriksa madya, dan pemeriksa utama, dengan memperhatikan pertimbangan yaitu sebagian besar (sekitar 70%) auditor BPK RI berada di Kantor Pusat Jakarta (Widayanti dan Subekti 2001), dan auditor yang bekerja sebagai pemeriksa pada tingkatan Auditor Utama Keuangan Negara (Auditama) I sampai dengan VII. Auditor yang dipilih menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan 2 (dua) kriteria, pertama, memiliki latar belakang pendidikan minimal jenjang Sarjana (S1) Akuntansi, dan atau Sarjana (S1) Non Akuntansi yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan tentang pemeriksaan dilingkungan internal BPK RI, kedua, auditor pernah menerima penugasan audit atas laporan keuangan pemerintah minimal 2 (dua) kali, sehingga responden dianggap dapat memahami dan mampu membuat *audit judgment* secara profesional (Haryanto dan Subroto 2012).

Sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 sampel dengan alasan bahwa pada jumlah tersebut telah memenuhi jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi untuk estimasi model PLS yaitu 10 (sepuluh) kali jumlah jalur/path prediktor dalam model. Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) jalur/path, sehingga jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi adalah sebanyak 30 sampel (10 x 3) (Ghozali dan Latan 2014).

Definisi dan Operasional Variabel

Tekanan akuntabilitas

Definisi variabel tekanan akuntabilitas adalah sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Tetlock 1983; 1985). Efek dari akuntabilitas telah diteliti di berbagai tugas seperti inferensi sosial (Rozelle dan Baxter 1981; Tetlock 1983; 1985; Tetlock dan Kim 1987).

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh tekanan akuntabilitas terhadap audit *judgment* performance ketika auditor yakin bahwa kinerja yang baik akan direview dan ada ulasan oleh atasannya. Tugas yang telah dilakukan oleh auditor akan direview oleh auditor senior, dimana akan menciptakan tekanan akuntabilitas bagi staf auditor dengan memberikan tambahan motivasi untuk menghindari hasil yang negatif seperti kritik, atau

mengejar hasil positif seperti pujian atau promosi (DeZoort et al. 2006). Studi terdahulu telah mengukur hal yang serupa: tekanan akuntabilitas melalui jaminan bahwa pekerjaan auditor staf akan direviu oleh senior auditor (Tan dan Kao 1999; Tan et al. 2002).

Effort

Definisi variabel upaya (*effort*) adalah jumlah upaya kognitif yang dikeluarkan dalam tugas dapat ditingkatkan baik melalui lamanya upaya (misalnya bekerja lebih lama) atau intensitas upaya (misalnya bekerja lebih keras), atau melalui keduanya baik durasi/lamanya dan intensitas upaya (Cloyd 1997). Variabel upaya (*effort*) diukur dengan menggunakan instrumen lima item yang diadaptasi dari (Awang-Hashim et al. 2002; Johnson dan Saccuzzo 1995; Iskandar et al. 2012).

Audit judgment performance

Definisi variabel kinerja *judgment* audit/*audit judgment performance* adalah kinerja *judgment auditor* dalam menentukan pendapat/opini mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain (Sanusi et al. 2007; Iskandar et al. 2012). Penilaian kinerja auditor diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Sanusi et al. 2007; Iskandar et al. 2012), yang terdiri dari sejumlah pertanyaan pada kasus audit.

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan program Warp PLS 4.0.

Tabel 1. Latent Variabel Coefficient

	AJPE	TKUN	EFFO
<i>R-squared</i>	0.193		0.200
<i>Adj. R-squared</i>	0.174		0.191
<i>Composite reliab.</i>	0.815	0.923	0.921
<i>Cronbach's alpha</i>	0.659	0.898	0.884
<i>Avg. Var. Extrac.</i>	0.595	0.668	0.747
<i>Full collin. VIF</i>	1.239	1.324	1.342
<i>Q-squared</i>	0.198		0.205

Sumber: Output olah data WarpPLS 4.0.

Tabel 1 di atas menunjukkan *Ajusted R-squared* untuk *audit judgment performance* (AJPE) sebesar 0.174, artinya untuk variabel *audit judgment performance* (AJPE) dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel tekanan akuntabilitas (TKUN) dalam menjelaskan variasi variabel kriteria adalah sebesar 17.4% dan sisanya 82.6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *Ajusted R-squared* dalam penelitian ini masuk pada kategori menengah (Ghozali dan Latan, 2014). Sedangkan *Ajusted R-squared* untuk *effort* (EFFO) sebesar 0.191, artinya untuk variabel *effort* (EFFO) dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel tekanan akuntabilitas (TKUN) dalam menjelaskan variasi variabel kriteria adalah sebesar 19.1% dan sisanya 80.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *Ajusted R-squared* dalam penelitian ini masuk pada kategori kuat (Ghozali dan Latan 2014).

Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel dalam model penelitian ini mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *composite reliability* untuk semua variabel di atas 0.70 serta *cronbach alpha* yang terdapat pada tabel 4.5 memiliki nilai di atas >0.60->0.70, (Ghozali 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi tingkat reliabilitas konsisten internal. Nilai *Average variance extracted* (AVE) untuk semua variabel memiliki nilai di atas 0.50. Hal ini berarti bahwa semua variabel laten dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen (*convergent validity*).

Berikutnya, nilai *full colinearity variance inflation factor* (VIF) untuk setiap konstruk/variabel juga sangat baik yaitu <3.3 sehingga tidak terdapat problem vertikal maupun *lateral collinearity* di dalam model penelitian ini. Terakhir koefisien *Q-squared* dalam penelitian ini menghasilkan nilai di atas/lebih besar dari nol yaitu untuk variabel *audit judgment performance* (AJPE) sebesar 0.198 dan *effort* (EFFO) sebesar 0.205 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki nilai validitas *predictive relevance* yang layak.

Tabel 2. Deskripsi Pengukuran Model Fit

No	Hasil Uji/Parameter	Nilai Hitung	Cut-Off Value	Kriteria/ Kesimpulan
1	<i>Average Path Coefficient</i> (APC)	0.259, P<0.001	P<0,05	Model Fit
2	<i>Average R-Squared</i> (ARS)	0.534, P<0.001	P<0,05	Model Fit
3	<i>Average adjusted R-squared</i> (AARS)	0.510, P<0.001	P<0,05	Model Fit
4	<i>Average Variance Inflation Factor</i> (AVIF)	1.871	<i>Ideal</i> <3,3	Model Fit
5	<i>Average full collinearity VIF</i> (AFVIF)	2.090	<i>acceptable if</i> <5, <i>ideally</i> < 3.3	Model Fit
6	<i>Tenenhaus GoF</i> (GoF)	0.614	<i>small</i> > 0.1, <i>medium</i> > 0.25, <i>large</i> > 0.36	Model Fit

Sumber: Hasil WarpPLS 4.0

Hasil *output General SEM analysis results* dan *Model fit and quality indices* pada Tabel 2 di atas tersaji nilai hitung dan *cut-off value* yang menunjukkan model mempunyai fit yang baik dan nilai P yang menampilkan hasil dari 6 (enam) indikator fit dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Average Path Coefficient (APC)

Average Path Coefficient (APC) merupakan pengukuran rata-rata koefisien path yang terdapat dalam sebuah model penelitian. *Cut-off value* batas nilai yang dapat diterima untuk nilai APC, ditentukan oleh P-value yang dihasilkan yaitu ≤ 0.05 . Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai APC=0.259, dan P<0.001, sehingga dapat disimpulkan model yang dibangun dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat signifikansi (Ghozali dan Latan, 2014).

Average R-Squared (ARS)

Average R-squared (ARS) merupakan pengukuran rata-rata nilai *R-Square* (R^2) yang terdapat dalam sebuah model penelitian. *Cut-off value* batas nilai yang dapat diterima untuk nilai ARS, ditentukan oleh P-value yang dihasilkan yaitu ≤ 0.05 . Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai ARS=0.534, dan P<0.001, hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat signifikansi (Ghozali dan Latan, 2014).

Average Adjusted R-Squared (AARS).

Average adjusted R-squared (AARS) merupakan pengukuran rata-rata nilai *adjusted R-Square* (R^2) yang terdapat dalam sebuah model penelitian. *Cut-off value* batas nilai yang dapat diterima untuk nilai AARS, ditentukan oleh P-value yang dihasilkan yaitu ≤ 0.05 . Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai AARS=0.510, dan P<0.001, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat signifikansi (Ghozali dan Latan, 2014).

Average Block Variance Inflation Factor (AVIF)

Average Block Variance Inflation Factor (AVIF) merupakan sebuah ukuran fit sebuah model penelitian, untuk mengevaluasi masalah kolinearitas dalam sebuah model *partial least squares* (PLS). Jika terjadi multikolinieritas (prediktor-prediktor dalam sebuah model saling berkorelasi), maka nilai AVIF akan semakin tinggi. *Cut-off value* batas nilai ideal AVIF adalah ≤ 3.3 dan masih bisa diterima/ditoleransi sampai pada nilai 5. Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai AVIF=1.871 artinya masuk pada kategori nilai yang ideal, maka dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali dan Latan, 2014).

Average Full Collinearity VIF (AFVIF)

Average Full Collinearity VIF (AFVIF) hampir sama dengan AVIF merupakan sebuah ukuran fit sebuah model penelitian, untuk mengevaluasi masalah kolinearitas dalam sebuah model *partial least squares* (PLS). Jika terjadi multikolinieritas (prediktor-prediktor dalam sebuah model saling berkorelasi), maka nilai AVIF akan semakin tinggi. Perbedaannya dengan AVIF adalah terletak pada sensitifitas. AVIF sensitif untuk kolineritas data yang *non-linear algorithm*, sedangkan AFVIF tidak sensitif untuk yang *non-linear algorithm*. *Cut-off value* batas nilai ideal AFVIF adalah ≤ 3.3 dan masih bisa diterima/ditoleransi sampai pada nilai 5. Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai AFVIF=2.090, artinya masuk pada kategori nilai yang ideal, hal ini dapat disimpulkan model yang dibangun dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali dan Latan, 2014).

Tenenhaus GoF (GoF)

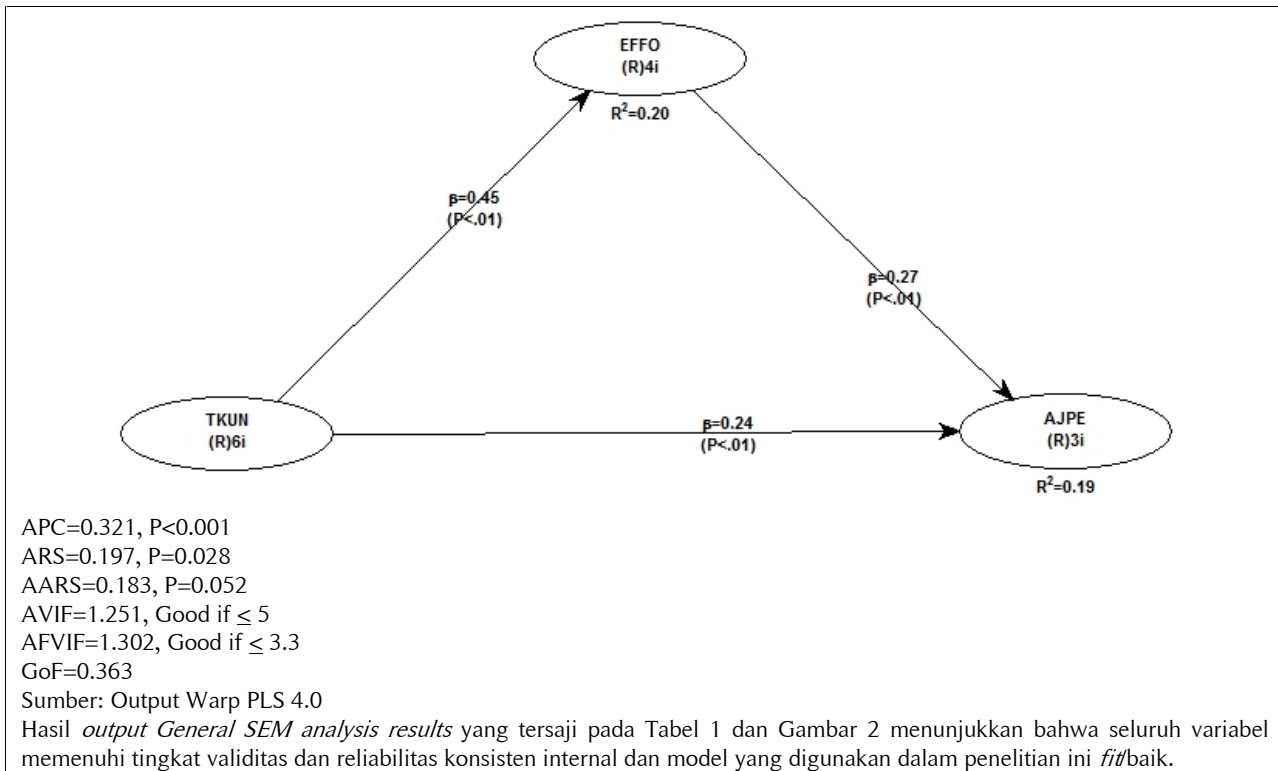
Tenenhaus GoF (GoF) serupa dengan *Average R-Squared* (ARS) karena dikembangkan oleh Tenenhaus et al. (2004: 740) yang mendefinisikan GoF dari akar kuadrat *average communality* dikalikan dengan *Average R-*

Squared(ARS). Apabila dilihat dari rumus perhitungannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai GoF, akan semakin baik sebuah model penelitian. *Cut-off value*/batas nilai yang dikembangkan oleh Tenenhaus et al. (2004: 740) mempunyai tiga kategori yaitu kecil ≥ 0.1 , menengah ≥ 0.25 , dan besar ≥ 0.36 . Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai GoF=0.614, artinya masuk pada kategori nilai yang besar, jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan model dalam penelitian ini dalam melakukan prediksi yang besar/kuat (Ghozali dan Latan 2014).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Kuesioner yang didistribusikan dalam penelitian ini sejumlah 285 eksemplar. Kuesioner tersebut dibagikan bulan Januari 2015 sampai pertengahan Maret 2015. Total kuesioner yang kembali hanya 119 dan setelah *screening* hanya 90 kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut.



Gambar 2. Model Hasil Penelitian

Tabel 3. *The Result Research*

Hypothesis	Hypotheses	Result
H1	Tekanan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Effort</i>	<i>Supported</i>
H2	<i>Effort</i> berpengaruh positif terhadap <i>Audit Judgment Performance</i>	<i>Supported</i>
H3	Tekanan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Audit Judgment Performance</i>	<i>Supported</i>

Sumber: Data Primer diolah (2016)

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa tekanan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan dengan *effort* (H1) dengan estimasi 0,45 dan $p < 0,01$. Demikian pula H2, *effort* berpengaruh secara positif dan signifikan dengan estimasi 0,27 (tingkat signifikansi $p < 0.01$) terhadap *Audit Judgment Performance*. Sementara pengujian hubungan Tekanan Akuntabilitas terhadap *Audit Judgment Performance* (H3) hasilnya positif dan signifikan dengan estimasi =0,24 pada $p < 0.01$.

Pembahasan

Locke (1997) mengemukakan bahwa *goal setting theory* menjadikan niat untuk mencapai sebuah tujuan sebagai sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberi tahu seorang auditor apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori ini mempengaruhi hubungan tekanan akuntabilitas terhadap *effort* dan tekanan akuntabilitas terhadap *audit judgment performance*. Sementara hubungan *effort* dan *audit judgment performance* didasari oleh *social cognitive theory*.

Tekanan akuntabilitas terbukti dapat memicu berupaya (*effort*) dan untuk menjaga kurangnya *audit judgment* terhadap tugas audit yang kompleks (Kennedy, 1993). Hasil penelitian pada hipotesis pertama (hipotesis 1) dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan akuntabilitas terbukti positif dan signifikan mempengaruhi *Effort* (estimasi 0,45, $p < 0,01$). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sanusi et al. (2007); Iskandar et al. (2012) yang menyatakan tekanan akuntabilitas berpengaruh terhadap upaya (*effort*).

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan estimasi 0,27 dengan $p < 0,01$. Nilai probabilitas berada di batas normal (tingkat signifikansi $p < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan *effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment performance*. Terkait hasil hipotesis ke dua, temuan riset ini sesuai dengan penelitian (Iskandar et al. (2012); Lai dan Chen (2012) yang menyebutkan bahwa *effort* berpengaruh positif pada kinerja dan kepuasan kerja. Hal ini bermakna bahwa upaya yang tinggi atau baik akan membuat auditor semakin tinggi untuk kemungkinan tercapai *audit judgment performance*. Hasil riset ini juga mendukung penelitian (Arifuddin 2014) yang menyatakan upaya (*effort*) berpengaruh positif terhadap *audit judgment performance*, berarti *audit judgment performance* dipengaruhi oleh upaya (*effort*) semakin tinggi upaya (*effort*) seorang auditor maka *audit judgment* yang dibuat oleh auditor akan semakin baik. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa upaya (*effort*) mempunyai hubungan positif dengan *audit judgment performance*, semakin besar upaya (*effort*) yang digunakan oleh auditor dalam proses audit maka akan semakin baik pula *audit judgment performance* yang dihasilkan.

Hasil uji pengaruh tekanan akuntabilitas terhadap *audit judgment performance* dalam penelitian ini menunjukkan estimasi 0,24, $p < 0,01$ membuktikan hipotesis 3 didukung. Tekanan akuntabilitas pada individu membuat mereka bertanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dengan standar yang telah ditentukan dalam memenuhi kewajiban, tugas, harapan dan biaya lainnya (Schlenker 1997). Ketika auditor yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, ia mungkin menjadi lebih waspada dan konservatif. Sebagaimana Turner (2001) berpendapat, auditor lebih komprehensif dan konservatif dalam strategi pencarian dan dengan demikian akan lebih berhati-hati dan mengerahkan usaha ekstra saat melakukan pekerjaan/tugasnya. Penelitian dalam akuntansi menunjukkan bahwa tekanan akuntabilitas merupakan faktor penentu keberhasilan *audit judgment performance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Leung dan Trotman (2005); Chang et al. (1997); Sari et al. (2008) bahwa auditor dengan tekanan akuntabilitas tinggi akan memiliki *audit judgment performance* yang lebih baik.

Simpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan analisis data, implikasi praktis atau kebijakan regulasi, beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Tekanan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Effort*; (2) *Effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Judgment Performance*; dan (3) Tekanan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Judgment Performance*.

Implikasi

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, implikasi praktis atau kebijakan regulasi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, BPK RI Pusat perlu untuk mempertimbangkan menggunakan tekanan akuntabilitas, dan *effort* (upaya) auditor dalam setiap melakukan audit laporan keuangan kementerian/lembaga yang menjadi objek entitas audit. Kedua tekanan akuntabilitas dan *effort* (upaya) dapat meningkatkan *audit judgment performance* auditor di BPK RI Pusat.

Auditor dalam tekanan akuntabilitas dapat memiliki *judgment* yang berubah-ubah (*variability*) dibanding auditor yang tidak dalam tekanan akuntabilitas. Auditor termotivasi untuk meningkatkan *audit judgment* baik secara internal melalui kemampuan (*capability*) mereka dan eksternal melalui tekanan akuntabilitas kinerja mereka (Ashton 1990; Leung dan Trotman 2005).

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Objek penelitian ini hanya terbatas pada auditor BPK RI Pusat; (2) Penelitian ini hanya membahas tekanan akuntabilitas, *audit judgment performance*, dan *effort* sebagai variabel variasi kriterion.

Saran

Berpedoman kepada beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan di atas, maka penulis memberikan saran kepada peneliti yang akan datang sebagai berikut: (1) Peneliti yang akan datang dapat mereplikasi model penelitian ini dan selanjutnya mengujikan pada Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia; (2) Peneliti yang akan datang dapat mempertimbangkan variasi variabel kriteria yang lain seperti variabel komitmen kepemimpinan, karakteristik auditor BPK RI, pengalaman auditor BPK RI.

Daftar Referensi

- Arifuddin. 2014. Pengaruh insentif kinerja terhadap audit judgment, dengan upaya sebagai intervening dan kompleksitas tugas sebagai moderating. (Repository.unhas.ac.id):1-21.
- Asare, S. K., dan L. S. McDaniel. 1996. The effects of familiarity with the preparer and task complexity on the effectiveness of the audit review process. *The Accounting Review* 71 (2):139-159.
- Ashton, R. H. 1990. Pressure and performance in accounting decision setting: Paradoxical effects of incentives, feedback, and justification. *Journal of Accounting Research* 28:148-180.
- Ashton, R. H., dan A. H. Ashton. 1995. *Judgment and decision making research in accounting and auditing*. UK: Cambridge University Press.
- Audit Commission. 2009. Final Score: The Impact of the comprehensive performance assessment of local government 2002–08. London: Audit Commission.
- Awang-Hashim, R., H. F. O’Neil, dan D. Hocevar. 2002. Ethnicity, effort, self-efficacy, worry, and statistics achievement in Malaysia: a construct validation of the state-trait motivation model. *Educational Assessment* 8 (4):341-364.
- Bandura, A. 1997. *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: Freeman.
- Bonner, S. E. 1994. A model of the effects of audit task complexity. *Accounting, Organizations and Society* 19 (3):213-234.
- Bonner, S. E., dan G. B. Sprinkle. 2002. The effects of monetary incentives on effort and task performance: theories, evidence, and a framework for research. *Accounting, Organizations and Society* 22:303-345.
- Buddery, P., S. Frank., dan M. Martinoff. 2014. *Enlightening professions? A vision for audit and a better society: rsa 2020 public services*.
- Case, P., S. Case, dan S. Catling. 2000. Please show you’re working: A critical assessment of the impact of OFSTED inspection on primary teachers. *British Journal of Sociology of Education* 21 (4):605-621.
- Chang, C. J., J. L. Y. Ho, dan W. M. Liao. 1997. The effects of justification, task complexity and experience/training on problem-solving performance. *Behavioral Research in Accounting* 9:98-116.
- Cloyd, C. B. 1997. Performance in tax research tasks: The joint effects of knowledge and accountability. *The Accounting Review* 72 (1):111-131.
- DeZoort, T., P. Harrison, dan M. Taylor. 2006. Accountability and auditors’ materiality judgments: The effects of differential pressure strength on conservatism, variability, and effort. *Accounting, Organizations and Society* 31:373-390.
- Dittenhofer, M. 2001. Internal auditing effectiveness: an expansion of present methods. *Managerial Auditing Journal* 16 (8):443-450.
- Downe, J., dan S. J. Martin. 2007. Regulation inside government: Processes and impacts of inspection of local public services. *Policy and Politics* 35 (2):215-232.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Ghozali, I., dan H. Latan. 2014. *Partial Least Squares konsep, metode, dan aplikasi menggunakan program Warp PLS 4.0*. Semarang: BP-UNDIP.
- Gibbins, M. 1984. Propositions about the psychology of professional judgment in public. *Journal of Accounting Research* 32 (1):127-135.

- Gray, R., D. Owen, dan C. Adams. 1996. *Accounting and accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Europe: Prentice Hall.
- Hartanto, H. Y., dan I. W. Kusuma. 2001. Analisis pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment auditor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Desember:1-14.
- Haryanto, dan B. Subroto. 2012. Interaksi individu-kelompok sebagai pemoderasi pengaruh framing dan urutan bukti terhadap audit judgment. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin, 1-36.
- Hogarth, R. M., dan H. J. Einhorn. 1992. Order effects in belief updating: The belief. *Adjustment Mode. Cognitive Psychology* 24:1 - 55.
- Holland, L. 2004. Experiences from a student programme designed to examine the role of the accountant in corporate social responsibility (CSR). *International Journal of Sustainability in Higher Education* 5 (4):404-416.
- Hood, C., O. James, G. Peters, dan C. Scott. 2004. *Controlling modern government*. edited by C. S. (eds). Cheltenham: Edward Elgar.
- Hood, C., O. James, dan C. Scott. 2000. Regulation inside government: Has it increased, is it increasing, should it be diminished? *Publik Administration* 78 (2):283-304.
- Humphrey, J. C. 2003a. Joint Reviews: The methodology in action. *British Journal of Social Work* 33 (2):177-190.
- Humphrey, J. C. 2003b. Joint reviews: Judgement day and beyond. *British Journal of Social Work* 33 (6):727-738.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo. 2002. *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Iskandar, T. M., R. N. Sari, dan R. Anugerah. 2012. Enhancing auditors' performance The importance of motivational factors and the mediation effect of effort. *Managerial Auditing Journal* 27 (5):462-476.
- Jamilah, S., Z. Fanani, dan G. Chandrarin. 2007. Pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. *Simposium Nasional Akuntansi X* Unhas Makassar, 1-30.
- Johnson, N. E., dan D. P. Saccuzzo. 1995. Self-reported effort versus actual performance in information processing paradigms. *Journal of General Psychology* 122 (2):195-210.
- Kelman, S. 2007. Public administration and organization studies. *The Academy of Management Annals* 1:225-267.
- Kennedy, J. 1993. Debiasing audit judgment with accountability: A framework and experimental results. *Journal of Accounting Research* 31 (2):231-245.
- Lai, M.-C., dan Y.-C. Chen. 2012. Self-Efficacy, effort, job performance, job satisfaction, and turnover intention: the effect of personal characteristics on organization performance. *International Journal of Innovation, Management and Technology* 3 (4).
- Leung, P. W., dan K. T. Trotman. 2005. The effects of feedback type on auditor judgment materiality judgments: the effects of differential pressure strength on conservatism, variability, and effort. *Accounting, Organizations and Society* 31:373-390.
- Libby, R., dan M. G. Lipe. 1992. Incentives, effort, and the cognitive processes involved in accounting-related judgments. *Journal of Accounting Research* 30 (2):249-273.
- Locke, E. A. 1997. The motivation to work: what we know. *Advance in Motivation and Achievement* 10:375-412.
- Lodge, M. C. M., dan C. Hood. 2010. Regulation inside government: retro-theory vindicated or outdated? In *The Oxford Handbook of Regulation*, edited by R. Baldwin and M. C. M. L. (eds). Oxford: Oxford University Press.
- Martin, S. J., J. D. Downe, C. L. Grace, dan S. M. Nutley. 2010. Utility, validity and evidence based policy making: The development and impact of performance improvement regimes in local publik services. *Evaluation* 16 (1):31-42.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Munro, E. 2004. The impact of audit on social work practice. *British Journal of Social Work* 34 (8):1075-1095.
- Peecher, M. E. 1996. The influence of auditors' justification process on their decisions: A cognitive model and experimental evidence. *Journal of Accounting Research* 34 (1):125-140.

- Power, M. 2003. Auditing and the production of legitimacy. *Accounting, Organizations and Society* 28:379-394.
- Praditaningrum, A. S., dan I. Januarti. 2012. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit judgment (studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Qimyatussa'adah., B. Subroto, dan G. Irianto. 2013. Pengaruh gender auditor dan gender klien terhadap audit judgement (sebuah kajian kuasi eksperimen). *Simposium Nasional Akuntansi, XVI*. Manado.
- Robbins, S., dan T. A. Judge. 2007. *Organizational Behavior*. 12 ed: Pearson Educations.
- Robbins, S. P. 2006. *Organizational behavior*. Singapore: Prentice Hall.
- Robin, S. P., dan T. A. Judge. 2007. *Organizational behavior*. 12 ed: Pearson Educations.
- Rozelle, R. M., dan J. C. Baxter. 1981. Influence of role pressures on the perceiver: judgments of video taped interviews varying judge accountability and responsibility. *Journal of Applied Psychology*:437-441.
- Sanusi, Z., T. Iskandar, dan J. M. L. Poon. 2007. Effect of goal orientation and task complexity on audit judgment performance. *Malaysian Accounting Review*:123-139.
- Sanusi, Z. M.-., dan T. M.-. Iskandar. 2007. Audit judgment performance: Assessing the effect of performance incentives, effort and task complexity. *Managerial Auditing Journal* 22 (1):34-52.
- Sari, R. N., D. Mardisar, dan R. Anugerah. 2008. A study on audit judgment performance: The effect of accountability, effort, and task complexity. *Journal Department of Accounting University of Riau*:1-23.
- Schlenker, B. 1997. Personal responsibility: applications of the triangle model. *Research in Organizational Behavior* 19:241-301.
- Talbot, C. 2010. Theories of Performance: Organizational and Service Improvement. In *Publik Domain*. Oxford: Oxford University Press.
- Tan, H.-T., dan A. Kao. 1999. Accountability effects on auditors' performance: The influence of knowledge, problem-solving ability, and task complexity. *Journal of Accounting Research* 37 (1):209-223.
- Tan, H., B. P. Ng, dan W. Y. Mak. 2002. The effects of task complexity on auditors' performance: the impact of accountability pressure and knowledge. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 21 (2):81-95.
- Tenenhaus, M., S. Amato, dan V. Esposito Vinzi. 2004. A global goodness of fit index for PLS Structural Equation Modelling. Paper read at XLII SIS Scientific Meeting, at CLEUP-Padova.
- Tetlock, P. E. 1983. Accountability and complexity of thought. *Journal of Personality and Social Psychology*.74-83.
- Tetlock, P. E. 1985. Accountability: The neglected social context of judgment and choice. *Research in Organizational Behavior*:297-332.
- Tetlock, P. E., dan J. Kim. 1987. Accountability and judgment process in a personality prediction task. *Journal of Personality and Social Psychology*:700-709.
- Tetlock, P. E., L. Skitka, dan R. Boeteger. 1992. Social and cognitive strategies for coping with accountability. *Journal of Personality and Social Psychology*:632-640.
- Turner, M. 2001. Toward the founding of cognitive social science. *The Chronicle Review* October 5:B11.
- Widayanti, A. R., dan I. Subekti. 2001. Analisis keahlian auditor BPK-RI menuju pelaksanaan fraud auditing. *Tema* II (2).
- Wilson, J., dan P. Rachal. 1977. Can the government regulate itself? *The Public Interest* 46:3-14.
- Woods, P., dan B. Jeffrey. 1998. Choosing positions: Living the contradictions of OFSTED. *British Journal of the Sociology of Education* 19 (4):547-570.
- Zulaikha. 2006. Pengaruh interaksi gender, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor terhadap audit judgment. *Simposium Nasional Akuntansi 9* Padang, 1-11.

Anteseden dan konsekuensi keberhasilan implementasi *performance-based budgeting* pada pemerintah daerah

Dwi Ratmono¹, Rita Suryani²

¹ Universitas Diponegoro

e-mail: dwi_ratmono@yahoo.com

² BPKP Pusat

e-mail: firlina2009@gmail.com

ARTIKEL INFO

Article history:

Available online 1 June 2016

Keywords:

internal control system, internal control/external government, reward and punishment, performance-based budgeting, performance accountability.

ABSTRACT

This study empirically examines the antecedents and consequences of the success of performance-based budgeting implementation of local government. The hypothesis of this study is the quality of human resources, use of information technology, the implementation of Government Internal Control System (SPIP), the oversight role of internal/external and implementation of reward and punishment positive effect on the success of performance-based budgeting. In addition, this study also hypothesized that the success of performance-based budgeting positive effect on performance accountability. The research sample is 50 unit of Pemalang local government. The analytical method used is Partial Least Squares (PLS). The results showed that the internal control systems, the role of internal and external oversight and implementation of reward and punishment positive effect on the success of performance-based budgeting in the organization. This study can not prove the influence of human resource quality and use of information technology to the success of performance-based budgeting. The result also show that the success of performance based budgeting has a positive effect on accountability. This study also provide an empirical finding that performance-based budgeting as an intervening variable on the effect of internal control, monitoring, and reward on accountability.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang anteseden dan konsekuensi keberhasilan penganggaran berbasis kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis penelitian ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia, penggunaan teknologi informasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran pengawasan intern/ekstern dan penerapan *reward and punishment* berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu penelitian ini juga menghipotesiskan bahwa keberhasilan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sampel penelitian sebanyak 50 SKPD pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Metode analisis yang digunakan adalah SEM-PLS. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan SPIP, peran pengawasan intern dan ekstern serta penerapan *reward and punishment* berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kualitas sumber daya dan penggunaan teknologi informasi terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa keberhasilan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan variabel intervening pada pengaruh SPIP, pengawasan, dan reward *reward and punishment* pada akuntabilitas.

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimulai dengan pada awal tahun 2002. Setelah lebih dari satu dekade, dalam masa *New Public Management* (NPM) tersebut muncul berbagai permasalahan dalam desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. Bahkan setelah 3 (tiga) Undang-undang terkait

Keuangan Negara dan 2 (dua) Undang-undang terkait terkait Pemerintah Daerah (Pemda) disahkan, berbagai masalah dalam desentralisasi fiskal terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga masih terus bermunculan. Padahal, menurut regulasi APBD seharusnya telah disusun dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting/PBB*).

Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan APBD. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan prinsip yang harus dapat diterapkan dengan baik untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam praktek pemerintahan. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan. Hal ini disebabkan penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih. Reformasi anggaran yang dilakukan oleh Pemda mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.

APBD berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian 2006; Hou, Lunsford, dan Jones 2011; Zhang dan Liao 2011). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas capaian output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo 2002). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Untuk mengetahui efektivitas anggaran dan bagaimana anggaran telah berorientasi pada kinerja maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Berdasarkan kajian penerapan anggaran berbasis kinerja oleh Badan Diklat Keuangan Kemenkeu (2013) disimpulkan bahwa praktek penerapan APBD berbasis kinerja hingga saat ini belum terbangun dengan baik, menyeluruh, utuh dan konsisten. Berbagai masalah dalam penganggaran berbasis kinerja di antaranya: (1) belum ada keselarasan antara visi misi Pemda yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dengan dokumen-dokumen penganggaran sehingga tidak konsisten antara tujuan jangka panjang dengan anggaran, (2) ketidakjelasan perencanaan kinerja pada level Pemda berlanjut pada ketidakjelasan rencana kinerja (Renja) masing-masing SKPD, (3) Program-program setiap SKPD belum terstruktur dengan baik sehingga sulit dipetakan keterkaitannya, (4) belum adanya Analisis Standar Belanja (ASB) dan terbatasnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tersedia dalam penyusunan anggaran, dan (5) kinerja belum dijadikan dasar alokasi dan acuan pembahasan anggaran di pemerintah maupun DPRD. Berbagai permasalahan dalam APBD berbasis kinerja di atas menyebabkan masalah lebih lanjut antara lain rendahnya kapasitas fiskal daerah, rendahnya alokasi belanja infrastruktur/modal, tersedotnya anggaran untuk belanja pegawai, dan rendahnya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan.

Selain permasalahan dalam sisi praktik, pentingnya penelitian tentang keberhasilan APBD berbasis kinerja juga karena ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu tentang anteseden dan konsekuensi keberhasilan APBD berbasis kinerja Andrews (2004) dan Kong (2005) dengan penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi *reformasi budgeting* di United States (US) adalah faktor otoritas (regulasi dan hukum, prosedural, organisasi), kemampuan (evaluasi kinerja, personil dan teknis/teknologi informasi) dan penerimaan (politik dan manajerial).

Goddard (2004) dan Hou et al., (2011) memberikan bukti empiris bahwa praktik penganggaran berbasis kinerja berhubungan dengan persepsi akuntabilitas. Kesimpulan yang sama dihasilkan oleh penelitian Mediawati dan Kurniawan (2012) yang meneliti pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Wilayah IV Priangan dan menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

Sembiring (2009) melakukan penelitian penyusunan APBD berbasis kinerja Kabupaten Tanah Karo dengan variabel independen komitmen dari seluruh organisasi, penyempurnaan sistem organisasi, sumber daya yang cukup dan *reward and punishment* dengan hasil secara simultan semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap APBD berbasis kinerja dan secara parsial perbaikan administrasi mempunyai pengaruh paling signifikan. Cipta (2011) meneliti penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Tanah Datar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu keterbatasan dana, keterbatasan SDM, kurangnya dukungan legislatif, dan kelemahan data kinerja. Widanarto (2012) melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Dengan berbagai permasalahan dalam implementasi APBD berbasis kinerja yang seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menganalisis anteseden dan konsekuensi APBD berbasis kinerja. Dalam rangka menjelaskan ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu maka penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang lebih komprehensif berdasarkan pada penggabungan teori keagenan dan teori legitimasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi (anteseden) dan manfaat (konsekuensi) penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis peran variabel penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagai variabel intervening pengaruh faktor-faktor anteseden (kualitas SDM, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, pengawasan, dan sistem *reward*) pada faktor konsekuensi (tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah).

Penelitian berkontribusi bagi praktik dan literatur akuntansi pemerintahan. Pada sisi praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi input untuk evaluasi kebijakan penerapan APBD berbasis kinerja terutama untuk Pemda di Indonesia yang menghadapi permasalahan seperti diuraikan pada bagian sebelumnya. Bagi literatur akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan teori dan variabel yang lebih komprehensif.

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Landasan Teori

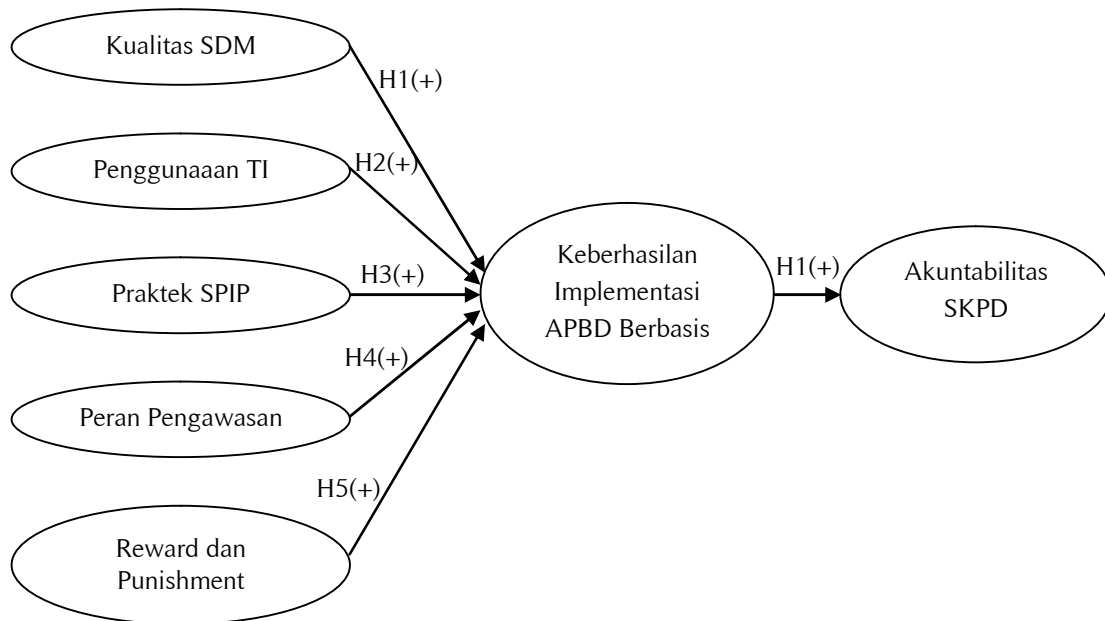
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori sebagai landasan pengembangan hipotesis yaitu teori agensi dan teori institusional. Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi menggambarkan adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agent* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agent*. Berdasar teori agensi di bidang akuntabilitas publik, Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konsep akuntabilitas ini dapat dipahami bahwa kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (*agent*) adalah memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh DPRD (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Teori institusional dikembangkan berdasarkan pemikiran DiMaggio dan Powell (1983) organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir dan bekerja organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual.

Kekhususan teori institusional terletak pada paradigma norma-norma dan legitimasi, cara berpikir dan semua fenomena sosiokultural yang konsisten dengan instrumen teknis pada organisasi. DiMaggio dan Powell (1983) melihat bahwa organisasi terbentuk karena kekuatan di luar organisasi yang membentuk lewat proses *mimicry* atau imitasi dan *compliance*.

Dalam berbagai kondisi, tekanan eksternal mengarahkan organisasi pada unsur yang dilegitimasi seperti regulasi atau standard operasi. DiMaggio dan Powell (1983) ber teori bahwa organisasi dibentuk oleh kekuatan-kekuatan dari luar organisasi tersebut melalui proses ketaatan (*compliance*), peniruan, dan proses kognisi. Lebih lanjut, bahwa struktur dan proses organisasi cenderung menjadi *isomorphis* dengan norma-norma yang dapat mereka terima untuk dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan individu-individu dalam organisasi hanya mengandalkan pengalaman mereka untuk meminimalkan masalah dalam rangka menghadapi masalah-masalah baru, sekaligus sebagai usaha untuk bertanggung jawab bagi pihak eksternal.

Teori institusional di bidang sektor publik dapat diterapkan melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagai unsur yang dilegitimasi melalui regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mencapai akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi. Oleh sebab itu *institutional isomorphism* (*coercive*, *mimetic* dan *normative*) dapat digunakan sebagai landasan teori yang sesuai untuk menjelaskan praktik penganggaran berbasis kinerja SKPD pada pemerintah daerah di Indonesia. Berdasar kajian terhadap teori dan telaah temuan penelitian terdahulu maka diajukan model seperti pada Gambar 1.



Gambar 1: Model Penelitian

Perumusan Hipotesis Penelitian

Implementasi APBD berbasis kinerja memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam hal profesionalisme dan kompetensi maupun pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan/diklat sehingga regulasi dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya. Latar belakang pegawai atau staf bagian perencanaan pada SKPD yang tidak memiliki ilmu perencanaan, baik yang diperoleh dari latar belakang pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan, menyebabkan kualitas SDM dalam perencanaan lemah sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai indikator kinerja (Pakmaram et al. 2012).

Lemahnya kualitas SDM juga sering mengakibatkan perbedaan pemahaman antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tim anggaran SKPD mengenai *performance based budgeting*. TAPD cenderung menyeleksi kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh SKPD yang sesuai dengan prioritas dan menunjang visi dan misi daerah yang terdapat dalam RPJM. Namun, hal ini sering dianggap oleh SKPD hanya sebagai membagi-bagi proyek. Andrews (2004) dalam salah satu kasus penelitiannya tentang faktor-faktor yang menjadi dasar reformasi anggaran di Amerika Serikat menyatakan bahwa salah satu faktor kunci dalam adopsi PBB yaitu *personnel ability*. *Personnel ability* menekankan pentingnya kompetensi personil sebagai kunci ketika mengadopsi PBB. Staf yang berdedikasi diperlukan untuk mendorong proses PBB, dengan keterampilan khusus dalam mengukur kinerja, memelihara dan mengelola database. Pada tahap lebih lanjut kompetensi personil harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja yang relevan, dan menggunakan data kinerja dengan cara yang konstruktif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Kualitas SDM Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan APBD berbasis kinerja.

Diterbitkannya INPRES Nomer 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menunjukkan bahwa pemerintah telah menyadari pentingnya penggunaan teknologi informasi termasuk dalam praktek penganggaran berbasis kinerja untuk menciptakan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya Kementerian Keuangan juga telah menggunakan berbagai aplikasi dalam pelayanan administrasi pelaksanaan anggaran dan pelaporan/pengelolaan perbendaharaan, serta telah adanya pengembangan sistem informasi terpadu dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Andrews (2004) dan Kong (2005) dalam penelitian di USA menyatakan bahwa beberapa aspek yang menjadi dasar adanya reformasi *budgeting* adalah regulasi dan hukum, *reward and punishment*, kualitas sumber daya manusia dan kemampuan teknis dalam hal teknologi informasi. *Technical ability* dalam penelitian Andrews (2004) mengungkapkan pentingnya kemampuan teknis tertentu yaitu adanya teknologi informasi yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mengumpulkan informasi kinerja dan menyediakan basis data dalam format yang tepat,

untuk berbagai pengguna dan harus kompatibel dengan berbagai sistem lain yang menyediakan dasar untuk akuntansi pemerintah, pemantauan, dan pelaporan.

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan APBD berbasis kinerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pentingnya peran SPI juga ditunjukkan oleh hasil penelitian (Pakmaram et al. 2012).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan bukti empiris pentingnya peran SPI bagi organisasi. Penelitian Nasir dan Oktari (2010) menyimpulkan bahwa Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Afrida (2013) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Padang .

H3: Praktek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan APBD berbasis kinerja.

Fungsi pengawasan dalam membantu manajemen meliputi tiga hal, yaitu: (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja. Fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara cepat dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal. Hasil penelitian Pakmaram et al. (2012) menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja terutama dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengawasan auditor internal dan eksternal. Widanarto (2012) melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya pengawasan dapat diamati apakah pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan atau sebaliknya, dan bila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, akan dapat dengan cepat ditanggulangi guna pencapaian tujuan yang direncanakan.

H4: Peran pengawasan internal/eksternal berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan APBD berbasis kinerja.

Andrews (2004), Hou et al, (2011) dan Sembiring (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem *reward and punishment* berpengaruh secara signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Zhang dan Liao (2011) menyatakan bahwa sistem imbalan dan hukuman harus digunakan karena banyak faktor yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai target kinerja berada di luar kontrol mereka. Dengan *reward and punishment* akan dapat memotivasi sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditentukan.

Sembiring (2009) memberikan bukti empiris bahwa sistem *reward and punishment* berpengaruh positif terhadap penerapan APBD berbasis kinerja di Tanah Karo. *Reward* diwujudkan dalam bentuk penerapan penghargaan secara adil dan konsisten atas keberhasilan implementasi penganggaran berbasis kinerja berupa peningkatan karir dan promosi jabatan sedangkan *punishment* diwujudkan melalui adanya sanksi/hukuman bagi satuan kerja yang belum mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja berupa mutasi dari jabatan atau hukuman disiplin. Pemberian penghargaan (*reward*) yang adil dan konsisten dan adanya sanksi (*punishment*) yang tegas dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja di seluruh SKPD.

H5: *Reward and punishment* berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan APBD berbasis kinerja.

Pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Bastian 2006; Zhang dan Liao 2011). Implementasi APBD berbasis kinerja diharapkan dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas dan *good governance* karena dengan anggaran berbasis kinerja yang secara konseptual, merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Dengan anggaran berbasis kinerja keberhasilan setiap program/kegiatan dapat terukur dengan baik dan secara berkesinambungan dapat dilakukan perbaikan sehingga praktek pemerintahan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Penelitian Goddard (2004) menyimpulkan bahwa praktik penganggaran berbasis kinerja berhubungan positif dengan persepsi tingkat akuntabilitas. Adapun Mediawati dan Kurniawan (2012) melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H6: Keberhasilan penerapan APBD berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas.

Berdasar perspektif teori keagenan dapat diajukan argumen bahwa Pemda (sebagai agen) mengimplementasikan APBD berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan amanah berbagai prinsipal. Dengan mengimplementasikan APBD berbasis kinerja, maka berbagai input pengelolaan keuangan daerah seperti SDM, teknologi, SPI, pengawasan, dan sistem reward akan dapat diubah menjadi output berupa akuntabilitas pada *stakeholders*. Dalam kerangka teori legitimasi, dengan mengimplementasikan APBD berbasis kinerja, Pemda dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat dengan berupa akuntabilitas dalam mengelola berbagai input tersebut (Zhang dan Liao 2011; Hou, Lunsford, dan Jones 2011). Dengan demikian, APBD berbasis kinerja merupakan sebuah sarana untuk memproses berbagai input pengelolaan keuangan daerah menjadi bentuk akuntabilitas Pemda pada publik. Hal ini berarti implementasi APBD berbasis kinerja merupakan variabel intervening sesuai pernyataan Baron dan Kenny (1986) sebagai variabel yang menjelaskan bagaimana proses atau *generative mechanism* variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

H7: Pengaruh berbagai input (SDM, TI, SPI, Pengawasan, dan Reward) terhadap tingkat akuntabilitas adalah tidak langsung melalui penerapan APBD berbasis kinerja sebagai variabel intervening

Metoda Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memilih objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya karena merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan peringkat kinerja yang baik dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam penilaian Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan status peringkat sangat tinggi dengan skor 3,1310 atau peringkat ke-20 secara nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-4761 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya merupakan salah satu contoh Pemda yang mempunyai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Pematang Jaya yang terdiri dari 2 organisasi sekretariat, 11 organisasi dinas daerah, 10 lembaga teknis daerah dan 1 organisasi Satuan Polisi dan Pamong Praja (Satpol PP) serta 14 organisasi berbentuk kecamatan. Seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 38 SKPD atau menggunakan metode sensus. Responden dalam sampel penelitian terdiri dari kepala sub bagian perencanaan dari setiap SKPD, dan staf pada sub bagian perencanaan SKPD. Mereka dipilih karena merupakan pejabat yang mempunyai informasi perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD. Pada setiap SKPD terdapat 2 (dua) responden untuk dapat memperoleh informasi yang dapat merepresentasikan pelaksanaan APBD pada setiap SKPD.

Variabel Endogen dan Eksogen

Pengukuran variabel penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator Variabel
Keberhasilan Penerapan APBD Berbasis Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Standar Pelayanan Minimum (SPM), Analisis Standar Biaya (ASB) dan indikator kinerja untuk pengukuran kinerja, • Tingkat penyerapan anggaran dan terpenuhinya prinsip 3 E dalam realisasi anggaran, • Keterkaitan antara perencanaan dengan output. • Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sehingga pengaduan berkurang.
Akuntabilitas Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Keterkaitan pencapaian kinerja dengan visi/misi/program/kebijakan yg telah ditetapkan dlm renstra, kejelasan sasaran anggaran, • Adanya indikator dan analisis anggaran, • Tersusunnya LAKIP secara tepat waktu dan digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program/kegiatan selanjutnya • Adanya evaluasi/pengukuran kinerja dan pengawasan untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan

Variabel	Indikator Variabel
Kualitas Sumber Daya Manusia/SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan dengan biaya terjangkau dan berkurangnya penyimpangan anggaran. • Profesionalisme/kompetensi dan jumlah SDM, • Kecukupan diklat/pembekalan tentang PBK, • Adanya perubahan mind set dari input base ke output based dalam penganggaran, • Adanya perlakuan yang adil kepada semua pegawai.
Penggunaan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan TI dalam Penyusunan sampai dengan pelaporan Pertanggungjawaban • Adanya sarpras, tenaga ahli dan <i>webside</i> sebagai sarana komunikasi • Adanya kemudahan akses dan publikasi pengelolaan keuangan secara lengkap dan tepat waktu
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya satgas SPIP • Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan SPIP secara berlanjut, • Penerapan Lima Unsur SPIP
Peran Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya evaluasi 3E atas pelaksanaan anggaran, • Audit internal melaksanakan tugas pengawasan • Hasil evaluasi/pengawasan ditindaklanjuti dengan segera.
<i>Reward dan Punishment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara adil, • <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> atas pencapaian target diterapkan sesuai sistem informasi yang handal. • Tersedia sarana pengaduan atas ketidakpuasan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.

Metoda Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah kuesioenr yang dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini.

Teknik Analisis

Analisis terhadap data yang diperoleh dari survei kuesioner akan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) karena model teoritis penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (*unobserved variables*) atau disebut konstruk. SEM mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Selain itu, SEM mempunyai kelebihan untuk menilai kesesuaian model (*model fit*) antara model teoritis pada Gambar 1 dengan data empiris.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang yang diwakili oleh Tim Anggaran dan Perencanaan Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini Kepala dan Staf pada Subbagian Perencanaan/Anggaran yang dipilih sebagai responden untuk mengisi kuesioner yang didistribusikan. Terdapat 50 SKPD yang menjadi sampel dalam penelitian yang terdiri dari 25 dinas daerah dan lembaga teknis daerah, 14 kecamatan dan 11 kelurahan. Dalam rangka memperoleh jawaban yang dapat merepresentasikan kondisi setiap organisasi maka pada setiap SKPD dipilih sebanyak 2 (dua) responden sehingga seluruhnya terdapat 100 responden. Kuesioner diserahkan langsung kepada 100 responden. Karena unit analisis penelitian adalah SKPD maka hasil jawaban dari setiap SKPD dimana terdapat 2 (dua) responden dihitung rata-ratanya dan digunakan sebagai skor untuk setiap SKPD.

Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang meliputi kisaran nilai minimum dan maksimum baik secara teoritis maupun aktual, nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar untuk setiap variabel:

Tabel 2: Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Nilai Tengah Teoritis	Kisaran Aktual	Rata-Rata Empiris	Standar Deviasi
Kualitas SDM	4 - 20	12	13 - 20	17,42	1,64
Teknologi Informasi	3 - 15	9	10 - 15	13,15	1,19
SPPI	4 - 20	12	13 - 20	16,49	1,71
Pengawasan Internal	3 - 15	9	9 - 15	12,52	1,51
Reward and Punishment	3 - 15	9	8 - 20	12,87	1,53
APBD Berbasis Kinerja	6 - 30	18	17 - 30	25,91	2,53
Akuntabilitas	5 - 25	15	16 - 25	21,73	2,03

Tabel 2 menunjukkan rata-rata empiris variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM) sebesar 17,42 lebih tinggi dari nilai tengah teoritisnya yang hanya sebesar 12. Hal ini menunjukkan responden mempersepsikan tingkat kualitas SDM pada bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan SKPD baik. Rata-rata empiris variabel Penggunaan Teknologi Informasi (PTI) sebesar 13,15, variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PSPIP) sebesar 16,49, Peran Pengawasan Intern/Ektern (PPIE) sebesar 12,52 dan Penerapan *Reward and Punishment* (PRP) sebesar 12,87 semuanya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tengah teoritisnya. Demikian juga dengan variabel endogen yaitu Keberhasilan APBD Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas dengan rata-rata empiris 25,91 dan 21,73 lebih tinggi dari nilai tengah teoritisnya sebesar 18 dan 15. Dapat disimpulkan bahwa secara umum responden mempersepsikan tingkat keberhasilan penerapan APBD berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja pada tingkat yang cukup baik.

Hasil Pengujian Hipotesis dengan SEM-PLS

Pada bagian ini diuraikan hasil pengujian hipotesis dengan teknik analisis SEM-PLS. Analisis SEM PLS meliputi 2 (dua) tahapan yaitu (Hair, Hult, dan Sartedt 2013): (1) model pengukuran (*measurement model/outer model*), dan (2) model struktural (*structural model/inner model*). Berikut ini hasil pengujian untuk setiap tahapan SEM-PLS.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran disebut juga evaluasi *outer model* yang digunakan untuk menilai reliabilitas dan validitas setiap konstruk penelitian. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan data primer layak dianggap reliabel (andal). Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) *composite reliability* lebih besar dari 0,70 dan (2) *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Namun, dalam penelitian eksploratoris, skor 0,60 dapat diterima (Sholihin dan Ratmono, 2013). Hasil pengujian reliabilitas disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Pengujian Reliabilitas

	KSDM	PTI	PSPIP	PPIE	PRP	KPBK	Akunt
Composite reliability	0,874	0,806	0,899	0,893	0,903	0,902	0,898
Cronbach's alpha	0,807	0,636	0,850	0,820	0,837	0,868	0,856

Tabel 4: Hasil Pengujian Validitas Diskriminan

	KSDM	PTI	PSPIP	PPIE	PRP	KPBK	Akunt
KSDM	(0.844)	0.594	0.833	0.767	0.677	0.568	0.685
PTI	0.594	(0.763)	0.569	0.599	0.565	0.456	0.500
PSPIP	0.833	0.569	(0.868)	0.725	0.702	0.632	0.726
PPIE	0.767	0.599	0.725	(0.858)	0.599	0.668	0.744
PRP	0.677	0.565	0.702	0.599	(0.869)	0.530	0.499
KPBK	0.568	0.456	0.632	0.668	0.530	(0.809)	0.777
Akunt	0.685	0.500	0.726	0.744	0.499	0.777	(0.800)

Berdasarkan Tabel 4 seluruh konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas konstruk telah terpenuhi untuk semua variabel laten dalam penelitian ini.

Pengujian validitas konstruk meliputi validitas diskriminan dan validitas konvergen. Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa indikator-indikator atau pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya

tidak berkorelasi tinggi. Validitas diskriminan yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. Hasil pengujian validitas diskriminan disajikan pada tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 akar kuadrat AVE dari seluruh konstruk telah memenuhi kriteria harus lebih besar dari korelasi antar konstruk (kolom diagonal angka dalam kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama).

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk setiap konstruk. Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah model telah memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif yaitu: (1) *loading factor* harus di atas 0,70, dan (2) nilai p signifikan ($<0,05$) (Hair, Hult, dan Sartetd 2013; Kock 2012; Sholihin dan Ratmono 2013). Dalam beberapa kasus penelitian tahap awal, *loading factor* antara 0,4 sampai 0,7 dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan (Hair, Hult, dan Sartetd 2013). Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan seluruh konstruk reflektif telah memenuhi kriteria validitas konvergen karena (1) *loading indicator* di atas 0,60 dan (2) nilai p signifikan ($<0,05$). Secara keseluruhan, hasil pengujian terhadap model pengukuran pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua kriteria reliabilitas, validitas diskriminan dan validitas konvergen telah terpenuhi.

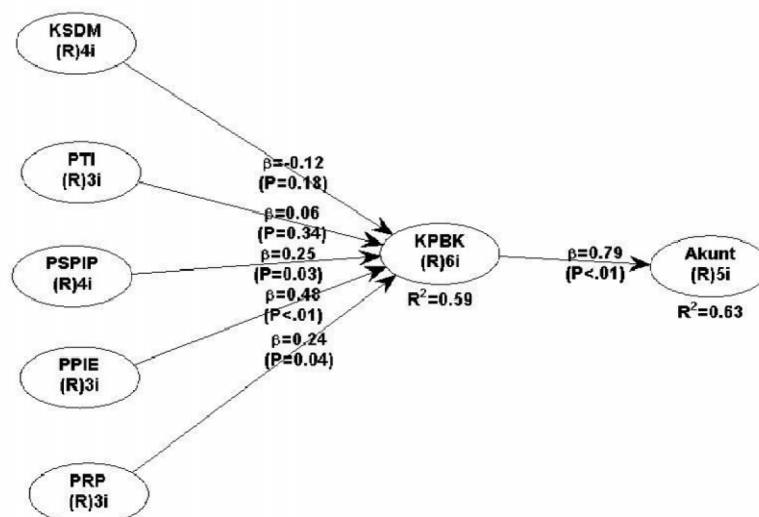
Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural dilakukan setelah terpenuhinya kriteria kesesuaian model menurut teori dengan data empiris (*model fit*). Tabel 5 menampilkan hasil indikator model fit yaitu *average path coefficient (APC)*, *adjusted average R-squared (AARS)*, dan *average variance inflation factor (AVIF)*. Berdasarkan Tabel 5 kriteria model fit telah terpenuhi, yaitu nilai p untuk APC dan AARS lebih kecil dari 0,05, dan *average block VIF (AVIF)* lebih kecil dari 5 (Kock 2012).

Tabel 5: Hasil Pengujian Model Fit

Indikator	Nilai	P value	Kriteria
APC	0,324	P = 0,003	P =< 0,05
AARS	0,582	P < 0,001	P =< 0,05
AVIF	3,253		AVIF <= 5

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 menunjukkan *model fit indices and P value* telah terpenuhi, sehingga analisis model struktural dapat dilakukan. Hasil pengujian model struktural disajikan dalam Gambar 2:



Gambar 2: Hasil Model Struktural

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasar hasil estimasi model struktural seperti dalam Gambar 2 maka dapat diringkas hasil pengujian hipotesis seperti dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6: Hasil Pengujian Hipotesis

Jalur	B	P	Hipotesis	Hasil
Kualitas SDM → APBD berbasis kinerja	-0,123	0,183	H1 (+)	Tidak didukung
TI → APBD berbasis kinerja	0,056	0,345	H2 (+)	Tidak didukung
SPI → APBD berbasis kinerja	0,254	0,027	H3 (+)	Didukung
Pengawasan → APBD berbasis kinerja	0,479	<0,001	H4 (+)	Didukung
Reward → APBD berbasis kinerja	0,236	0,037	H5 (+)	Didukung
APBD berbasis kinerja → Akuntabilitas	0,794	<0,001	H6 (+)	Didukung

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa hubungan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM) dengan Keberhasilan APBD berbasis kinerja adalah tidak signifikan pada $p = 0,183$ (di atas 0,05) dengan koefisien jalur sebesar -0,123. Dengan demikian, hipotesis 1 yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi APBD berbasis kinerja tidak didukung.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa hubungan variabel Penggunaan Teknologi Informasi (PTI) dengan Keberhasilan APBD berbasis kinerja adalah tidak signifikan pada $p = 0,345$ (di atas 0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0,056. Dengan demikian, hipotesis 2 yaitu penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi APBD berbasis kinerja tidak didukung.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa hubungan variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (KPBK) adalah signifikan pada $p = 0,027$ (dibawah 0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0,254. Dengan demikian, hipotesis 3 yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja didukung.

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa hubungan variabel Peran Pengawasan Intern dan Ekstern (PPIE) dengan Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (KPBK) adalah signifikan pada $p = <0,001$ (di bawah 0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0,479. Dengan demikian, hipotesis 4 yaitu peran pengawasan intern dan ekstern berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja didukung.

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa hubungan variabel Penerapan *Reward and Punishment* (PRP) dengan Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (KPBK) adalah signifikan pada $p = 0,037$ (dibawah 0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0,236. Dengan demikian, hipotesis 5 yaitu penerapan *reward and punishment* berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang didukung.

Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan bahwa hubungan variabel Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (KPBK) dengan Akuntabilitas Kinerja (Akunt) adalah signifikan pada $p = <0,001$ (dibawah 0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0,794. Dengan demikian, hipotesis 6 yaitu keberhasilan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja didukung.

Dalam pengujian hipotesis 7 tentang peran keberhasilan penganggaran berbasis kinerja sebagai variabel intervening maka dilakukan prosedur analisis efek tidak langsung (indirect effect) dari kelima anteseden (SDM, TI, SPIP, pengawasan dan reward) terhadap akuntabilitas sesuai metode yang disarankan (Baron dan Kenny 1986; Hair, Hult, dan Sartedt 2013; Kock 2012). Mengingat H1 dan H2 tidak didukung maka prasyarat implementasi APBD berbasis kinerja sebagai variabel intervening antara Kualitas SDM dan TI tidak terpenuhi. Keberhasilan implementasi APBD berbasis kinerja menjadi variabel intervening untuk pengaruh SPIP, pengawasan, dan reward karena: (1) prasyarat indirect effect signifikan telah terpenuhi, dan (2) hasil pengujian dengan metode Sobel menunjukkan nilai p masing-masing jalur sebesar 0,017, 0,001, dan 0,025. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi APBD berbasis kinerja menjadi pemediasi pengaruh PIP, pengawasan, dan reward dalam pengelolaan daerah terhadap akuntabilitas.

Pembahasan

Hasil pengujian tidak dapat membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini kemungkinan karena indikator-indikator kualitas sumber daya manusia dalam penelitian ini, belum mengukur kemampuan sumber daya manusia yang mengkhususkan pada kemampuan dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan analisis terhadap data kinerja serta kemampuan untuk menerjemahkan konsep-konsep *performance based budgeting* pada praktek-praktek birokrasi pemerintahan, yang merupakan prasyarat untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai salah satu indikator keberhasilan penganggaran berbasis kinerja.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Andrews (2004) dan Lee dan Wang (2009) tentang

faktor-faktor yang menjadi dasar reformasi anggaran di Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut kompetensi personil dikhususkan pada kemampuan dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan analisis terhadap data kinerja. Demikian pula Cipta (2011) menyatakan bahwa implementasi *performance based budgeting* sangat ditentukan oleh kapasitas administrasi pemerintahan dalam menerjemahkan konsep-konsep *performance based budgeting* pada praktek-praktek birokrasi pemerintahan.

Dengan mendasarkan pada hasil penelitian Andrews (2004) dan Cipta (2011), dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dengan indikator yang lebih dikhususkan pada kompetensi personil dalam hal kemampuan untuk melakukan evaluasi, pengukuran dan analisis terhadap data kinerja dan kapasitas administrasi pemerintahan dalam menerjemahkan konsep-konsep *performance based budgeting* pada praktek-praktek birokrasi pemerintahan, dapat lebih memberikan *output effect size* yang lebih besar untuk memberikan pengaruh terhadap peningkatan keberhasilan penganggaran berbasis kinerja di SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel penggunaan teknologi mempunyai rata-rata empiris sebesar 13,15 lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 9. Dengan demikian SKPD yang menjadi unit analisis dalam penelitian secara umum dalam hal penggunaan teknologi informasi dapat dikatakan telah cukup baik atas indikator-indikator pada variabel yang digunakan sebagai pengukur penggunaan teknologi informasi.

Namun indikator-indikator untuk penggunaan teknologi informasi (PTI) dalam penelitian ini masih merupakan indikator penggunaan teknologi, website dan tenaga ahli serta sarana prasarana yang masih bersifat standar dalam batas untuk penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan belum dikhususkan pada teknologi informasi untuk mengumpulkan informasi kinerja sehingga dapat menyediakan informasi yang tepat, kompatibel dengan berbagai sistem lain yang menyediakan dasar untuk akuntansi pemerintah, pemantauan, dan pelaporan, serta mengedepankan inovasi dan kreativitas dalam *input* untuk pengelolaan praktek penganggaran berbasis kinerja sehingga SKPD dapat melakukan pengukuran kinerja, dapat memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat, dapat melakukan perhitungan/analisis standar biaya, dapat mencapai penyerapan anggaran sesuai target perencanaan secara ekonomis, efisiensi dan efektifitas, sehingga terjadi peningkatan kepuasan atas pelayanan SKPD dan pengaduan masyarakat berkurang.

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa praktek sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Hasil analisis statistik deskriptif seperti nampak pada Tabel 4.1 di halaman sebelumnya, menunjukkan rata-rata empiris variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (PSPIP) sebesar 16,49 lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 12. Dengan demikian SKPD yang menjadi unit analisis dalam penelitian secara umum dalam hal penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dikatakan telah cukup baik atas indikator-indikator pada variabel yang digunakan sebagai pengukur variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (PSPIP) yaitu adanya satuan tugas (satgas) penyelenggara SPIP, adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan SPIP, dilaksanakannya lima unsur SPIP dan adanya evaluasi penerapan SPIP.

Adanya satuan tugas (satgas) penyelenggara SPIP, adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan SPIP, dilaksanakannya lima unsur SPIP dan adanya evaluasi penerapan SPIP telah berdampak pada keberhasilan penganggaran berbasis kinerja SKPD yang dibuktikan dengan rata-rata empiris variabel keberhasilan penganggaran berbasis kinerja (KPBK) sebesar 25,91 lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 18. Keberhasilan penganggaran berbasis kinerja ditunjukkan dengan tersusunnya indikator kinerja sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan, adanya standar pelayanan minimal kepada masyarakat, adanya perhitungan/analisis standar biaya, penyerapan anggaran sesuai target perencanaan secara ekonomis, efisiensi dan efektifitas, meningkatnya kepuasan atas pelayanan yang diberikan SKPD dan berkurangnya pengaduan masyarakat.

Kenyataan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, tercapainya keandalan pelaporan keuangan, terjaminnya pengamanan aset negara, dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya penerapan SPIP yang semakin baik dapat menjamin dan mengarahkan terjadinya peningkatan kinerja organisasi sebagai wujud keberhasilan penganggaran berbasis kinerja.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Nasir dan Oktari, (2010) atas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar dan penelitian Afrida (2013) atas Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Padang yang menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD yang berarti bahwa dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik melalui unsur-unsur yang ada dalam SPIP, adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dan

dilakukannya evaluasi atas praktek SPIP dapat memberikan jaminan kepada manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasinya sebagai wujud berhasilnya penganggaran berbasis kinerja.

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa peran pengawasan intern dan ektern berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif peran pengawasan intern dan ektern pada SKPD maka keberhasilan penganggaran berbasis kinerja semakin mudah untuk dicapai.

Dengan pengawasan segala penyimpangan akan segera terdeteksi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk menjamin tercapainya kinerja yang telah direncanakan sehingga pada akhirnya keberhasilan penganggaran berbasis kinerja dapat terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata empiris variabel keberhasilan penganggaran berbasis kinerja (KPBK) sebesar 25,91 lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 18.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Pakmaram et al. (2012) bahwa organisasi memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat untuk menjaga aset kunci seperti kas dan peralatan. Selain itu, Widanarto (2012) melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya pengawasan dapat diamati apakah pelaksanaan suatu pekerjaan telah efektif/efisien dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan atau sebaliknya, dan bila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, akan dapat dengan cepat ditanggulangi/ditindaklanjuti guna pencapaian tujuan yang direncanakan.

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa penerapan *reward and punishment* pada penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, hipotesis 5 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *reward and punishment* maka keberhasilan penganggaran berbasis kinerja semakin mudah dicapai.

Dengan adanya *reward and punishment* secara adil, tersedianya system informasi sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dan tersedianya sarana pengaduan atas pemberian *reward and punishment* akan memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk memberikan kinerja terbaiknya sehingga SKPD dapat mencapai keberhasilan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dibuktikan dengan rata-rata empiris variabel keberhasilan penganggaran berbasis kinerja (KPBK) sebesar 25,91 lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 18. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Andrews (2004) dan Sembiring (2009) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa *reward and punishment* berpengaruh secara signifikan terhadap APBD berbasis kinerja.

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa keberhasilan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Siantar. Dengan demikian, hipotesis 6 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keberhasilan penganggaran berbasis kinerja maka akuntabilitas SKPD semakin mudah dicapai.

Hasil analisis statistik deskriptif seperti nampak pada Tabel 4.1 di halaman sebelumnya, menunjukkan rata-rata empiris variabel keberhasilan penganggaran berbasis kinerja sebesar 25,91 lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 18. Demikian juga dengan akuntabilitas pada SKPD, menunjukkan rata-rata empiris sebesar 21,73 lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 15.

Dengan demikian SKPD telah berhasil mempraktekkan penganggaran berbasis kinerja yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja, melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan minimum kepada masyarakat, melakukan analisis standar biaya, menyerap anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat dan pengaduan berkurang sehingga SKPD semakin akuntabel yang ditandai dengan adanya keterkaitan pencapaian kinerja dengan visi/misi/program/kebijakan yang telah ditetapkan, adanya indikator kinerja dan analisis keuangan atas setiap kegiatan atau program setelah selesai dilaksanakan, adanya komitmen dari pimpinan/seluruh staf instansi untuk jujur, obyektif, transparan, dan akurat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi, adanya evaluasi/pengukuran kinerja dan pengawasan untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan serta tersusunnya LAKIP secara tepat waktu. Peningkatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari peningkatan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, semakin mudahnya masyarakat untuk menikmati fasilitas umum dengan biaya terjangkau, dan angka penyimpangan penggunaan anggaran dapat dikurangi. Hasil penelitian ini sesuai dengan Goddard (2004) yang menyimpulkan bahwa praktek penganggaran berhubungan dengan persepsi akuntabilitas. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Mediawati dan Kurniawan (2012) yang menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini juga mendukung perspektif teori keagenan dan teori institusional bahwa dengan mengimplementasikan APBD berbasis kinerja, maka berbagai input pengelolaan keuangan daerah seperti SPI, pengawasan, dan sistem *reward* akan dapat diubah menjadi output berupa akuntabilitas pada *stakeholders*. Pemda dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat dengan berupa akuntabilitas dalam mengelola berbagai input tersebut (Zhang dan Liao 2011; Hou, Lunsford, dan Jones 2011).

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penganggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor/anteseden yang mempengaruhi keberhasilan penganggaran berbasis kinerja adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, peran pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan penerapan *reward and punishment*. Sedangkan faktor kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Keberhasilan penganggaran berbasis kinerja juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Implementasi APBD berbasis kinerja merupakan variabel intervening yang menunjukkan APBD berbasis kinerja sebagai sarana memproses berbagai input pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda sebagai agen.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa selain penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran pengawasan intern/ekstern, penerapan *reward and punishment* juga berpengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja. Namun pada kenyataannya penerapan *reward and punishment* ini belum diatur secara memadai sebagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah melalui Undang-Undang tentang Pengawasan.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian yang lebih besar dengan mulai merencanakan untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur *reward and punishment* bagi pegawai sehingga diharapkan dimasa yang akan datang penerapan *reward and punishment* dalam meningkatkan keberhasilan penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan yang melekat pada metode survei kuesioner yaitu jawaban yang diberikan responden bisa saja berbeda dengan fakta dan perilaku sesungguhnya. Sampel penelitian ini terbatas pada tim anggaran pada unit analisis SKPD pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada kondisi penerapan penganggaran berbasis kinerja pada seluruh unit analisis dan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia. Penelitian mendatang dapat metode lain seperti metode kualitatif studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang anteseden dan konsekuensi keberhasilan penganggaran berbasis kinerja pada satu objek penelitian. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan indikator pengukuran variabel eksogen kualitas SDM dan penggunaan teknologi informasi secara lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat memperluas sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir pada satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah dan pada organisasi kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.

Daftar Referensi

- Afrida, N. 2013. Pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kinerja manajerial skpd di kota Padang. *Tesis tidak diterbitkan, Universitas Negeri Padang*.
- Andrews, M. 2004. Authority, acceptance, ability and performance based budgeting reform. *International Journal of Public Sector Management* 17 (4): 332–224.
- Baron, R.M., dan D. Kenny. 1986. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology* 51 (6): 1173–1182.
- Bastian, I. 2006. *Sistem akuntansi sektor publik*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Cipta, H. 2011. Analisis penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah (studi eksploratif pada pemerintah kabupaten Tanah Datar). Universitas Andalas.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-4761 tahun 2014.
- DiMaggio, P.J., dan W.W Powell. 1983. Institutional isomorphism and collective rationality in organization fields. *American Sociological Review* 48 (2): 147–160.
- Goddard, A. 2004. Budgetary practices and accountability habitus. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 17 (4): 543–577.
- Hair, J., R. Hult, dan M. Sartetd. 2013. *Aprimer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Los Angeles: Sage.

- Hou, Y., R. Lunsford, dan K Jones. 2011. State performance based budgeting in boom and bust years: An analytical framework and survey of the state. *Public Administration Review*: 370–388.
- INPRES Nomer 3 tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
- Jensen, M., dan O. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Jurnal of Financial Economics* 3 (4): 305–360.
- Kock, N. 2012. *WarpPLS 3.0 user manual*. Laredo: TX:Script Systems.
- Kong, D. 2005. Performance-based budgeting: The US experience. *Public Organization Review* 5: 91–107.
- Lee, J., dan X. Wang. 2009. Assessing the impact of performance based budgeting: A comparative analysis across the United States, Tiwan, and China. *Public Administration Review*: 60–69.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mediawati, E., dan K. Kurniawan. 2012. Pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di wilayah IV Priangan.”
- Nasir, A., dan R. Oktari. 2010. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian interen terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Kampar. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Riau.
- Pakmaram, A., B. Esgandari, Koshteli, dan M. Khalili. 2012. Identifying and prioritizing effective factors in the performance based budgeting in telecommunication company with TOPSIS. *African Journal of Business Management* 6 (24): 7344–7353.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 60. 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2013 tentang Keuangan Negara.
- Sembiring, BB. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja, badan pendidikan dan pelatihan keuangan, departemen keuangan Republik Indonesia. Universitas Sumatra Utara.
- Sholihin, M., dan D. Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Widanarto. 2012. Pengawas internal, pengawasan eksternal dan kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12 (1): 1–73.
- Zhang, Y., dan Y. Liao. 2011. Participatory budgeting in local government: Evidence from New Jersey municipalities. *Public Performance & Management Review* 35 (2): 281–302.

Intellectual capital dan intellectual capital disclosure terhadap market performance pada perusahaan publik indeks LQ-45

Shella¹, Linda Kusumaning Wedari²

^{1,2}Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51 Ged KW Lt.5-Jakarta 12930

e-mail: lindakusumaningwedari@yahoo.com

ARTIKEL INFO

Article history:

Available online 1 June 2016

Keywords:

intellectual capital, intellectual capital disclosure, market performance.

ABSTRACT

This research is an empirical research that aims to determine the effect of intellectual capital and intellectual capital disclosure towards market performance on public companies LQ-45 indexed in Indonesia Stock Exchange (ISE) 2012 to 2014. The test is performed by using multiple linear regression on the 64 data samples. The results of this study revealed a significant positive effect between intellectual capital and market performance. It showed that the market provides a higher market performance for the companies that have a high intellectual capital. Meanwhile, intellectual capital disclosure has a significant negative effect on market performance. The higher intellectual capital disclosure by the company, the lower the market performance.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* dan *intellectual capital disclosure* terhadap *market performance* pada perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam indeks LQ-45 untuk periode 2012 sampai dengan 2014. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda terhadap data sebanyak 64 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan yang positif antara *intellectual capital* dan *market performance*. Pasar memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang mempunyai *intellectual capital* yang tinggi. Sementara itu, *intellectual capital disclosure* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap *market performance*. Semakin tinggi *intellectual capital disclosure* yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah *market performance*.

Pendahuluan

Kekayaan sering dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan perusahaan. Seiring dengan adanya perubahan ekonomi dengan penerapan manajemen pengetahuan (*knowledge management*), maka kemakmuran suatu perusahaan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono dan Kadir 2003). Shiu (2006), Cheng, Lin, dan Hsiao (2010), Guthrie, Riccery, dan Dumay (2012) menyatakan bahwa ada kesenjangan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan. Baik investor maupun kreditor dapat mengambil keputusan yang kurang tepat karena laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Canibano, Ayuso, dan Sanchez (2000) mengungkapkan bahwa salah satu tanda informasi akuntansi tidak dapat dijadikan landasan dalam membuat keputusan adalah semakin meningkatnya kesenjangan antara nilai pasar dan nilai buku ekuitas perusahaan dalam *financial market*. Oleh karena itu, laporan keuangan yang hanya mengungkapkan aset berwujud bukan merupakan alat pengambilan keputusan yang baik. Seharusnya ada informasi lain yang perlu disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan sehingga dapat menjelaskan nilai lebih yang dimiliki perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir 2003). Perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan diduga diakibatkan oleh adanya nilai yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan namun mendapatkan perhatian lebih dari investor, yang dikenal dengan istilah *intellectual capital*.

Di Indonesia, *intellectual capital disclosure* masih bersifat sukarela. Perusahaan mengungkapkan informasi *intellectual capital* pada bagian profil perusahaan dan analisis pembahasan manajemen dalam laporan tahunannya. *Intellectual capital disclosure* dalam bentuk pengkombinasian laporan berbentuk angka, visualisasi dan naratif yang dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan *internal* dan *external* seperti investor dan kreditor, pengungkapan ini bertujuan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Fenomena *Intellectual capital*

mulai berkembang di Indonesia terutama setelah munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK No.19 (Penyesuaian 2014), aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Melalui pengungkapan dan pengukuran *intellectual capital*, perusahaan memiliki kesempatan untuk membangun kepercayaan dengan para *stakeholder*, meningkatkan reputasi eksternal, mengurangi asimetri informasi pada pasar modal, mengurangi biaya modal, serta mencerminkan *market performance*. *Market performance* merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *intellectual capital* dan *intellectual capital disclosure* terhadap *market performance*.

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Stakeholders Theory

Penelitian atas *intellectual capital* didasari oleh *stakeholder theory*. Teori ini mempertimbangkan posisi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kekuasaan. Kelompok *stakeholder* menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ulum, Chariri, dan Ghazali, 2008). Hal ini karena perilaku dan keputusan yang dilakukan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan pihak *stakeholder*. Kelompok *stakeholder* yang dimaksud dalam perusahaan meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat.

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen perusahaan diharapkan melaksanakan dan melaporkan aktivitas penting perusahaan kepada *stakeholder*. Seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap *stakeholder*. Pada akhirnya, *stakeholder* bebas memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan informasi tersebut.

Perusahaan menyediakan dua jenis informasi dalam laporan keuangan, yaitu informasi yang bersifat wajib (*mandatory*) dan informasi yang bersifat sukarela (*voluntary*). Informasi keuangan perusahaan digolongkan sebagai informasi yang bersifat wajib, sedangkan informasi non-keuangan digolongkan sebagai informasi yang bersifat sukarela. Fokus dalam penelitian ini adalah *intellectual capital*, informasi yang bersifat sukarela. Salah satu faktor yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure* adalah kinerja dari *intellectual capital* itu sendiri. Meek dan Gray (1988) menyatakan *value added* adalah ukuran akurat yang diciptakan oleh *stakeholders* dan kemudian didistribusikan kepada *stakeholders* yang sama. Semakin baik suatu perusahaan dalam memaksimalkan potensi di dalam perusahaan tersebut baik dari aset berwujud maupun aset tidak berwujud, maka akan semakin tinggi *value added* yang dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut. *Value added* ini yang nantinya dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan *stakeholder*. *Intellectual capital disclosure* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi pihak *stakeholder*.

Resource-Based Theory

Resources Based Theory (RBT) membahas bagaimana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, serta menggunakan aset-aset vital perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Cheng, Lin, dan Hsiao (2010) menjelaskan bahwa dalam teori RBT ini, untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan yang superior atau melebihi para kompetitornya.

Hubungan *intellectual capital* dan *market performance* dalam teori ini adalah RBT senantiasa memberikan petunjuk dalam memaksimalkan sumber daya perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan *value added* dengan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, sumber daya tersebut dapat berwujud maupun tidak berwujud, dan sumber daya tersebut mewakili input dalam proses produksi perusahaan; modal, perlengkapan, keahlian dari pegawai, paten, pembiayaan dan manajer yang berbakat. Kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menggunakan sumber daya secara terus menerus akan semakin sulit untuk dipahami dan ditiru para pesaing. Teori ini berasumsi bahwa perusahaan dapat berhasil bila perusahaan mampu mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui implementasi yang bersifat strategik dalam proses penciptaan nilai yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain dan tidak ada penggantinya (Barney 1991).

Berdasarkan RBT, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *market performance*. *Intellectual*

capital merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan dari aset tidak berwujud. Jadi, *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *market performance*.

Signalling Theory

Signalling Theory berkaitan dengan adanya asimetri informasi, dimana informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Asimetri informasi terjadi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi perusahaan. Hartono (2006) menyatakan *signalling theory* mengindikasikan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal berupa informasi positif di pasar melalui pengungkapan dalam laporan keuangan, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.

Signalling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberi sinyal kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini menitikberatkan terhadap pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi dinilai penting jika informasi tersebut dapat memberikan keterangan serta gambaran mengenai kelangsungan hidup perusahaan pada masa lalu, sekarang maupun keadaan pada masa yang akan datang. Selain itu, informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu juga sangat diperlukan oleh investor dan *stakeholder* sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan investasi.

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Pihak luar perusahaan dapat menggunakan laporan tahunan sebagai tolak ukur penilaian kemampuan perusahaan dan sinyal bagi pihak luar. *Intellectual capital* merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan yang diungkapkan secara sukarela. *Intellectual capital disclosure* memungkinkan pihak luar perusahaan, diantaranya investor dan *stakeholder*, agar dapat lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Miller dan Whiting (2008) menyatakan *intellectual capital disclosure* pada laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi investor, serta meningkatkan *market performance*. Perusahaan dapat menerima respon positif dari pasar dengan mengirimkan sinyal positif, dengan demikian perusahaan akan menerima keuntungan kompetitif dan meningkatkan *market performance*.

Intellectual Capital dan Market Performance

Dalam upaya menciptakan nilai (*value creation*), perusahaan perlu memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya, salah satunya adalah *intellectual capital*. *Intellectual capital* terdiri dari *human capital*, *customer capital* dan *structural capital*. Proses dari *value creation* akan menghasilkan *value added* yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan memiliki keunggulan kompetitif, maka persepsi pasar terhadap *market performance* akan meningkat karena diyakini bahwa perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif mampu bersaing dan bertahan di lingkungan bisnis yang dinamis. Investor akan memberikan penghargaan lebih kepada perusahaan yang mampu menciptakan *value added* secara berkesinambungan dengan berinvestasi lebih tinggi pada perusahaan.

Penelitian empiris mengenai hubungan *intellectual capital* telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya dilakukan oleh Putra (2012) yang membuktikan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan. Mahmud (2013) melakukan penelitian tentang *intellectual capital* dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap *market performance*. Selanjutnya penelitian Jacob (2012); Chariri dan Prasetyanto (2013); Firmansyah dan Iswajuni 2014; Laurensia dan Hatane (2015) juga menunjukkan adanya pengaruh positif antara *intellectual capital* terhadap nilai perusahaan (*Tobin Q*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widarjo (2011) dan Lestari, Azib, dan Nurdin (2015) menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap *market performance* dalam indeks LQ-45.

Intellectual Capital Disclosure dan Market Performance

Perusahaan yang melakukan *intellectual capital disclosure* akan menciptakan *value added*. *Intellectual capital disclosure* memberikan gambaran keseluruhan perusahaan kepada investor, karena informasi keuangan saja tidak cukup menggambarkan seluruh kekayaan perusahaan. Adanya *intellectual capital disclosure* mampu memberikan

informasi kepada investor mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan demi kepentingan *stakeholders*. Selain itu, semakin tinggi *intellectual capital disclosure* maka perusahaan akan dinilai investor sebagai perusahaan yang kredibel atau dapat dipercaya. Meningkatnya kepercayaan investor diyakini akan meningkatkan permintaan saham perusahaan dan penilaian pasar terhadap perusahaan.

Ho, Chau, dan Cheung (2012) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang melakukan IPO yang terdaftar pada tahun 2008-2010 di Hongkong. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *intellectual capital disclosure* berpengaruh positif terhadap *market performance*. Penelitian Jihene (2013) di Tunisia juga menunjukkan hasil *intellectual capital disclosure* berpengaruh positif terhadap *market performance*. Di Indonesia, Widarjo (2011) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil *intellectual capital disclosure* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_2 : *Intellectual Capital Disclosure* berpengaruh positif terhadap *market performance* dalam indeks LQ-45.

Metoda Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Perusahaan yang akan dipilih menjadi sampel adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat berikut: (1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tetap dalam kelompok indeks LQ-45 dari tahun 2012 hingga 2014 dihitung sejak februari 2012 s/d agustus 2014. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hanya perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar yang tinggi dan mampu menunjukkan konsistensi kinerja yang dapat terus berada pada kelompok LQ-45, (2) Perusahaan sampel mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Hal tersebut untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data serta menunjukkan perusahaan mana saja yang konsisten dalam memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan publik, (3) Perusahaan yang tidak menderita rugi, (4) Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah tahun 2012-2014.

Penelitian ini mendapatkan 72 data observasi dengan 8 data diantaranya *outlier* sehingga hanya 64 data yang dapat diolah, dengan data yang digunakan diambil dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia dengan tahun amatan 2012-2014. Proses pemilihan sampel dan jumlah data perusahaan yang menjadi sampel disajikan masing-masing pada tabel 1 dan tabel 2 berikut:

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar dalam indeks LQ-45 pada tahun 2012-2014.	70
Perusahaan tidak tetap dalam kelompok indeks LQ-45 selama tahun amatan.	(42)
Perusahaan yang menderita rugi.	(0)
Laporan keuangan tidak dalam mata uang rupiah.	(4)
Total perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	24

Sumber: Hasil Olahan

Tabel 2. Jumlah Data Perusahaan Yang Menjadi Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah data perusahaan LQ-45 yang memenuhi kriteria selama tahun amatan	72
Jumlah data outlier dan tidak digunakan	(8)
Jumlah data perusahaan yang menjadi sampel	64

Sumber: Hasil Olahan

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu *intellectual capital* dan *intellectual capital disclosure*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *market performance*. Masing-masing variabel dan pengukurannya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kinerja dari *Intellectual capital* diukur berdasarkan *value added*. *Value added* diciptakan oleh *physical capital* (VACA), *human capital* (VAHU), dan *structural capital* (STVA). Kombinasi dari ketiga *value added* tersebut disebut *Value Added Intellectual Capital* (VAICTM). Peneliti menggunakan VAICTM dalam penelitian ini karena VAICTM memiliki keunggulan dalam perolehan data yang digunakan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka keuangan. Metode ini juga menyediakan dasar ukuran standar yang konsisten. Data keuangan yang digunakan umumnya tersedia dalam laporan keuangan perusahaan yang memungkinkan analisis komparatif internasional menggunakan ukuran sampel besar di berbagai sektor industri. Selain itu, data yang digunakan dalam perhitungan VAICTM didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit sehingga perhitungan dapat dianggap obyektif dan dapat diverifikasi Pulic (2000).

Kedua, *intellectual capital disclosure* diprosikan dengan *intellectual capital disclosure index*. Penelitian ini menggunakan *intellectual capital disclosure index* yang dikembangkan oleh Singh and Zahn (2008). Penelitian Widarjo (2011) menyatakan *index* Singh dan Zahn (2008) memberikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Sistem pemberian kode dengan pemberian skor diharapkan akan membantu peneliti untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan *intellectual capital disclosure*. Pemberian skor untuk *item* pengungkapan dilakukan dengan menggunakan skala dikotomi tidak tertimbang (*unweighted dichotomous scale*), di mana jika *item* setiap kategori *intellectual capital* diungkapkan dalam prospektus akan diberi nilai satu (1) dan nol (0) jika item tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap *item* dijumlahkan untuk memperoleh total skor pengungkapan untuk setiap perusahaan.

Ketiga, *market performance* yang diukur berdasarkan Tobins'Q yang dikembangkan oleh James pada tahun 1969 kemudian dimodifikasi dan disederhanakan dalam Wolfe (2003). Metode ini menggunakan perhitungan *market value* dari *equity* itu sendiri ditambah *total liabilities* dibagi dengan *total assets*.

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum dari data yang diperoleh dan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model penelitian yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar dalam regresi linear berganda. Berikut Model Regresi Linier berganda yang digunakan:

$$\text{Tobins'Q} = \alpha + \beta_1 \text{IC} + \beta_2 \text{ICD} + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Tobins'Q = Variabel dependen pengukur market performane

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel independen

IC = *Intellectual capital*

e = *Error term*

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum atau deskripsi data yang dapat dilihat melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang terlibat dalam penelitian. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Deskrptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IC	64	4,41144	40,07630	8,7732265	5,91217195
ICD	64	14,81481	62,96296	45,8912037	13,18076075
TobinsQ	64	,32804	5,18478	1,9763216	,94419807
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Output SPSS 22.00

Tabel 3 menunjukkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 perusahaan. Rata-rata *intellectual capital* adalah sebesar 8,773, dengan standar deviasi sebesar 5,912. Nilai minimum untuk *intellectual capital* adalah 4,411 dan nilai maksimal dari *intellectual capital* adalah 40,076. Rata-rata *intellectual capital disclosure* sebesar 45,891, dengan standar deviasi 13,181. Nilai minimum untuk *intellectual capital disclosure* adalah 14,815 dan nilai maksimal dari *intellectual capital disclosure* adalah 62,963. Selanjutnya, rata-rata *market performance* LQ-45

berdasarkan perhitungan TobinsQ adalah sebesar 1,976, dengan standar deviasi 0,944. Nilai minimum untuk *market performance* LQ-45 adalah 0,328 dan nilai maksimal dari *market performance* LQ-45 adalah 5,185.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang berdistribusi normal. Menurut hasil pada tabel, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data residual yang berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat melalui nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, yaitu *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan sebesar 0,2 (*sign p*>0,05) sehingga disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,85667112
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,071
Test Statistic		,081
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^a

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 22.00

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada model penelitian menghasilkan nilai *tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel independen. Apabila nilai *tolerance* variabel independen kurang dari 0,1 dan VIF lebih dari 10 artinya terdapat multikolinearitas yang tinggi antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang kurang dari 0,01 dan lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
IC	,931	1,074
ICD	,931	1,074

Sumber: Output SPSS 22.00

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila angka signifikan (*Sig.*) > 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam tabel hasil uji heteroskedastisitas, tidak terdapat nilai signifikansi yang berada dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,903	,261		3,455	,001
IC	,016	,010	,190	1,505	,137
ICD	-,007	,005	-,202	-1,598	,115

a. Dependent Variable: abs_res_1

Sumber: Output SPSS 22.00

Analisis Regresi Berganda

Koefisien Determinasi dan F-statistik

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi disajikan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,420	,177	,150	,87060164	2,074

a. Predictors: (Constant), IC, ICD

b. Dependent Variable: TobinsQ

Sumber: Output SPSS 22.00

Dari tabel 8 di atas, nilai Adjusted R Square sebesar 0,150. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari IC dan ICD mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 15%, sedangkan sisanya sebesar 85% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini.

Nilai F-statistik yang disajikan pada tabel 9 berikut. F-statistik sebesar 6,551 dengan sig-F 0,003 menunjukkan bahwa model regresi telah lolos uji kesesuaian model sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis.

Tabel 9 Hasil Uji Anova

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9,930	2	4,965	6,551	,003
Residual	46,235	61	,758		
Total	56,165	63			

a. Dependent Variable: TobinsQ

b. Predictors: (Constant), IC, ICD

Sumber: Output SPSS 22.00

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan pada tabel 10. Berdasarkan tabel 10 di bawah ini dapat disimpulkan bahwa variabel *intellectual capital disclosure (ICD)* berpengaruh negatif signifikan terhadap *market performance LQ-45*, sedangkan variabel *intellectual capital (IC)* berpengaruh positif signifikan terhadap *market performance LQ-45*. Pembahasan dari kedua hasil pengujian hipotesis disajikan di bawah ini.

Tabel 10 Hasil Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,699	,482		5,603	,000
	IC	,034	,019	,213	1,770	,082
	ICD	-,022	,009	-,311	-2,581	,012

a. Dependent Variable: TobinsQ

Sumber: Output SPSS 22.00

Pengaruh *intellectual capital* terhadap *market performance LQ-45*

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan variabel *intellectual capital* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,082. Tingkat signifikansi tersebut berada di bawah 10% dengan nilai koefisien 0,34, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik hipotesis pertama tidak ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *market performance* dalam indeks LQ-45.

Penelitian menunjukkan bahwa pasar memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang mempunyai *intellectual capital* yang tinggi. Pengaruh *intellectual capital* terhadap *market performance* tersebut sesuai dengan *Resource-Based Theory (RBT)* dimana pengelolaan *intellectual capital* secara maksimal akan menciptakan *value added* yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. *Value added* merupakan hasil dari proses penciptaan nilai dipasar oleh perusahaan. Cheng, Lin, dan Hsiao (2010) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan keunggulan kompetitif, perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan yang superior atau melebihi

para kompetitornya. Pemanfaatan *intellectual capital* secara efektif dan efisien akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian keunggulan kompetitif. Dengan memiliki keunggulan kompetitif, maka persepsi pasar terhadap *market performance* akan meningkat karena diyakini bahwa perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif mampu bersaing dan bertahan di lingkungan bisnis yang dinamis. Investor akan memberikan penghargaan lebih kepada perusahaan yang mampu menciptakan *value added* secara berkesinambungan dengan berinvestasi lebih tinggi pada perusahaan. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya permintaan saham perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan *market performance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012); Randa dan Solon (2012); Mahmud (2013); Jacob (2012); Chariri dan Prasetyanto (2013); Firmansyah dan Iswajuni (2014); Laurensia dan Hatane (2015) yang menghasilkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Widarjo (2011) dan Lestari, Azib, dan Nurdin (2015) tidak mendukung hasil penelitian ini.

Pengaruh *intellectual capital disclosure* terhadap *market performance* LQ-45

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan tingkat signifikansi 0,012. Dengan signifikansi dibawah 10% dengan nilai koefisien -0,022, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti *intellectual capital disclosure* berpengaruh secara negatif terhadap *market performance* dalam indeks LQ-45. Semakin tinggi *intellectual capital disclosure* yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah *market performance* LQ-45.

Hasil pengujian dalam penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Widarjo (2011) pada perusahaan IPO tahun 1999-2007. Penelitian ini mengindikasikan bahwa sinyal yang disampaikan oleh perusahaan melalui *intellectual capital disclosure* tidak dapat mengurangi asimetri informasi. Semakin banyak *items* dalam *intellectual capital index* yang diungkapkan dalam *annual report* (*Human Resources, Customer, Information Technology, Processes, Research and Development, Strategic Statements*), ternyata tidak akan mempermudah calon investor untuk mengetahui prospek dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Calon investor tidak akan memberikan penilaian yang lebih tinggi pada perusahaan yang memperbanyak *intellectual capital disclosure*. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan karena belum adanya standar yang mengatur tentang *intellectual capital disclosure*. Perbedaan sampel penelitian juga kemungkinan merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakkonsistenan hasil penelitian.

Ditolaknya hipotesis kedua dipengaruhi oleh kegagalan penyampaian sinyal positif perusahaan kepada investor melalui perluasan *intellectual capital disclosure* sesuai dengan *signalling theory*. Informasi mengenai *intellectual capital disclosure* diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi investor, namun hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda bahwa tingginya *intellectual capital disclosure* yang diberikan perusahaan dapat memberikan sinyal negatif bagi investor. Dalam hal ini, perlu adanya perhatian mengenai tingkat pengungkapan yang harus disajikan perusahaan. Informasi yang diungkapkan perusahaan belum tentu menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Pengungkapan secara berlebihan atau terlalu detail membuat informasi perusahaan menjadi sangat terbuka sehingga investor mengetahui secara keseluruhan keunggulan serta kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Pengetahuan mengenai kelemahan perusahaan dapat berdampak buruk pada *market performance*, dimana investor dapat menarik kembali dana investasi mereka. Penurunan tingkat investasi akan menurunkan *market performance* (Schroeder, Clark, dan Cathey 2014).

Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *intellectual capital* dan *intellectual capital disclosure*. Variabel dependen yang diuji adalah *market performance*.

Penelitian ini mendapatkan 72 data observasi dengan 8 data diantaranya *outlier* sehingga hanya 64 data yang dapat diolah, dengan data yang digunakan diambil dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia dengan rentang tahun amatan 2012-2014. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum dari data yang diperoleh dan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model penelitian yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar dalam regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0.

Hasil pengujian dari hipotesis pertama memberikan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang telah dinyatakan, dimana *intellectual capital* berpengaruh secara signifikan dan mampu memberi nilai tambah atau meningkatkan *market performance*. Hal ini tercermin melalui tingkat signifikansi tersebut berada dibawah 10%, berikut juga nilai koefisien beta yang terbukti positif. Sementara itu, pengujian hipotesis kedua tidak memberikan

hasil yang sama dengan hipotesis pertama. Hipotesis kedua ditolak, dimana *intellectual capital disclosure* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *market performance*.

Beberapa saran untuk dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk mengganti ukuran indikator variabel *intellectual capital disclosure*, misalnya *intellectual capital disclosure index* oleh Guthrie, Riccery, dan Dumay (2012); Bontis (2001) dan Vergauwen, Bollen, dan Oirbans (2007).
2. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan di luar indeks LQ-45 sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan di Indonesia secara keseluruhan.
3. Menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat menganalisis pola hubungan antara variabel dalam jangka waktu yang lebih panjang dan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih kuat (*robust*).
4. Proses identifikasi *intellectual capital disclosure* dapat dikembangkan ke 0-3 (*four way numerical coding system*) sehingga tidak sekedar menghitung kuantitas pengungkapan namun juga kualitas pengungkapan.

Daftar Referensi

- Barney, J. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management* 17 (1): 99–120.
- Bontis, N. 2001. Assessing knowledge assets : A review of the models used to measure intellectual capital. *International Journal of Management Reviews* 3 (1): 41–60.
- Canibano, L., M. Ayuso, dan P Sanchez. 2000. Accounting for intangibles : A literature review. *Journal of Accounting Literature* 19: 102–30.
- Chariri, A., dan P. Prasetyanto. 2013. Pengaruh struktur kepemilikan dan kinerja intellectual capital terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting* 2 (2): 1–12.
- Cheng, M., J Lin, dan T Hsiao. 2010. Invested resource, competitive intellectual capital and corporate performance. *Journal of Intellectual Capital* 11 (4): 433–50.
- Firmansyah, Y., dan Iswajuni. 2014. Pengaruh intellectual capital terhadap profitabilitas, nilai pasar, pertumbuhan, dan actual return pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1: 50–59.
- Guthrie, J., F. Riccery, dan J. Dumay. 2012. Reflections and projections: A decade of intellectual capital accounting research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 25 (1): 6–26.
- Hartono. 2006. Analisis retensi kepemilikan pada penerbitan saham perdana sebagai sinyal nilai perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6 (2): 141–62.
- Ho, H., K. Chau, dan P. Cheung. 2012. Intellectual capital disclosure and initial public offerings : Evidence from Hong Kong. *Journal of Applied Economics and Business Research* 2 (2): 56–68.
- Jacob, J. 2012. Pengaruh intellectual capital dan pengungkapannya terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1 (4): 96–100.
- Jihene, F. 2013. The effect of intellectual capital disclosure on the value creation: An empirical study using Tunisian annual reports. *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 3 (1): 81–107.
- Laurensia, T., dan S. Hatane. 2015. Pengaruh intellectual capital dalam kinerja keuangan dan nilai perusahaan. *Journal of Business Accounting Review* 13 (1): 33–44.
- Lestari, W. T. P., Azib, dan Nurdin. 2015. Pengaruh corporate social responsibility (CSR), good corporate governance (GCG) dan intellectual capital (IC) terhadap nilai perusahaan dengan metode Tobin's Q pada perusahaan Sri-Kehati yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. *Prosiding Penelitian Sivitas Akademia (Sosial Dan Humaniora)* 1: 92–97.
- Mahmud, M. 2013. Pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Universitas Islam Indonesia* 1–12.
- Meek, G., dan S. Gray. 1988. The value added statement: An innovation for the US companies. *Accounting Horizons* 12 (2): 73–81.
- Miller, C., dan H. Whiting. 2008. Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and

- the hidden value. *Journal of Human Resource Costing & Accounting* 12 (1): 26–50.
- Pulic, A. 2000. VAIC™ – an accounting tool for intellectual capital management. *International Journal Technology Management* 20 (5): 149–55.
- Putra, I. 2012. Pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan perbankan yang go public di bursa efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanikal (JINAH)* 2 (2): 1–22.
- Randa, F., dan S. Solon. 2012. Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi* 10 (1): 24–27.
- Sawarjuwono, T., dan A. Kadir. 2003. Intellectual capital: Perlakuan, pengukuran dan pelaporan (sebuah library research). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5 (1): 31–51.
- Schroeder, R., M. Clark, dan J. Cathey. 2014. *Financial accounting theory and analysis (10th Ed.)*. John Willey & Sons.
- Shiu, H. 2006. The application of the value added intellectual coefficient to measure corporate performance: Evidence from Tech-Nological Firms. *International Journal of Management* 23 (2): 356–65.
- Singh, I., dan J. Zahn. 2008. Determinants of intellectual capital disclosure in prospectuses of initial public offerings. *Journal of Accounting and Business Research* 38 (5): 409–31.
- Sujoko., dan U. Soebiantoro. 2007. Pengaruh struktur kepemilikan saham, leverage, faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 9 (1): 41–48.
- Ulum, I., A. Chariri, dan I. Ghozali. 2008. Intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan: Suatu analisis dengan pendekatan Partial Least Squares. Universitas Diponegoro.
- Vergauwen, P., L. Bollen, dan E. Oirbans. 2007. Intellectual capital disclosure and intangible value drivers: An empirical study. *Journal of Management Decision* 45 (7).
- Widarjo, W. 2011. Pengaruh modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual pada nilai perusahaan yang melakukan initial public offering. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 8 (2): 157–70.
- Wolfe, J. 2003. The Tobin Q as a company performance indicator. *Developments in Business Simulation and Experiential Learning* 30: 155–59.

Melihat jauh ke dalam: Dampak kecerdasan spiritual terhadap niat melakukan kecurangan

Dekar Urumsah¹, Aditya Pandu Wicaksono², Adhetra Januar Putra Pratama³

^{1,2,3} Universitas Islam Indonesia

e-mail: dekar.urumsah@uui.ac.id

ARTIKEL INFO

Article history:
Available online 1 June 2016

Keywords:
fraud, theory of planned behavior, spiritual intelligence, morality leadership, organization culture

ABSTRACT

Fraud is being a salient issue because of its huge amount of loss. Fraud offenders have no doubt to commit fraud despite they sacrifice their moral, ethics, and spirituality. The purpose of this research is to investigate the influence of spiritual intelligence in intention to commit fraud and also its influence to moral of leader and organization culture. This research uses quantitative approach by distributing a questionnaire to the respondent and examined by statistic tool smart PLS 3. Research respondents are 52 finance department staff of private company in Yogyakarta, Indonesia. The finding explains person's spiritual intelligence is not fraud prevention. Other findings explain spiritual intelligence is able to emerge a good organization culture and moral of leader. The good organization culture will prevent fraud, but the good moral of a leader is not. This research recommends the organization to increase promoting moral and ethics in the organization through relevant programs that enhance those to its members.

ABSTRAK

Kecurangan sedang menjadi isu yang menonjol karena dampak kerugian yang luar biasa. Para pelaku kecurangan tanpa ragu untuk melakukannya dengan mengorbankan moral dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan spiritual dalam niat melakukan kecurangan dan pengaruhnya terhadap moral pemimpin dan budaya organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner ke responden dan diolah dengan alat statistik smart PLS 3. Responden penelitian ini adalah 52 karyawan departemen keuangan perusahaan swasta di Yogyakarta. Temuan penelitian ini adalah kecerdasan spiritual individu bukan merupakan pencegah kecurangan. Temuan lain adalah kecerdasan spiritual mampu untuk mewujudkan budaya organisasi dan moral pemimpin yang baik. Budaya organisasi yang baik mencegah kecurangan di organisasi, tetapi moral pemimpin yang baik tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini merekomendasikan organisasi untuk meningkatkan program-program yang meningkatkan moral dan etika.

Pendahuluan

Kasus kecurangan (*fraud*) di Indonesia sudah menjadi topik yang hangat dibicarakan di media massa seperti tidak ada akhir. Kecurangan sudah menjadi virus yang menular dan berkembang biak di berbagai sektor baik sektor publik maupun swasta. Untuk mencegah penyebaran korupsi, Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun demikian, kasus korupsi tidak serta merta hilang dari Indonesia setelah dibentuk KPK. Menurut *Indonesia Corruption Watch*, pada tahun 2015 Indonesia mengalami kerugian hingga Rp. 3.107 triliun (Republika 2015). Kecurangan memiliki berbagai bentuk dan dapat dilakukan oleh siapa saja (Prabowo 2014). Segitiga kecurangan (*fraud triangle*) (Cressey 1953) memberikan tiga alasan mengapa individu melakukan kecurangan. Alasan tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Terlepas dari tiga alasan tersebut, jika melihat jauh ke dalam apakah ada masalah dengan spiritual atau keimanan para pelaku korupsi sehingga kecurangan dilakukan. Dalam berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia, para pelaku korupsi dianggap sebagai seseorang yang memiliki kecerdasan dan keimanan yang tinggi karena sebagai seorang panutan yang seolah-olah akan jauh dari korupsi. Akan tetapi, anggapan itu seperti terbantahkan setelah banyak kasus para pejabat tinggi Indonesia menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Dari

kasus tersebut memunculkan anggapan bahwa individu yang memiliki kecerdasan spiritual tidak menjamin untuk menjauhi korupsi. Kecerdasan spiritual dari individu saat ini hanya menjadi *cover* untuk mendapatkan simpati publik. Dampak dari itu, spiritualitas atau keimanan yang dimiliki oleh individu akan luntur jika dihadapkan dengan penyimpangan yang menyebabkan kerugian. Permasalahan etika seperti ini biasanya sangat sulit diinvestigasi untuk mengetahui penyebabnya (Gbadamosi dan Joubert 2005).

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan kecurangan. Penelitian-penelitian sebelumnya menguji faktor-faktor yang mendorong kecurangan dalam aspek finansial (Gbadamosi dan Joubert 2005; Tang, Chen, dan Sutarso 2008). Saat ini penelitian sudah berkembang dengan melihat ke luar aspek finansial, yaitu dengan memasukan aspek organisasi seperti budaya kerja dan lingkungan kerja dalam mempengaruhi tindak kecurangan (Sardžoska dan Tang 2012; Wicaksono dan Urumsah 2016). Namun belum banyak penelitian yang jauh mendalam untuk menguji faktor spiritual atau keimanan dari individu dalam mempengaruhi individu sendiri dan organisasi dalam kaitannya dengan kecurangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari kecerdasan spiritual individu dalam melakukan kecurangan. Kecerdasan spiritual juga akan diuji dalam mempengaruhi dalam pembentukan moral kepemimpinan dan budaya organisasi. Penelitian ini hanya menguji hingga niat dalam melakukan kecurangan tetapi tidak mencapai perilaku nyata dalam kecurangan (*actual fraud behavior*).

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori yang menjelaskan faktor-faktor individu dalam berperilaku (Ajzen 1991). TPB telah banyak digunakan sebagai teori dasar dalam membentuk penelitian perilaku etis maupun tidak etis. TPB memberikan suatu gambaran bahwa sebelum individu berperilaku terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga memunculkan niat (*intention*) dan akhirnya menjadi perilaku (*behavior*). Individu terdorong untuk melakukan perilaku berdasarkan tiga faktor utama. *Attitude toward behavior* menjelaskan derajat individu memiliki rasa suka atau tidak suka atau menilai perilaku tersebut. *Subjective norm* merefleksikan bentuk pengaruh dari orang lain atau orang yang menjadi referensinya dalam memunculkan perilaku. *Perceived behavioral control* (PBC) merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan individu dalam berperilaku yang merupakan refleksi dari pengalaman masa lalunya.

Variabel dalam TPB memiliki makna yang luas sehingga dapat dikembangkan untuk menjelaskan secara detail faktor-faktor dalam berperilaku. Dalam konteks perilaku kecurangan, berbagai penelitian telah mengadopsi dan memodifikasi model TPB sebagai teori dasar dalam mengetahui faktor kecurangan. Modifikasi model TPB dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail variabel dalam TPB dengan menggantinya ke variabel lain tanpa mengubah substansi dari variabel TPB tersebut (Sardžoska dan Tang 2009; Sardžoska dan Tang 2012; Wicaksono dan Urumsah 2016).

Penelitian ini menggunakan salah satu variabel dalam TPB yaitu PBC sebagai dasar dalam membentuk model penelitian. PBC merupakan persepsi bahwa individu sebelum menampilkan sebuah perilaku terlebih dulu mengukur kemudahan, kesulitan, atau penghalangnya. PBC dalam penelitian ini dimodifikasi menjadi kecerdasan spiritual yang bertujuan untuk menguji hubungan kecerdasan spiritual dengan kecurangan. Selain itu, penelitian ini terbatas untuk menguji niat dalam melakukan kecurangan tanpa mengujinya hingga perilaku kecurangan yang nyata seperti apa yang ada dalam model TPB.

Kecurangan (Fraud)

Fraud merupakan sebuah aktivitas yang terjadi di dalam suatu lingkungan sosial dan mempunyai konsekuensi yang berat pada ekonomi, perusahaan, dan individu. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam 3 skema yang disebut *fraud tree* yaitu korupsi, penyalahgunaan asset, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Menurut laporan dari ACFE (2016), *living beyond means* merupakan gejala terbesar dalam kecurangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kecurangan memiliki gaya hidup yang lebih tinggi dari pendapatan atau gaji yang diterima. Puas atau tidak puas terhadap gaji memiliki pengaruh dalam kecurangan. Menurut Tang dan Chiu (2003) individu yang memiliki kepuasan terhadap gajinya cenderung untuk tidak melakukan kecurangan.

Segitiga kecurangan (*fraud triangle*) merupakan contoh model yang mendorong individu melakukan kecurangan (Cressey 1953). Model tersebut menggambarkan tiga faktor utama dalam kecurangan yaitu motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam istilah "motivasi", terdapat "*non-shareable problem*" yang berarti situasi dimana masalah dari individu tidak dapat diinformasikan ke orang lain. Hal ini membuat motivasi yang kuat

untuk melakukan kecurangan. Setelah memiliki motivasi dan tersedianya kesempatan, kecurangan dapat dijadikan penyelesaian masalahnya (Prabowo 2014). Kesempatan yang muncul dihubungkan dengan kelemahan sistem pengendalian di organisasi tersebut dengan peluang untuk diketahui yang rendah. Kesempatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tanpa terdeteksi (Wolfe dan Hermanson 2004). Kecurangan dilengkapi dengan rasionalisasi untuk membenarkan perilakunya tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Opini rasionalisasi memiliki berbagai jenis seperti “saya berhak mendapatkannya”, “manajemen tidak peduli dengan saya”, “tidak ada orang yang tersakiti”, “ini untuk membantu perusahaan” (Prabowo 2014).

Kecerdasan Spiritualitas dan Niat Kecurangan

Spiritualitas dan keimanan memiliki arti yang berdampingan. Spiritualitas adalah pencarian pribadi untuk memahami pertanyaan utama tentang kehidupan, tentang makna, dan tentang hubungan kesakralan yang mungkin atau tidak mungkin membentuk pengembangan ritual keagamaan dan pengembangan komunitas. Sedangkan keimanan adalah sistem yang terorganisir dari kepercayaan, praktek, ritual, dan simbol yang dirancang untuk mendekatkan dengan transenden (Tuhan, kekuatan yang lebih tinggi) dan mendorong pemahaman hubungan dengan orang lain dalam sebuah komunitas (Koenig, McCullough, dan Larson 2000).

Perilaku dari individu dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah spiritualitas dan keimanan. Nilai-nilai spiritualitas dan keimanan dari suatu kepercayaan tentu akan mempengaruhi cara individu berpikir dan berperilaku termasuk sikap dan hubungan dengan orang lain (Hage dan Posner 2015). Oleh karena itu, keimanan akan memandu perilaku dan meningkatkan identitas individu dengan religiusnya tersebut (Weaver dan Stansbury 2014). Spiritualitas dan keimanan telah dikonseptualisasikan untuk membangun aspek lain dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual dan keimanan akan menampilkan perilaku yang sesuai dengan keyakinannya dan direfleksikan di dalam masyarakat. Hal ini telah terbukti bahwa pengaruh dari spiritualitas dan keimanan yang memadai akan berdampak pada perilaku yang positif (Ntalianis dan Darr 2005). Perilaku positif berarti individu akan lebih menampilkan perilaku yang mempertahankan etika dari pada menampilkan perilaku yang merusak etika seperti kecurangan. Penelitian dari Wicaksono dan Urumsah (2016) telah membuktikan bahwa individu yang memiliki keimanan yang baik cenderung untuk menjauhi kecurangan. Mengedepankan keimanan dan spiritualitas sangat penting untuk mengendalikan perilaku ke dalam perilaku yang beretika (Yilmaz dan Bahçekapili 2015)

H₁: Kecerdasan spiritual berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan

Kecerdasan Spiritual dan Budaya Organisasi

Spiritualitas menjadi pondasi dasar dalam menentukan etika individu maupun kelompok. Penelitian yang berkaitan dengan spiritualitas menjadi penting karena berpotensi besar menjadikan individu, organisasi, dan masyarakat yang beretika (Sheep 2006). Spiritualitas yang tinggi secara positif akan membentuk individu yang beretika. Dampak dari itu, individu akan menampilkan perilaku etis dimana saja, baik di masyarakat maupun di organisasi (Ntalianis dan Darr 2005). Perilaku etis yang ditampilkan secara konsisten oleh individu dalam organisasi akan memberikan gejala dinamis dalam organisasi untuk menjadi sebuah budaya dalam organisasi. Menurut Weaver dan Stansbury (2014), organisasi menjadi religius ketika anggotanya membawa komitmen religius dan prakteknya ke organisasi secara konsisten. Sesuai dengan Schein (2004) yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai gejala dinamis di organisasi secara terus menerus ditampilkan oleh individu yang merupakan hasil interaksi individu dengan individu lainnya.

Pengertian dari Schein (2004) tersebut menunjukkan hubungan bahwa budaya organisasi akan terbentuk oleh perilaku-perilaku dari individu yang ada organisasi. Etika individu dalam organisasi menjadi kunci karena akan menentukan seperti apa bentuk budaya berperilaku dalam organisasi tersebut. Literatur menunjukkan bahwa budaya organisasi yang berspiritualitas merupakan hasil refleksi dari spiritualitas individu sehingga terdapat transenden di organisasi (de Klerk 2005).

H₂: Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap budaya organisasi

Kecerdasan Spiritual dan Moral Pemimpin

Pekerti dan Sendjaya (2010) menyimpulkan bahwa kecerdasan spiritual membentuk personal, karakter dan perilaku yang bermoral. Kecerdasan spiritual harus dimiliki oleh setiap individu termasuk pemimpin. Pemimpin merupakan individu yang mempunyai pengaruh kuat dalam organisasi untuk membentuk performa dari orang-orang yang dipimpinnya (Hage dan Posner 2015). Dalam TPB, pemimpin merupakan *subjective norm* (Ajzen

1991) yang artinya menjadi referensi bagi orang lain dalam hal ini adalah bawahannya. Spiritualitas harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk membawa bawahannya ke arah yang tepat. Spiritualitas yang dimiliki oleh pemimpin akan memunculkan *ethical leadership*. *Ethical leadership* adalah penampilan dari perilaku yang tepat dengan norma melalui penampilan personal dan hubungan interpersonal, promosi perilaku tersebut kepada bawahannya melalui berkomunikasi dan pengambilan keputusan (Brown, Trevino, dan Harrison 2005).

Hage dan Posner (2015) menemukan bahwa kecerdasan spiritual merupakan instrumen penting untuk membentuk pemimpin yang bermoral. Dengan kekuatan yang dimiliki, pemimpin akan membawa organisasi dan anggota organisasi ke jalur etis dengan mempromosikan perilaku-perilaku etis dan menghindari kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif dengan signifikan terhadap kepemimpinan (Supriyanto dan Troena 2012). Hal ini bermakna bahwa semakin meningkat tingkat kecerdasan spiritual, maka kepemimpinan akan semakin baik. Seseorang pemimpin seharusnya mempunyai tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi, sehingga memahami bahwa kemampuan memimpin yang ia miliki adalah pemberian Tuhan.

H₃: Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap moral pemimpin

Budaya Organisasi dan Niat Melakukan Kecurangan

Konteks organisasi memiliki pengaruh yang penting pada perilaku anggotanya. Budaya organisasi dapat memainkan sebuah peran penting dalam pengembangan moral yang dapat membentuk karakter dari anggota organisasi. Individu cenderung akan melihat fenomena yang ada di organisasi untuk berperilaku etis maupun tidak etis. Mayer, Kuenzi, dan Greenbaum (2011) menyebutkan organisasi yang etis diperlukan untuk membantu anggota memahami jenis perilaku yang etis dan tidak etis. Jika organisasi memiliki budaya etis yang tinggi, anggota akan tertekan untuk tidak menampilkan perilaku tidak etis. Menurut Weaver dan Stansbury (2014) suatu budaya organisasi harus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh skema religius yang akan dibawa anggota ke organisasi. Terdapat hubungan timbal balik antara individu dan organisasi dengan dipengaruhi oleh keagamaan. Organisasi akan menjadikan perilaku etis dari individu jika organisasi tersebut berdasarkan agama atau religius. Sedangkan individu yang religius akan membentuk suatu organisasi yang religius pula (Weaver dan Stansbury 2014).

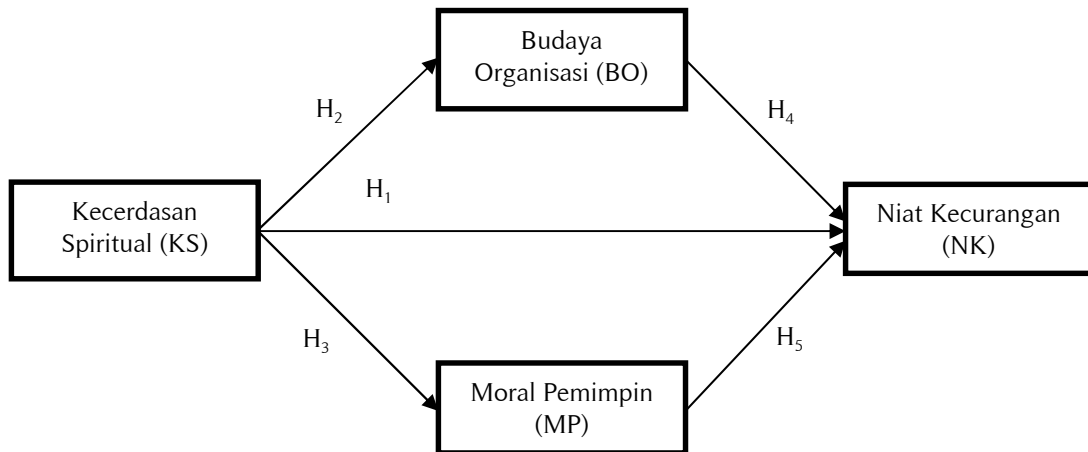
Penekanan spiritualitas dan keimanan menjadi penting karena hal tersebut memberikan petunjuk dan arahan kepada individu untuk menampilkan perilaku yang etis. Oleh karena itu, pembentukan suatu budaya diawali dengan membentuk perilaku dari anggota karena budaya organisasi yang merupakan cerminan perilaku individu di organisasi. Budaya organisasi merupakan hasil dari perilaku yang berulang-ulang dilakukan secara konsisten oleh anggotanya (Schein 2004). Jika perilaku anggota organisasi secara konsisten menampilkan perilaku etis maka akan menjadi budaya baik dan juga sebaliknya. Sehingga, budaya organisasi yang baik akan memaksa anggota untuk menjauhi perilaku kecurangan (Mayer, Kuenzi, dan Greenbaum 2011). Hasil ini sesuai dengan penelitian Wicaksono dan Urumsah (2016) yang mendukung bahwa budaya organisasi akan mencegah perilaku kecurangan di organisasi.

H₄: Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan

Moral Pemimpin dan Niat Melakukan Kecurangan

Seperti yang dijelaskan dalam TPB (Ajzen 1991) bahwa pemimpin merupakan bentuk *subjective norm* yang memberikan pengaruh bawahannya dalam menampilkan perilaku. Perilaku bawahan merupakan refleksi dari perilaku pemimpinnya. Bawahan akan cenderung untuk mengimitasi perilaku dari pemimpinnya. Jika pemimpin mempromosikan perilaku yang baik maka bawahan akan meniru, begitu juga sebaliknya (Mayer, Kuenzi, dan Greenbaum 2011; Wicaksono dan Urumsah 2016). Diperlukan moral yang baik dari pemimpin untuk membentuk perilaku yang etis dalam diri bawahan. Konsep pemimpin yang bermoral dikonseptualisasikan oleh Brown, Trevino, dan Harrison (2005) ke dalam 2 aspek yaitu *moral person* dan *moral manager*. *Moral person* merupakan bentuk integritas, keadilan, dan kejujuran, sedangkan *moral manager* merupakan bentuk komunikasi, membangun standar etika, dan agen dari perilaku etis. Penelitian secara empiris telah membuktikan bahwa pengaruh dari pemimpin yang etis akan mencegah kecurangan (Mayer, Kuenzi, dan Greenbaum 2011). Pemimpin merupakan agen dari perilaku yang merupakan referensi atau panutan dari bawahannya dalam berperilaku.

H₅: Moral pemimpin berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan



Gambar 1. Model Penelitian

Metoda Penelitian

Metode dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Survei digunakan dalam rangka mengumpulkan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner ke responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 52 karyawan departemen keuangan dari perusahaan swasta di Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana responden dipilih apabila telah memenuhi kriteria menjadi responden (Berenson, Levine, dan Krehbiel 2012) yaitu karyawan bagian keuangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan bantuan alat statistik smartPLS 3.

Pengukuran dan Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan interval 1 sampai 6. Skala 1 sampai 3 menggambarkan sangat tidak setuju hingga agak tidak setuju dalam sebuah pernyataan. Sedangkan skala 4 sampai 6 menggambarkan agak setuju hingga setuju sekali pada sebuah pernyataan. Tabel 1 menyajikan definisi operasional dan pengukuran untuk masing-masing variabel.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Referensi
Kecerdasan spiritual	Kepercayaan dan keimanan dalam hubungan individu terhadap Tuhan.	6 item	Pawar (2009); Supriyanto dan Troena (2012)
Budaya organisasi	Bagaimana organisasi memiliki aturan atau kebiasaan dalam mengendalikan perilaku anggotanya.	6 item	Kaptein (2008)
Moral pemimpin	Peran pemimpin dalam berperilaku dan pengaruhnya terhadap bawahannya.	6 item	Kaptein (2008)
Niat Kecurangan	Niat untuk melakukan perilaku kecurangan	6 item	Robinson dan Bennett (1995)

Model Pengukuran

Dalam model ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data. Pengujian validitas menggunakan *convergent* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* mengevaluasi item dari variabel adalah benar-benar berhubungan dengan variabelnya. Memenuhi *convergent validity* apabila nilai *Average Variance Extracted* (AVE) setiap variabel melebihi 0,50 (Fornell dan Larcker 1981). Sedangkan *discriminant validity* mengevaluasi bahwa variabel berbeda dengan variabel lainnya. *Discriminant validity* terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari pada korelasinya dengan variabel lain. Nilai ini merupakan akar pangkat dua dari AVE. Pengujian reliabilitas menggunakan nilai dari *Composite Reliability* (CR) dimana nilai CR dari setiap variabel lebih dari 0,70 maka memenuhi pengujian reliabilitas (Fornell dan Larcker 1981).

Model Struktural

Model structural digunakan dalam rangka menganalisa hubungan antar variabel dalam model penelitian. Dalam model ini dilakukan pengujian kekuatan model (r^2) dan *path coefficient*, dan signifikansi. Pengujian r^2 menganalisa kekuatan model dalam menjelaskan variabel dependen yang diteliti. Sedangkan *path coefficient* (β) dan signifikansi (*p value*) merupakan pengujian hipotesa yang dibentuk dalam model. β dan *p-value* merupakan luaran dari *bootstrapping* di smartPLS.

Hasil dan Pembahasan

Demografi dan Pengujian Model Pengukuran

Dengan menyebarkan kuesioner ke karyawan departemen keuangan, diperoleh 52 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini. Kuesioner yang dapat diolah berasal dari 24 responden laki-laki dan 28 perempuan. Latar belakang pendidikan dari responden sebagian besar berasal dari karyawan berpendidikan S1 sebesar 36% dan D3 sebesar 33%. Jumlah responden yang sedikit karena penelitian ini meneliti area yang sangat sensitif dari individu sehingga minat untuk mengisi kuesioner rendah. Namun demikian, Roscoe (1975) menyatakan bahwa ukuran sampel lebih dari 30 sudah tepat untuk sebuah penelitian.

Pengujian model pengukuran dengan menggunakan smartPLS tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Nilai AVE, CR, dan Korelasi Antar Variabel

Variabel	AVE	CR	NK	KS	MP	BO
NK	0,646	0,876	0,803			
KS	0,639	0,897	-0,378	0,799		
MP	0,775	0,954	-0,190	0,301	0,880	
BO	0,741	0,920	-0,499	0,501	0,554	0,861

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,50 dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memenuhi pengujian *convergent validity*. Selain itu, nilai korelasi (angka yang di cetak tebal) variabel dengan variabel itu sendiri lebih besar daripada korelasinya dengan variabel lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memenuhi pengujian *discriminant validity*. Dalam uji reliabilitas, terlihat bahwa nilai CR dari seluruh variabel melebihi 0,70 yang dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memenuhi pengujian variabel.

Pengujian Model Struktural

Pengujian kekuatan model

Setelah pengujian menggunakan smartPLS, nilai r^2 adalah seperti yang tersaji dalam Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, nilai r^2 dari niat melakukan kecurangan adalah 0,238 atau 23,8%. Artinya model yang dibangun hanya mampu menjelaskan 23,8% dari niat melakukan kecurangan. Diperlukan variabel lain untuk menjelaskan lebih lanjut tentang niat melakukan kecurangan. Hasil lain menunjukkan kecerdasan spiritual menjelaskan 7,2% dari moral pemimpin, sedangkan kecerdasan spiritual menjelaskan 23,6% dari budaya organisasi.

Tabel 3. Nilai r^2

Variabel	Nilai r^2
NK	0,238
MP	0,072
BO	0,236

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan smartPLS tersaji dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Path	B	t-value	p-value	Kesimpulan
H ₁	KS->NK	-0,174	1,697	0,090	Tidak didukung
H ₂	KS->BO	0,501	5,410	0,000	Didukung
H ₃	KS->MP	0,301	2,705	0,007	Didukung
H ₄	BO->NK	-0,484	3,217	0,001	Didukung
H ₅	MP->NK	0,131	0,573	0,567	Tidak didukung

Signifikan *p-value* < 0,05

Berdasarkan hasil pengujian menemukan bahwa hipotesis yang menyatakan kecerdasan spiritual berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan tidak didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa individu yang memiliki spiritualitas dan keimanan yang tinggi tidak menutup kemungkinan memiliki niat melakukan kecurangan. Berlawanan hasil penelitian terdahulu dari Wicaksono dan Urumsah (2016) yang menemukan spiritualitas sebagai pencegah kecurangan.

Apa yang ditemukan dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena kecurangan yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah diberitakan di media masa pada umumnya bahwa pelaku kecurangan bukan individu yang kurang keimanan dan spiritualitasnya. Sebagai contoh dalam kasus beberapa pejabat tinggi di Indonesia yang terlibat kasus kecurangan yang dapat dikatakan sebagai individu dengan kecerdasan spiritualitas yang baik. Oleh karena itu individu yang memahami agama tidak menjadi penjamin untuk menjauhi kecurangan. Namun, pengujian hipotesis menemukan kecerdasan spiritualitas akan membentuk seorang pemimpin yang bermoral. Pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik akan menjadi pemimpin yang bermoral baik. Akan tetapi, hasil pengujian pada Tabel 4 menemukan bahwa pemimpin yang bermoral atau etis tidak menutup kemungkinan untuk memiliki niat melakukan kecurangan

Dari sini memunculkan anggapan bahwa spiritualitas dan keimanan bertolak belakang dengan perilakunya terhadap kecurangan. Walaupun kecerdasan spiritual akan membangun pemimpin yang bermoral, niat untuk melakukan kecurangan tidak hilang. Kecurangan memiliki daya tarik tersendiri yang sangat kuat kepada siapa saja. ACFE (2016) dalam laporannya telah mengidentifikasi berbagai alasan individu melakukan kecurangan. Seperti yang dikemukakan oleh Tang dan Chiu (2003) bahwa cinta uang adalah akar dari kecurangan. Kecerdasan spiritualitas dan keimanan yang dimiliki individu akan luntur jika dihadapkan dengan cinta uang yang pada akhirnya akan menimbulkan kecurangan. Berbagai kemungkinan alasan akan muncul salah satunya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah cara pelaku kecurangan untuk membenarkan perilakunya tersebut (Prabowo 2014). Rasionalisasi yang mungkin muncul bahwa dana itu adalah hak pelaku atau pelaku gunakan untuk kepentingan orang lain dan bukan merupakan kecurangan. Rasionalisasi seperti ini pernah muncul dalam berbagai kasus korupsi di Indonesia.

Sementara itu, kecerdasan spiritualitas yang dimiliki oleh individu akan mampu untuk membangun budaya organisasi yang baik. Individu yang memiliki kecerdasan spiritualitas akan membangun sebuah budaya yang baik untuk organisasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Schein (2004) bahwa budaya organisasi adalah sebuah kebiasaan yang berulang-ulang untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kecerdasan spiritual akan menentukan budaya organisasi yang akan membawa ke dalam bentuk budaya yang baik dan mengedepankan ke perilaku etis (Pawar 2009). Pengujian lebih lanjut menemukan bahwa budaya organisasi yang baik akan menjadi pencegah dalam niatan melakukan kecurangan. Sesuai dengan Martin dan Cullen (2006) bahwa organisasi yang terbiasa terhadap perilaku etis akan menghindari kecurangan oleh anggotanya.

Simpulan

Kecerdasan spiritual dan keimanan yang dimiliki individu pada hakikatnya akan mendorong individu untuk berperilaku yang etis. Yilmaz dan Bahçekapili (2015) menjelaskan jika Tuhan ada dipikirkannya maka individu akan mampu menilai perilaku apakah benar atau salah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya bahwa kecerdasan spiritualitas dan keimanan individu dan kecurangan bukan merupakan hal yang saling berhubungan. Ketika individu memiliki niat untuk melakukan kecurangan, spiritualitas dan keimanannya seolah-olah hilang dari dalam dirinya. Individu akan melakukan kecurangan tanpa mempertimbangkan spiritualitas dan keimanan yang dimilikinya.

Kecerdasan spiritual merupakan gejala positif untuk membentuk budaya organisasi dan moral pemimpin. Individu dengan spiritualitas yang baik akan mempromosikan perilaku etis di organisasi yang pada akhirnya akan menjadi budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi yang mengedepankan perilaku etis akan mencegah anggotanya untuk melakukan kecurangan. Sementara itu, kecerdasan spiritual juga akan membentuk pemimpin yang bermoral dan beretika. Pemimpin sebagai referensi dari bawahannya harus memberikan contoh-contoh perilaku yang beretika baik. Akan tetapi, seorang pemimpin yang bermoral belum tentu menjauhi perilaku kecurangan. Seorang pemimpin memiliki posisi yang strategis untuk mengelola organisasi dan mengambil sebuah keputusan yang dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bahwa kecerdasan spiritual merupakan hal yang penting untuk individu dan organisasi. Individu akan selalu berperilaku etis baik di masyarakat maupun organisasi. Dampaknya jika dilakukan berulang-ulang akan menjadi budaya organisasi yang positif. Selanjutnya akan menjadi sebuah budaya yang

secara otomatis akan mencegah kecurangan. Oleh karena itu, organisasi perlu untuk membuat program-program dalam rangka meningkatkan spiritualitas dan keimanan individu di organisasi. Program-program tersebut akan memecahkan masalah moral pemimpin yang masih cenderung memiliki niat melakukan kecurangan. Dengan meningkatkan aspek spiritualitas dan keimanan diharapkan peluang untuk kecurangan dapat diperkecil.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan hasil dari pengisian kuesioner oleh responden. Data yang terkumpul tidak cukup banyak karena sensitifitas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini. Penelitian ini hanya mencapai pada niat belum pada perilaku kecurangan yang nyata.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Model penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menjelaskan perilaku nyata kecurangan dengan responden para pelaku kecurangan. Dengan Teknik wawancara akan lebih banyak menangkap jawaban responden dengan lebih dalam daripada hanya menggunakan kuesioner.

Daftar Referensi

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational behavior and human decision processes* 50: 179–211.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2016. Report to the nations on occupational fraud and abuse.
- Berenson, M., D. Levine., dan T. Krehbiel. 2012. *Basic business statistics: Concepts and applications*. Edinburg Gate: Pearson Education.
- Brown, M., L. K. Trevino, dan D. Harrison. 2005. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 97 (2): 117–34.
- Cressey, D. R. 1953. *Other People's Money: A Study of the social psychology of embezzlement*. IL: Free Press.
- de Klerk, J. 2005. Spirituality, meaning in life, and work wellness: A research agenda. *The International Journal of Organizational Analysis* 13 (1): 64–88.
- Fornell, C., dan D. Larcker. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *American Marketing Association* 18 (1): 39–50.
- Gbadamosi, G., dan P. Joubert. 2005. Money ethic, moral conduct and work related attitudes: Field study from the public sector in Swaziland. *Journal of Management Development* 24 (8): 754–63.
- Hage, J., dan B. Posner. 2015. Religion, religiosity, and leadership practices: An examination in the Lebanese workplace. *Organizational Development Journal* 36 (4): 396–412.
- Kaptein, M. 2008. Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: The corporate ethical virtues model. *Journal of Organizational Behavior* 29 (7): 923–47.
- Koenig, H., M. McCullough., dan D. Larson. 2000. *Handbook of religion and health*. New York: Oxford University Press.
- Martin, K., dan J. Cullen. 2006. Continuities and extensions of ethical climate theory: A meta-analytic review. *Journal of Business Ethics* 69 (2): 175–94.
- Mayer, D., M. Kuenzi, dan R. L. Greenbaum. 2011. Examining the link between ethical leadership and employee misconduct. *Journal of Business Ethics* 95: 7–16.
- Ntalianis, F., dan W. Darr. 2005. The influence of religiosity and work status on psychological contracts. *The International Journal of Organizational Analysis* 13 (1): 89–102.
- Pawar, B. 2009. Some of the recent organizational behavior concepts as precursors to workplace spirituality. *Journal of Business Ethics* 88: 245–61.
- Pekerti, A., dan S. Sendjaya. 2010. Exploring servant leadership across cultures: Comparative study in Australia and Indonesia. *International Journal of Human Resource Management* 21 (5): 754–80.
- Prabowo, H. 2014. To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control* 17 (3): 306–26.

- Republika. 2015. Kerugian negara akibat korupsi menurun pada 2015. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o321yb383-kerugian-negara-akibat-korupsi-menurun-pada-2015> (diakses 15 Maret 2016).
- Robinson, S., dan R. Bennett. 1995. A typology of deviant workplace behaviors : A multidimensional scaling study. *The Academy of Management Journal* 38 (2): 555–72.
- Roscoe, J. 1975. *Fundamental research statistics for the behavioral sciences*. New York: Rinehart and Winston.
- Sardžoska, E., dan T. Tang. 2009. Testing a model of behavioral intentions in the Republic of Macedonia : Differences between the private and the public sectors. *Journal of Business Ethics* 87 (4): 495–517.
- Sardžoska, E., dan T. Tang. 2012. Work-related behavioral intentions in Macedonia: Coping strategies, work environment, love of money, job satisfaction, and demographic variables. *Journal of Business Ethics* 108 (3): 373–91.
- Schein, E. 2004. *Organization culture and leadership*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Sheep, M. 2006. Nurturing the whole person: The effects of workplace spirituality in a society of organizations. *Journal of Business Ethics* 66: 357–75.
- Supriyanto, A., dan E. Troena. 2012. Pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja dan kinerja manajer (Studi di bank syari'ah kota Malang). *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10 (4): 693–709.
- Tang, T., dan R. K. Chiu. 2003. Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: Is the love of money the root of evil for Hong Kong employees? *Journal of Business Ethics* 46 (1): 13–30.
- Tang, T., Y. Chen, dan T. Sutarso. 2008. Bad apples in bad (business) barrels: The love of money, machiavellianism, risk tolerance, and unethical behavior. *Management Decision* 46 (2): 243–63.
- Weaver, G., dan J. Stansbury. 2014. Religion in organization: Cognition and behavior. *Religion and Organization Theory* 41: 65–110.
- Wicaksono, A., dan D. Urumsah. 2016. Factor influencing employees to commit fraud in workplace: Empirical study in Indonesian hospitals. *Asia Pacific Fraud Journal* 1 (1): 1–18.
- Wolfe, D. T., dan D. R. Hermanson. 2004. The fraud diamond : Considering the four elements of fraud. *CPA Journal* 74 (12): 38–42.
- Yilmaz, O., dan H. Bahçekapili. 2015. Without God , Everything Is Permitted ? The reciprocal influence of religious and meta-ethical beliefs *Journal of Experimental Social Psychology* 58: 95–100.

Financial report and public accountability culture in Indonesia

Bambang Setiono¹, Dody Hapsoro²

¹ Sampoerna University Jakarta

e-mail: bambang.setiono@usbi.ac.id

² STIE YKPN Yogyakarta

e-mail: dodyhapsoro@gmail.com

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Article history:

Available online 1 June 2016

Keywords:

public accountability, financial report, financial institution

This study investigates the quality of public accountability in Indonesia as represented by financial reports practices using the legitimacy theory. We found public accountability practices in Indonesia is still at the pragmatic legitimacy. Financial statements and audits of these statements are developed only for the primary users of financial statements. They are not prepared for the benefit of general public. DPR and the government as the representation of the public have yet to develop governance culture of financial statements and audits to ensure that accountability practices in Indonesia present true or fair information that is expected by the public. People need information about how effective is the government on using of state funds to fulfill their promises in the election campaign as well as their obligation as stipulated in many laws governing operations of the government. Public also needs information about security and grow of their the wealth deposited in the financial sector as promised by banks and non-bank financial institutions.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji kualitas Akuntabilitas publik di Indonesia yang representasikan oleh praktik laporan keuangan menggunakan teori legitimasi. Kami menemukan praktik akuntabilitas publik di Indonesia masih di legitimasi pragmatis. Laporan keuangan dan audit laporan ini dikembangkan hanya untuk pengguna utama laporan keuangan. Mereka tidak disiapkan untuk kepentingan masyarakat umum, DPR dan pemerintah sebagai representasi dari masyarakat belum mengembangkan budaya tata kelola laporan keuangan dan audit untuk memastikan bahwa praktek akuntabilitas di Indonesia menyajikan informasi yang benar atau adil yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi tentang seberapa efektif pemerintah dalam menggunakan dana negara untuk memenuhi janji mereka dalam kampanye pemilu serta kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam banyak hukum yang mengatur operasi dari pemerintah. Masyarakat juga perlu informasi tentang keamanan dan tumbuh dari kekayaan mereka disimpan di sektor keuangan seperti yang dijanjikan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank.

Introduction

Supposedly the demands for public accountability information on the use of public funds and public wealth in Indonesia is high. As the third largest democracy in the world, a culture of public accountability should be well understood by government leaders, leaders of organizations and business leaders because the democratic practice has been going on for some time in Indonesia. Each public leader will be held accountable for the use of public funds and/or public property to fulfill their promises and obligations to the public. Whether they are members of the parliament, the president, governors, or regents/mayors, they have to be accountable the people who vote for them. Government regulations were issued to ensure the public accountability for the use of public funds and public property. Government leaders have incentives to encourage the emergence of a culture of public accountability since they have a great opportunity to be re-elected when public perceived them as accountable public officers.

In practice, however, the culture of public accountability as expected above has yet to come in Indonesia. Indonesia is still known as a country that has a high level of corruption in the public sector (Cochrane 2013). Members of the Indonesian Parliament (DPR) are not being seen as promoting a culture of public accountability (Sherlock 2007). This is amplified by the abolition of the State Agency for Financial Accountability (BAKN) from

the organization structure of the Parliament in July 2014 by the revision of the Law on the People's Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and House of Representatives (DPRD), known as the MD3 Law. Despite, BAKN was considered as an ideal Public Accounts Committee (PAC) to carry out its mission in order to improve public accountability of government agencies (Setiono and Prasetyo 2015).

In countries that have implemented a longer democratic system, such as Australia, the culture of public accountability has been formed and continue to be improved. In this country, campaign promises of major political parties must be valued in and estimated in the government budget by the government treasury. The Australian government issued guidelines for calculating the cost of campaign promises called the Charter of Budget Honesty (Commonwealth of Australia 2016). The results of calculation of the cost of the campaign promise affecting both government taxes revenues and government expenditures must be published to the public via the website so that the public can assess the implication of the promises to the government financial health.

This study explores the public accountability practices in Indonesia both at the public sector (the government) and the public corporations. This study used documents and news analysis method to answer the question on how public accountability are practices in Indonesia. Public accountability is important concept in a democratic system as well as in a well- developed capital markets. It is an obligation of public organization leader to answer to the public for public resources given to them (Boven 2005; A. Gray and Jenkins 1993). Public accountability is a dynamic social relationship through which civil society seeks to control and challenge the state (Smith 2007). However, it is elusive concept to apply it in developing countries (Belal, Cooper, and Khan 2015). Using qualitative method will give opportunity to better understand of challenges in implementing public accountability in developing countries (Creswell 2014).

Paper is organized with the following structure. After the first part of the introduction, the second section describes the theory behind the practice of public accountability undertaken by an organization and public accountability expected by society as represented by the products of law makers in the Parliament. The third section contains the analysis of public accountability that has been developed and practiced in Indonesia. The fourth part is the conclusion.

Literature Review

Public Accountability and Legitimacy Organization

Besides fulfilling legal obligations, a leader of public organizations also need legitimacy from communities. Public approval on the performance of public organizations would give legitimacy to the existence of an organization and to continue growing. Suchman (1995) divides the three levels of legitimacy that can be obtained from communities. *First*, pragmatic legitimacy, i.e. organizations only seek legitimacy of stakeholders that directly affect the organization's existence. This is an organization self-interest to get legitimacy from direct stakeholders. *Second*, the moral legitimacy, which is a legitimacy obtained due to normative assessment since the organization has done something right based on the values held by stakeholders. There are three ways of evaluating moral legitimacy, from outputs and consequences (sometimes difficult to measure), from the techniques and procedures that is conform with the moral values of society, and from categories and structures of the organizations. Sometimes, moral legitimacy is also evaluated by the personality of the leader of the organization. *Third*, the cognitive legitimacy (mental processes), which has recognized the legitimacy of an organization in the mental process of stakeholders. There is no self-interest motive or evaluation from stakeholders for legitimacy of an organization. Cognitive legitimacy is gained through the process of comprehensiveness and taken for grantedness. If the comprehensiveness of the organization does not happen, then the public will have a social and economic crisis. Similarly, if the taken-for-granted does not occur in the organization, the acceptance of the legitimacy of the public is not going to happen because the legitimacy born from the values that are believed by the public.

Financial accounting information as presented in annual reports has been used by organizations to legitimize their existences and roles to the society (see, for example, Campbell, Moore, and Shrivs 2006; Campbell 2000; De Villiers and Van Staden 2006; Deegan 2002; R. Gray, Kouhy, and Lavers 1995; Neu, Warsame, and Pedwell 1998). Financial accounting information is the main form of public accountability in public financial management and public wealth (see, for example Peecher, Solomon, and Trotman 2013; Thinggaard 2008; Carnegie and West 2005; Burchell et al. 1980; Kemp 1963). Honest and true financial statements are a form of accountability of an organization's leaders expected by the public. To achieve the goal of public accountability, the various regulations and standards have been developed by the government and various professional organizations to ensure that the public interest is completely protected.

The public has an interest in finance and wealth managed by an organization as they become investors or creditors, saving deposits, paying insurance premiums, or pay taxes and other government levies to the organi-

zations. In general, public interests can be divided into two major groups, namely public interests in the public sector (state finance) and public interests in the public financial sector such as those organizations engaged in capital markets, banking, insurance and pension funds.

Development of public accountability generally focused on the following three paths: 1) accounting to determine the performance of public finance and wealth management as presented in financial statements of organizations; 2) governance to produce a true and fair financial statements; and 3) independency and quality auditors who provide assurance on the organization's financial statements. Economic system adopted by a country will determine the matters set forth in the foregoing. In a capitalist system, proprietary funds and public property is dominated by individuals who managed to control the sources of economic wealth. Individuals having significant wealth in the economy become investors and creditors of companies. As a result, the rules and standards of presentation of financial statements that are developed in the world are more geared to the interests of investors and creditors. Given the accounting standards, governance and audit of those standards will also be directed to meet the needs of investors and creditors. While on the other hand, the interests of the general public who have deposits in banks, which pay insurance premiums on the insurance company, or who pay taxes to the government received less attention than it deserves.

Expected Public Accountability

This section will discuss about public accountability expected by society, both represented by the legislature (Parliament) through legislation, represented by the People's Consultative Assembly (MPR) through its provisions, as well as public opinion related to public finance and wealth management. Discussion is grouped into three factors that most affect the quality of the organization's financial statements.

Financial Accounting Standards for Public Performance Measure

State finance

The community hopes the government can fulfill its promise when they elected and the public also expect that they can feel the presence of the government in serving the community. The whole promise of the government can be measured by money. Promises can be spelled out in detail in the form of programs or activities that can then be arranged in the form of the government budget. Implementation of the program or activity can be recorded, set the value, and then summarized in a financial statement which will be communicated to the public. The financial statements are the elaboration government promises to the public. Society hopes promises are implemented effectively and efficiently, and they expect the public finance and wealth continue growing.

Members of the Parliament, *Dewan Perwakilan Rakyat* (DPR), and the government agreed that state finances¹ should be managed in an orderly manner, abide by laws and regulations, effective, efficient, economical, transparent, and accountable paying attention to the sense of justice and propriety (Article 3 of Law No. 17 of 2007). President as the head of government holds sway public finance management to achieve the purpose of the state by determining national and regional budgets every year. The central government prepares The First Semester Budget Realization Report and prognosis for next 6 (six) months to be submitted to DPR. The same process also performs by local governments to the local parliaments, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (DPRD). President submits the Central Government Financial Statement (LKPP) to DPR after being audited by the Supreme Audit Agency (BPK) not later than six (6) months after the fiscal year ends. LKPP consists of Budget Realization Report, Balance Sheet, Cash Flow Statement, and Notes to the Financial Statements, compliment with the financial statements of state-owned enterprises and other entities. Governor/regent/mayor has to do something similar to the Parliament. They make a Local Government Finance Report (LKPD) and submit to DPRD. The form and content of government financial statements are prepared and presented in accordance with governmental accounting standards determined by an independent standard committee.

Unfortunately, accounting standards for reporting performance of the state financial management as set out in the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) are essentially similar to those for reporting financial performances of the private sectors as guided by the Statement of Financial Accounting Standard or *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK). PSAK is the accounting standards for the private sector that is governed by profit motive. Government organizations are not managed for searching for the maximum profit.

¹ The State finance includes the right to tax, the circulation of money, loan, obligation to perform the state government public services, paying the third party invoices, revenues and expenditures of the state, local revenues and expenditures, state assets/local government assets managed by government agencies or third parties in the form of money, securities, accounts receivable, goods, and other rights that can be valued in money, including those assets separated in the state/regional companies, the wealth of others controlled by the government in respect of the duty of government and/or for the public interest, and the wealth of third party obtained by using the facilities provided by the government (Article 2 of Law No. 17 of 2003).

They are set up serve public and improve public welfare. Government agencies should be governed by efficiency and effectiveness motives. LKPP prepared based on PSAP should be developed by considering the budget as public policy, government investment, and information needed by users of government financial statements. PSAP and LKPP were developed to provide information to the public in general. LKPP designed not only for the information needs of the communities. Nevertheless, LKPP should give information on the elements required by the provisions of law (statutory reports) and meet the information needs of the taxpayers because the tax is a major source of government revenue.²

Government financial reports should provide information that is useful for users in assessing accountability and make a good decision-making of economic, social, and political. Therefore, the government's financial statements should provide information about the source, the allocation and use of financial resources, revenues and the amount of economic resources used and the results that have been achieved. The financial statements of the government should be relevant, reliable, comparable, and can be understood by users. The financial statements should present the complete information required by the user. Information needed by users of financial statements can be placed on the cover sheet of financial statements or notes to the financial statements, known as full disclosure. Therefore, the government's financial statements are designed for all segments of society, and then the report should be understood by the whole community. However, users of government financial statements is assumed to have sufficient knowledge on the activities and the reporting entity's operating environment and have a willingness to study the information in the financial statements.³

Public expectations on the PSAP and LKPP is in line with the expectations of the Chairman of the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) on the relationship between the government's financial statements with the welfare of society. Harry Azhar Azis (BPK Chairman) questioned the relationship between the auditor's opinions on the financial statements of local governments with the conditions of poverty in the area. Why is an area that is already ten years obtaining an unqualified opinion (WTP) but still having no improvement in reducing poverty in the area.⁴

Unfortunately DPR and DPRD never ask the government to submit reports on their operational performance in using and managing state finances entrusted to the government other than financial statements. There are no laws on government performance reports. However, the government based on Government Regulation (PP) No. 8 of 2006 stipulates that ministers/leaders of institutions as budget users shall prepare a report summarizing the performance of the output of each of the activities and results achieved by each program set out in the State Budget/Budget. The form and content of the performance reports are tailored to the form and content of the work plan and budget and not necessarily consistent with the content of the financial statements of the minister/head of the institution. Since, they are not requested by Parliament, ministers/leaders of institutions only submit operational performance reports to the Minister of Finance, Minister of National Planning, and Minister of State for Administrative Reform no later than 2 (two) months after the fiscal year ends.

Public finance

DPR and the government has established the Financial Services Authority or *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) to regulate and supervise the financial services sector in order to achieve three things: (1) providing financial services on a regular basis, fair, transparent, and accountable; (2) the establishment of a sustainable and stable growing financial system; and (3) protection of the public interest. DPR and the government expect the OJK to become an independent institution and free from interference by other parties since it has a great power to regulate and supervise financial services in banking, capital markets, insurance, pension funds, non-bank financial institutions, and other financial institutions to protect consumers and society. To finance its operations, OJK impose a levy to the parties who perform activities in the financial services sector. OJK receives, manages, and administers these charges and should manage the funds accountably and independently. However, if the fee received in the current year exceeds the OJK requirements for the next fiscal year, the excess shall be deposited into the state treasury.

OJK informed the Deposit Insurance Agency (LPS) of the troubled banks that are in the restructuring efforts by the OJK. In supervising banking activities, the OJK requested by Parliament and the government to coordinate with Bank Indonesia (BI). This supervising activities include determining the banking institutions that fall into the category of systematically important banks. BI can check the bank after first notify his intention to the OJK. But regulators can not give an assessment of the health of the bank. If the OJK indicates that a particular bank is experiencing liquidity problems and/or health conditions are deteriorating, the OJK will immediately inform the Bank Indonesia to take steps in accordance with the authority of Bank Indonesia.

² Government Accounting conceptual framework, Appendix I.01 PP 71 in 2010.

³ Ibid

⁴ WTP 10 Tahun, Rakyat Tambah Miskin, Tak Ada Gunanya BPK, Republika, 16 October, 2014, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan> (accessed 19 October 2014).

DPR and the government have established a Financial Stability Coordination Forum, *Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan* (FKSSK) to maintain the stability of the financial system. FKSSK consists of the Minister of Finance (coordinator), Governor of Bank Indonesia, Chairman of the Board of Commissioners of the OJK, and Chairman of the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Agency (LPS). FKSSK task is to conduct monitoring and evaluation of the stability of the financial system and make recommendations to each member to perform the actions and/or policies in order to maintain the stability of the financial system. If the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia, Chairman of the Board of Commissioners of the OJK, and/or Chairman of the Board of Commissioners of LPS indicate a potential crisis or have a crisis in the financial system, then each can ask FKSSK to immediately decide preventive measures or crisis management. FKSSK policies related to state finances should be submitted for approval by DPR.

DPR requires OJK accountability through submission of financial statements and periodic reports out such activities as a form of accountability to the public. However, DPR gave authority to the Board of Commissioners of the OJK to set standards and accounting policies in the preparation of financial statements as well as the shape and content of the OJK activities report. OJK's annual financial statements are audited by BPK-RI or public accounting firm appointed by the BPK-RI. As a form of public accountability, the OJK must announce the OJK's annual report to the public through print and electronic media (Article 38 of Law No. 21 of 2011).

Public accountability of financial service providers are governed by OJK. As part of the regulation and supervision of the health of banks, the OJK regulates bank's reports related to the health and performance of the bank and bank accounting standards. OJK also can perform audit on the health of a bank (Article 7 of Law No. 21 of 2011). OJK has the authority to regulate public accountability of other financial services in accordance with Article 8 of Law No. 21 in 2011.

In practice, Bank Indonesia also regulates public accountability for the banking company. Bank Indonesia Regulation No. 3/22/PBI/2001 dated December 13, 2001 governing the Transparency of Financial Condition Bank, among others, states that the change in Indonesian Banking Accounting Guidelines will be determined by Bank Indonesia Circular Letter. Bank Indonesia Circular letter No. 11/4/DPNP dated January 27, 2009 regulates the implementation of Indonesian Banking Accounting Guidelines. This circulate letter requires banks to prepare and present financial statements in accordance with PSAK relevant for banks, Indonesian Banking Accounting Guidelines or *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia* (PAPI), and other conditions set by Bank Indonesia. PAPI aims to improve the transparency of the financial condition of banks and the preparation of financial statements that are relevant, comprehensive, reliable and comparable. PAPI will adjust to changes in PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board or Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants (IAI). PAPI is prepared with the cooperation between the Bank Indonesia, banking industry, and IAI.⁵

Governance of Financial Report for Presenting Public Performances

DPR and the government do not regulate the governance so that the president, the minister/head of the institution, the governor/regent/mayor may prepare honest and true financial statements as expected by general public. DPR and the government only regulate the government accounting system. Minister of finance/local government financial officers, as the state treasurers organize accounting for financial transactions, assets, debt, and equity funds, including financing transactions and calculations in accordance with government accounting standards. Minister/Head of institution/head as the local work unit budget users also do the same for transactions that are within his responsibility (Article 51 of Law No. 1 of 2004). The finance minister prepares Government Financial Statements (LKPP) to be submitted to the president as the accountability of the state budget. No later than three months after the fiscal year ends, the president must submit LKPP to the Audit Board of Indonesia (BPK-RI). Minister/Head of institutions as budget users provide a statement that the management of the state budget has been organized by an adequate system of internal control and financial accounting has been conducted in accordance with government accounting standards (Article 55 of Law No. 1 of 2004).

DPR and the government only requires the OJK to form its supporting units which include secretarial support, the board of audit, ethics committees, and other organs based on the need. DPR and the government do not regulate corporate governance so that the financial statements and the activity reports of OJK can be presented honestly and correctly, so as to describe the achievement of the FSA's performance as expected by the public.

Independency and Quality Auditor

State finance

DPR and the government agreed that the independence and quality of auditors of the state finance is the authority of BPK-RI as stipulated in Law No. 15, 2006. BPK-RI is set to become an independent and free institution in

⁵ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/pedoman-akuntansi/Contents/Default.aspx> (diunduh tanggal 14 November 2014).

examining the management and accountability of state finances. BPK has nine (9) members elected fully by DPR. In taking a decision on the selection of members of BPK, DPR takes into considerations recommendations from the House of Regional Representatives, *Dewan Perwakilan Daerah* (DPD) as well as public's aspirations.

As a form of public accountability to the public, the results of BPK audits after being submitted to DPR, DPD, and DPRD are open for public. BPK submit the results of audits of the state finance to DPR, DPD, and DPRD in accordance with their relevant authority. If it found criminal offences, BPK will report the matter to the relevant authorities. For the purposes of follow-up results of the audit, BPK also submit the audit reports to the President, governors, and regents/mayors in accordance with their authority. BPK monitor the implementation of the follow-up results of the examination conducted by the officials and the results are notified in writing to DPR, DPD, DPRD as well as the government.

DPR and the government requires the BPK-RI financial statements to be audited by a public accountant appointed by DPR based on recommendation from DPR and the Ministry of Finance as a form of public accountability of BPK-RI. The audit results of public accountant then be submitted to DPR with a copy to the government for the preparation of LKPP. To ensure the quality of audit, quality control system of BPK reviewed by a Supreme Audit Institution auditing of other countries appointed by BPK after a consideration of DPR.

Public finance

Auditor's independence and quality of public finances is stipulated in Law No. 5 2011. DPR and the government give authority to the finance minister to provide guidance and oversight of public accounting, public accounting firms (KAP) and KAP branch. Only public accountants can provide Assurance services on the organization's financial statements. Permission is granted by a public accountant finance minister. Public accountants can establish a public accounting firm (KAP) whose licenses are also given by the finance minister. Public accountant shall assemble in the public accounting profession association, the Association of Indonesian Public Accountants (IAPI) set by the finance minister. Public accountants in providing the services required by the firm adhere to and implement Accepted Accounting Standards (SPAP) and adhere to and implement the code of professional conduct. SPAP is set to be the reference quality measure that must be obeyed by a public accountant in the provision of services.

In providing Assurance services, public accountants and the firm must maintain independence and free from conflicts of interest. Public accountant and/or associated parties shall maintain the confidentiality of the information obtained from the client, except when used for the benefit of oversight by the finance minister. The finance minister shall maintain the confidentiality of information obtained from public accountant and/or associated parties.

The finance minister has established the Committee for Public Accounting Profession, *Komisi Profesi Akuntan Publik* (KPAP) with 13 (thirteen) members consisting of elements from the Ministry of Finance, Association of Certified Public Accountants, the Association of Professional Accountants, BPK, capital market authority, banking authorities, academics accounting, public accounting service users, the Ministry of National Education, DSAK, Islamic Accounting Standards Board, the Board of SPAP and the Government Accounting Standards Committee. KPAP give consideration to the policy of empowerment, development, and monitoring and the firm of public accountants, accounting standard setting and SPAP, and other things necessary with regard to the public accounting profession. KPAP also serves as an appeal body on the results of the examination and administrative sanctions set by the finance minister on public accountant and KAP.

Discussions

Analysis Of Public Accountability In Indonesia

Analysis of the condition of public accountability in Indonesia is done by using the theory of legitimacy that was developed by Suchman (1995) as described in the second part of this paper. What kind of legitimacy is currently being development by DPR and the government? Is pragmatic legitimacy, moral legitimacy, or has reached cognitive legitimacy?

State finance

Public accountability of state finances is focused on the preparation of the financial statements by the government and the examination of financial statements by BPK-RI. The results of the examination conducted by BPK-RI can be opened to the public after it was delivered to DPR or DPD. In general, the government's financial statements and the audit results of BPK are not easy to obtain and are not easily understood by the public. The information generated by these reports is difficult to understand by the general public, although conceptually preparation of financial statements is intended for all segments of society.

People really expect the government (president and vice president) can fulfill its promise during the campaign and promises should be explained in the financial statements. In accordance with the concept of full

disclosure in the financial statements of government, the implementation of campaign promises should be disclosed in the financial statements of the government and in the examination report by BPK-RI. State Finance Act is currently in effect has not been set explicitly how to account for the campaign promises to the public. In the State Finance Act should also be set on the fulfillment of a campaign promise governance president and vice president to ensure consistency between campaign promises with the national development plan and budget development in each of the ministries and government agencies formed by the president and vice president elected.

Jokowi government promise and JK (JKW-JK) written clearly in Nawa Cita which contains the vision and mission of the President and Vice President of the Republic of Indonesia Period 2014-2019 (Widodo and Kalla, 2014). JKW-JK government promises to achieve three things during his reign, namely: (1) present a working state, (2) independence welfare, and (3) a mental revolution to Indonesian people more able to work better. To achieve these three goals, JKW-JK promising nine (9) program. State Finance Law least ask the government to describe the vision, programs, activities, and budget related ministries as shown in Table 1.

Table 1. Campaign Promise Budgeting Process

Purpose/Vision	Program	Activity	Related Ministry
Presenting countries working	Security and protect	<ul style="list-style-type: none"> Carry out independent and active foreign policy Protecting immigrant workers The defense budget to 1.5% of GDP Develop industry National defense Build a professional police Protect children, women and marginalized communities Resolving issues of past human rights 	<ul style="list-style-type: none"> Ministry of Foreign Affairs Ministry of Labor & Ministry of Foreign Affairs The Ministry of Defense Ministry of Industry, Ministry of Enterprises Owned State, Ministry of Defense Police Ministry of the Role of Women Ministry of Law and Human Rights
	Eradication corruption and law enforcement	<ul style="list-style-type: none"> Strong legislation to combat corruption and enforcement Human rights, environmental protection, and reform of the law enforcement agencies Strengthening the corruption eradication commission Combating the mafia Combating illegal logging, illegal mining and illegal fishing Combating drugs and psychotropic Combating crime and money laundering banking Legal certainty of land title Build a culture of law 	<ul style="list-style-type: none"> Ministry of Justice and Human Rights Ministry of Justice and Human Rights Ministry of Justice and Human Rights, Corruption Eradication Commission, Center for Financial Transaction Reports and Analysis, the Attorney General, Police, the Supreme Court Corruption Eradication Commission, Center for Financial Transaction Reports and Analysis, the Attorney General, Police, Ministry of Forestry and Environment, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Energy and Mineral Resources Police, the Attorney General, Ministry of Justice and Human Rights OJK, PPATK, BI, Ministry of Finance, Police, Attorney General's Office, Ministry of Justice and Human Rights Ministry of Agrarian & Spatial, Ministry of Justice and Human Rights
	Public service	<ul style="list-style-type: none"> Effective Presidential Office Reform of the bureaucracy Reform of the party system Transparency of governance Public participation Indonesia Smart Program Healthy Indonesia Program The new road 2,000 Km Investment services one roof Technopark Welfare teachers Poor access to higher education 	<ul style="list-style-type: none"> Secretary of State Ministry of Administrative Control and Bureaucratic Reform Ministry of Justice and Human Rights, Election Commission Ministry of Administrative Control and Bureaucratic Reform, Ministry of Home Affairs Ministry of Administrative Control and Bureaucratic Reform, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Communications and Information Technology Ministry of Culture of Primary and Secondary Education Ministry of Health Ministry of Public Works and Public Housing Investment Coordinating Board, the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Commerce Ministry of Culture of Primary and Secondary Education, Ministry of Research Technology and Higher Education Ministry of Culture of Primary and Secondary Education Ministry of Research Technology and Higher Education

Purpose/Vision	Program	Activity	Related Ministry	
Independence Welfare	Food sovereignty- based agribusi- ness populist	<ul style="list-style-type: none"> Decentralization asymmetric Balancing the Development of inter-regional Structuring a new autonomous region Implementation of the Village Law Agrarian Reform 5000 new traditional markets Build food sovereignty Establishing Bank Farmer/Fisherman SMEs 	<ul style="list-style-type: none"> Ministry of Internal Affairs The Ministry of Rural Development of Disadvantaged Ministry of Internal Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Rural Development of Disadvantaged Ministry of Agrarian & Spatial, Ministry of Forestry and Environment, Ministry of Agriculture Ministry of State-Owned Enterprises Ministry of Agriculture Ministry of State Owned Enterprises, Ministry of Co-operative Micro Small and Medium Enterprises, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Fisheries 	
		Energy sovereignty based on national importance	<ul style="list-style-type: none"> Energy sovereignty 	<ul style="list-style-type: none"> The Ministry of Energy and Mineral Resources
		Indonesian Maritime Economic Restoration	<ul style="list-style-type: none"> Maritime sovereignty Build 10 new ports and renovate the old Build 10 new airports Build 10 new industrial zones 	<ul style="list-style-type: none"> Ministry of Marine Fisheries Ministry of Transportation Ministry of Transportation Ministry of Public Works and Public Housing
Mental revolution	Emancipation	<ul style="list-style-type: none"> Representation of women 	<ul style="list-style-type: none"> The Ministry of Women's Role 	
	Autonomy	<ul style="list-style-type: none"> Financial sovereignty National innovation system Research to support science and technology Mutual cooperation as social capital Restoration of social Incentives for local culture 	<ul style="list-style-type: none"> Ministry of Finance, the Ministry of State-Owned Enterprises, OJK, BI Ministry of Research Technology and Higher Education Ministry of Research Technology and Higher Education Ministry of Social Ministry of Social Ministry of Culture of Primary and Secondary Education 	
	Diversity	<ul style="list-style-type: none"> Civic education Evaluation of the national education system Educational diversity Space dialogue among citizens Cultural exchange 	<ul style="list-style-type: none"> Ministry of Culture of Primary and Secondary Education, Ministry of Research Technology and Higher Education Ministry of Internal Affairs Ministry of Culture of Primary and Secondary Education, Ministry of Research Technology and Higher Education Ministry of Culture of Primary and Secondary Education 	

From the above process, we will be able to know the amount of the budget required by each ministry in support of the president and his deputy in achieving its vision. Based on the above analysis, the Ministry of Youth and Sports has lesser role in achieving the vision of President Jokowi. Effectiveness of public accountability of state finances is reduced since in practice, the Government Accounting Standards Committee, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) is not an independent committee of government as desired by the community. DPR and the government have not set about creating an independent KSAP. KSAP published the Government Accounting Standards (SAP) as the accounting principles applied in preparing and presenting the financial statements of the government. SAP is expressed in the form of statement the Government Accounting Standards (PSAP). Government implements accrual-based SAP. PSAP is created by Government Regulation No. 71 year 2010. When PSAP needs to be changed, the changes will be introduced by regulations of the Minister of Finance after a consideration of the BPK-RI. The draft of PSAP changes is prepared by KSAP and submitted to the Minister of Finance. Finance Minister submit the proposed draft amendments to the BPK-RI to receive consideration. Under Presidential Decree No. 21 In 2013, the number of members KSAP is nine (9) persons who mostly worked for the government and all its members have accounting background and education.

Effectiveness of public accountability of state finances is also reduced as DPR abolished the State Financial Accountability Board, *Badan Akuntabilitas Keuangan Negara* (BAKN) as a vital organization in DPR. BAKN should be able to play to increase the quality of public accountability in Indonesia. In Australia, a committee like BAKN involved in maintaining the independence of public accountants and KAP. Joint Standing Committee on Public Accounts and Audit of the Australian Parliament (JCPP) involved in efforts to improve the independence and quality of auditors in Australia. MPs Australia considers that the issue of auditor independence is very important for the Australian government auditors. Government auditors are very important actors (essential) in the process of government accountability to parliament and also to ensure good business governance (GCG) in the

public sector. Through the hearing process (inquiry) by experts in the field of auditing and corporate governance, JCPP can understanding issues on auditor independence in general including government auditor independence (JCPP 2002).

Public finance

OJK has great authority to protect the public from financial crimes that occurred in the capital markets, banking, insurance, pension funds, and other financial institutions. OJK shall submit financial statements and activity report to the Parliament and the president. The financial statements should be published through the national media. However, DPR and the government do not regulate the procedure for making the financial statements and reports of activities so that people feel protected by OJK.

The Ministry of Finance is responsible for the independence and quality of public accountants and accounting firms that perform audit on the financial statements of financial service providers. However, DPR and the government did not require public accountability of the Ministry of Finance to implement this authority. Society does not have sufficient information to assess the independence, quality of public accountants, and the quality of the accounting firms.

Who can determine the auditors' independence and quality? Is it the market or government regulation? Houghton (2003) states that the market should determine the independence, quality of public accountants, and the quality of the accounting firms. This opinion is supported by JCPP (2002) because Australia did not experience such a failure condition that occurs in the United States. Houghton argued that in fact the examination or auditing is simply a "product compliance" (good compliance) since it has to be done, but do not have value added to users. This happens due to the fact that the financial statement disclosures are the result of a compromise between management of companies and company's auditors. The role of the auditor will have value if and only if the audit carried out with sufficient competence and independent from the preparers of financial statements. Unfortunately the quality of the audit and the auditor's independence can not be seen by the market. Usually reputation and business name (brand name) is used as a surrogate measure of the quality of the audit and the auditor's independence. According to Houghton (2003), the rotation of auditors does not have a positive impact on audit quality and auditor independence. Even otherwise, the rotation of auditors have a negative impact because the audit industry dominated by a few firm that has the ability to maintain audit quality and independence. He argued accounting firms that can explain to the market about how they maintain audit quality and independence would be much appreciated by the company management who understands that true and honest financial statements will increase the wealth of shareholders. Since 2002, PwC (PricewaterhouseCoopers) and KPMG (Klynveld, Peat, Marwick, and Goerdeler) in Australia developed a mechanism to measure their auditor independence. PwC formed an intra-firm independent board, while KPMG form an independent team to examine the independence of the auditor in each of these accounting firms.

Financial accounting standards currently implemented in Indonesia were developed by the International Accounting Standards Board (IASB) and DSAK. IASB is part of the International Accounting Standards Committee (IASC) Foundation or who is now known as the International Financial Reporting Standard (IFRS) Foundation. IFRS Foundation is managed by a trustee managed by 22 people to elect members of the IASB and its board and its committees. Trustee should also provide funding for the organization of the IASB.⁶ The whole trustee has the educational background and work experience as a regulator of financial services, regulatory accounting, financial industry, or academia finance and accounting. None of the trustee has the educational background and work experience with the community, labor, environmental activists, and even the government. Current IASB members are 14 experts who have the same educational background and experience with the IFRS Foundation trustees. They are permanent employees of IFRS.⁷

DSAK is an organization under the National Governing Council (NCC) Indonesian Institute of Accountants (IAI). Currently the number of members is 14 persons appointed by the Chairman of IAI.⁸ Members of DSAK come from accounting firms, academia, and government (BPK and CPC). DSAK member is not a permanent employee of IAI. IAI DPN members of 20 people, including the chairman of the accounting educational backgrounds and work in the office of government auditors (BPK and BPKP), public accounting firms, academia, the tax office, and head of the company.⁹ The member of DPN is not a permanent employee of IAI and legal entity is a legal person or association of professional organizations whose members individually. Supreme sovereignty for member organizations and fully implemented in the congress.¹⁰

⁶ IFRS Foundation: Preface to International Financial Reporting Standards

⁷ <http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Members/Pages/Members-of-the-IASB.aspx> (diunduh tanggal 13 November 2014)

⁸ <http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=516> (diunduh tanggal 13 November 2014)

⁹ http://www.iaiglobal.or.id/v02/tentang_iai.php?sbid=31 (diunduh tanggal 13 November 2014)

¹⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI tahun 2010.

Conclusion

Overall this paper seeks to provide an initial assessment of the assessment or public accountability in Indonesia, especially the assessment of the legitimacy of the government by the people of Indonesia. This study shows that public accountability in Indonesia is still in the level of pragmatic legitimacy. Policies and practices of accountability is still focused on the fulfillment of the preparation of the financial statements and the audit of the financial statements for following regulations. This condition is valid for the state financial sector and the public company sector. The financial statements are prepared only for the primary users of financial statements, DPR, the government, and investors.

DPR and the government has yet to develop the governance of financial statements to ensure that the financial statements for the state finance and the public corporations present a true and fair information that is expected by the public. People need information about the use of state finances by the government in order to fulfill the promises that were delivered in their election campaign as well as their public obligation as stipulated in many laws. Public also needs information about security and growth of their wealth that is placed in the financial sector and they expect these funds growing sustainably.

This study was limited to an analysis of the documents and news related to public expectations represented by DPR and government official in charge of making laws. This study needs to be extended by involving focus group discussion (FGD) and interview members of DPR and the government that are preparing the relevant regulations on public accountability and to officials who hold the power of the people in carrying out public accountability.

References

- Belal, A., S Cooper, and N. Khan. 2015. Corporate environmental responsibility and accountability: What chance in vulnerable Bangladesh? *Critical Perspectives on Accounting* 33: 44–58.
- Boven, M. 2005. Analysing and assessing public accountability: A conceptual framework. In *Accountable Governance: An International Research Colloquium*. Queens University Belfast.
- Burchell, S., C. Club, A. Hopwood, J. Hughes, and J. Nahapiet. 1980. The roles of accounting in organizations and society. *Accounting Organization & Society* 5 (1): 5–27.
- Campbell, D. 2000. Legitimacy theory or managerial reality construct? Corporate social disclosure in Marks and Spencer Plc annual corporate reports. *Accounting Forum* 24 (1): 80–100.
- Campbell, D., G. Moore, and P. Shrivs. 2006. Cross-sectional effects in community disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 19 (1): 96–114.
- Carnegie, G., and B. West. 2005. Making accounting accountable in the public sector. *Critical Perspectives on Accounting* 16: 905–28.
- Cochrane, J. 2013. Indonesian strongman's legacy remains a matter of debate. *The New York Times*, May 19.
- Commonwealth of Australia. 2016. Charter of budget honesty policy costing guideline, the Secretaries to the Treasury and the Department of Finance.
- Creswell, J.W. 2014. *Research design-qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. First Edit. SAGE.
- De Villiers, C., and J. Van Staden. 2006. Can less environmental disclosure have a legitimising effect? Evidence from Africa. *Accounting, Organizations and Society* 31 (8): 763–81.
- Deegan, C. 2002. The legitimising effect of social and environmental disclosures—A theoretical foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 15 (3): 282–311.
- Gray, A., and B. Jenkins. 1993. Codes of accountability in the new public sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 6 (3).
- Gray, R, R Kouhy, and S Lavers. 1995. Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 8 (2): 47–77.
- Houghton, K. 2003. Where auditing should head next. *Australian CPA* 73 (2): 66.
- JCPP (Joint Standing Committee on Public Accounts and Audit of the Parliament of the Commonwealth of Aus-

- tralia). 2002. Review of independent auditing by registered company auditors. Canberra.
- Kemp, P. 1963. Controversies on the construction of financial statements. *The Accounting Review* 38 (1): 126–32.
- Neu, D., H. Warsame, and K. Pedwell. 1998. Managing public impressions: Environmental disclosures in annual reports. *Accounting, Organizations and Society* 23 (3): 265–82.
- Peecher, M., I. Solomon, and K. Trotman. 2013. An accountability framework for financial statement auditors and related research questions. *Accounting, Organizations and Society* 38: 596–620.
- Setiono, B., and C. Prasetyo. 2015. *Promoting public sector accountability in Indonesia: A historical overview*. In Hoque Z.
- Sherlock, S. 2007. The Indonesian Parliament After Two Elections: What Has Really Changed? *Australia: CDI Policy Papers on Political Governance*.
- Smith, S. 2007. Public accountability: A critical approach. *Journal of Finance and Management in Public Services* 6 (2): 27–45.
- Suchman, M. 1995. Managing legitimacy: Strategic and Institutional approaches. *Academy of Management Review* 20 (3): 571–606.
- Thinggaard, F. 2008. Has financial statement information become less relevant? Longitudinal evidence from Denmark. *Journal of Management* 34: 375–87.

Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia

Johan Arifin¹, Eke Ayu Wardani²

^{1,2} Universitas Islam Indonesia

¹e-mail: arf.johan@gmail.com

ARTIKEL INFO

Article history:
Available online 1 June 2016

Keywords:

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Firm's reputation, Firm's Financial Performance, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE).

ABSTRACT

This study examines the effect of Islamic Corporate Social Responsibility disclosures (ICSR) on Corporate Reputation, and company's financial performance as measured by Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). These relationships are examined based on content analysis of 11 Sharia banks annual reports in Indonesia for 2011, 2012, and 2013. This study provides evidence that Islamic Corporate Social Responsibility activities which communicated in corporate annual reports are significantly positively related with corporate reputation as well as Return on Equity, meanwhile the Islamic Corporate Social Responsibility disclosure does not significantly affect the Return on Assets.

ABSTRAK

Study ini menguji pengaruh pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) terhadap reputasi korporasi, serta kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pengujian ini menggunakan metode content analysis terhadap laporan keuangan tahunan pada 11 bank syariah di Indonesia selama periode tahun 2011, 2012, dan 2013. Hasil pengujian membuktikan bahwa aktivitas pengungkapan ICSR dalam laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi perusahaan dan ROE, sementara itu pengungkapan ICSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.

Pendahuluan

Saat ini *Islamic Corporate Social Responsibility* sedang menjadi tema yang banyak dibicarakan tidak hanya di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi telah menjadi objek utama pada penelitian di berbagai negara termasuk negara yang penduduknya menganut kepercayaan lain dan tidak menjalankan hukum syariah sebagai dasar etika dalam bisnis. Di Indonesia Undang-undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tertuang dalam UU PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews 1985).

Islam memberikan konsep hidup yang lengkap, mengarahkan setiap fase kehidupan manusia termasuk spiritualitas, bisnis, dan keadilan dalam kehidupan sosial (Rice 1999). Sedangkan syariah merupakan sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup semua aspek kehidupan manusia meliputi personal, sosial, politik, ekonomi dan intelektual serta mekanisme yang penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan (Albaity dan Ahmad 2008). Berkaitan dengan hal tersebut, merupakan hal yang wajar jika penerapan hukum syariah menjadi dasar pendirian berbagai perusahaan khususnya bank syariah.

Keberadaan bank syariah didasarkan pada beberapa aspek prinsip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Aspek prinsipnya adalah untuk menghindari bunga dengan asumsi bahwa bank-bank konvensional telah menerapkan mekanisme pemberian bunga dimana hal ini termasuk kategori haram karena riba dilarang oleh

agama (Syafii 2001). Alternatifnya, seperti yang dikatakan Aggarwal dan Yousef (dikutip oleh Haniffa dan Hudaib 2007), bahwa berbagai jenis produk yang dikembangkan oleh bank syariah menganut dua prinsip, yaitu *profit-loss sharing* dan *mark-up principle*. Produk-produk yang ada di perusahaan berbasis syariah harus berlandaskan pada prinsip sebelumnya termasuk *mudharabah* (modal ventura) dan *musharakah* (perjanjian kerja sama), sedangkan prinsip selanjutnya termasuk *murabahah* (penjualan dengan menyatakan keuntungan), *ijarah* (sewa), dan penggadaian (*rahn*).

Untuk tetap kompetitif dengan para pesaingnya, bank syariah seringkali berinovasi dalam menawarkan produk mereka yang tidak mencederai syariah sampai batas tertentu sehingga mereka masih dianggap produk yang Islami. Dengan kompetisi yang ketat, pasar yang lebih maju, dan permintaan dari *stakeholder* untuk lebih transparan, salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan berbasis syariah untuk menangani masalah-masalah tersebut ialah dengan mengkomunikasikan secara detail mengenai aktivitas investasi dan produk-produk barunya apakah sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga keterangan dasar syariah yang digunakan. Cara pandang pemangku kepentingan yang mengedepankan *ridha Ilahi* telah menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah (perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad S.A.W.) sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas CSR. Pernyataan yang terkait dengan hal tersebut ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77:

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan apapun di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Bentuk-bentuk perusakan terhadap lingkungan adalah hal yang bertentangan dengan hukum Islam, maka sebuah perusahaan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Muwazir *et al.* (2006) perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, termasuk masyarakat dan lingkungan, karena mereka adalah entitas yang memiliki hubungan dengan Tuhan, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi aturan dan peraturan Islam untuk kegiatan mereka agar diberkati oleh Allah.

Terdapat pendapat lain bahwa CSR merupakan upaya untuk meningkatkan citra korporasi dengan menghadirkannya sebagai tindakan manusiawi, penuh kebajikan, dan bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga dapat dirasakan sebagai masker untuk mengejar keuntungan dan kekuasaan tanpa hambatan (The Economist 2005). Selain itu, penerapan CSR dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dimana investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan aktivitas CSR. Karena bagi investor, perusahaan yang melakukan aktivitas CSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan yang tidak, sehingga kedepannya perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja keuangannya (Arshad *et al.* 2012). Teori tersebut terasa kurang menekankan nilai sosial dan lebih menekankan pada nilai materialistik, meskipun setiap manusia memiliki hak dalam menentukan pilihan dan tujuan bisnisnya. Mereka juga meramalkan bahwa dengan berkomunikasi secara efektif tentang sosial, kontribusi lingkungan dan ekonomi, mereka dapat memperkuat merek, meningkatkan reputasi perusahaan dengan pelanggan dan pemasok, serta menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkomitmen dan terampil. Memang literatur yang ada menegaskan bahwa komitmen untuk CSR pada saatnya akan mengakibatkan kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas, daya saing dan manajemen risiko (Brinkman 2003).

Islam mengakui bahwa pemilik perusahaan atau penyandang dana memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak dengan mengorbankan klaim berbagai pemangku kepentingan lainnya (Freeman 1984). Berbeda dengan teori-teori barat, pandangan Islam tentang CSR mengambil pendekatan yang agak holistik, yaitu menawarkan pandangan spiritual integralistik berdasarkan ajaran Qur'an dan Sunnah, serta menyediakan kerangka filosofis alternatif yang lebih baik untuk interaksi manusia dengan alam dan sesamanya (Ahmad 2002).

Saat ini investor semakin sadar akan etika investasi yang bertanggung jawab secara sosial, bahkan minat pada investasi berbasis syariah dalam perbankan juga meningkat. Diantara tujuan yang paling penting dari keuangan Islam pada umumnya, dan khususnya bank syariah adalah pembentukan keadilan dan penghapusan eksploitasi dalam transaksi bisnis. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari adanya larangan semua sumber ilegal dan larangan berurusan dengan transaksi yang mengandung risiko yang berlebihan. Prinsip-prinsip dan tujuan moral memainkan peran yang lebih penting dalam operasinya, ini merupakan misi dan tujuan bank syariah dibandingkan bank dengan basis non-Islam. Bank syariah memiliki *Islamic Religious Board*, untuk memastikan bahwa praktik bank sejalan dengan hukum syariah, dan divisi solidaritas sosial yang kuat (Hasan dan Harahap 2010).

Bagi penulis, pemangku kepentingan yang berorientasi terhadap agama memiliki konsep dasar Islam tentang halal dan haram suatu muamalah serta telah memberikan peraturan mutlak yang ditaati oleh bank syariah dengan kesadaran penuh dalam segala aktivitas perusahaan termasuk segala hal yang bersangkutan dengan kompleksitas *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. Misalnya saja perusahaan tidak akan menggabungkan

aktifitas yang haram dengan pelaksanaan *ICSR* seperti memberikan bantuan terhadap pengembangan peternakan hewan babi, memfasilitasi petani anggur untuk memproduksi *wine*, memberikan bantuan kepada rumah produksi minuman beralkohol, dan atau mendukung klonasi (*cloning*) yang sangat jelas merupakan perihal haram di dalam hukum Islam, dimana aktifitas *CSR* semacam itu tidak akan terjadi di dalam perusahaan berbasis syariah yang juga memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selain merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, hal tersebut juga sebagai bentuk menjaga kepercayaan konsumen Muslim yang telah menggunakan produk dan layanan perusahaan. Sebagai contoh bank yang menjalankan aktifitas *CSR* dan dapat dikatakan memiliki orientasi yang berbeda dengan hukum *ICSR* adalah *The Bank of East Asia* di China dan OTP Bank di Romania yang memberikan bantuan berupa pengembangan peternakan babi, atau sebagai contoh lain adalah pengembangan industri *wine* oleh TWE Global. Hal tersebut tentunya bukanlah suatu bentuk kesalahan bank-bank tersebut, melainkan perbedaan hukum di setiap agama dan perbedaan tujuan bisnis.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menguji pengaruh *ICSR* terhadap reputasi perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan pengukuran *ICSR* yaitu *Islamic Social Reporting Index (ISR Index)* yang terdiri dari 38 *item*.

Tinjauan Pustaka Dan Perumusan Hipotesis

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

Mengingat pentingnya *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, diharapkan organisasi Islam selektif terhadap pemilihan anggota manajemen dan dewan dalam menentukan kualifikasi tertentu dan keyakinan agama dalam melaksanakan inisiatif pengungkapan *ICSR* (Baydoun dan Willet 1997). Bank syariah diharapkan menggambarkan tingkat tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi dan jelas dalam praktik pelaporan sosial mereka yang dibuktikan dalam laporan tahunan (Zubairu *et al.* 2011). *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan pendekatan yang seimbang bagi organisasi untuk mengatasi problem ekonomi, sosial dan isu lingkungan dengan cara yang menguntungkan individual maupun masyarakat. Selama dekade terakhir, banyak negara mengembangkan konsep ini untuk menangani masalah pengangguran, kemiskinan, polusi dan masalah-masalah sosial dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, krisis keuangan terakhir telah menarik perhatian luas untuk sosial ekonomi dimensi di bidang keuangan dan perbankan. Selanjutnya telah disepakati bahwa kurangnya etika dan moralitas bisnis yang rendah memiliki konsekuensi *damageable* yang tidak hanya terjadi pada keuangan, tetapi juga sosial dan lingkungan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam diharapkan mampu mencerminkan tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial dan harus menggabungkan kedua keuntungan dan tanggung jawab sosial ke dalam tujuan mereka karena mereka seharusnya memiliki identitas etika (Haniffa dan Hudaib 2007).

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan tahunan (*annual report*) memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara komprehensif baik mengenai informasi keuangan maupun informasi non-keuangan yang perlu diketahui oleh para pemegang saham, calon investor, pemerintah atau bahkan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempengaruhi komunitas, yang mana dapat ditentukan dan dijelaskan atau diukur, dan penting bagi perusahaan dalam lingkungan sosialnya (Belkaoui 2007).

Meskipun *ICSR* dapat meningkatkan reputasi perusahaan sekaligus kinerja keuangan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Arshad *et al.* (2012). Tetapi tujuan pemangku kepentingan di dalam perusahaan maupun bank berbasis Syariah diharapkan bukanlah hanya mengejar faktor keuntungan semata, namun merupakan realisasi murni sebagai khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi. Menurut Chapra (1992) di dalam Islam, kegiatan usaha tidak diasumsikan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan material kegiatan tetapi harus dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab agama juga.

Reputasi Perusahaan

Dowling (1994) mendefinisikan reputasi perusahaan sebagai hasil evaluasi (penilaian) yang menggambarkan citra perusahaan menurut masyarakat. Argenti dan Druckenmiller (2004) menyebut reputasi sebagai representasi kolektif dari citra yang dimiliki berbagai konstituen, istilah untuk menyebut orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan organisasi maupun mereka yang dilayani organisasi, yang dibangun dari waktu ke waktu dan didasarkan pada program perusahaan, kinerja perusahaan, dan bagaimana para konstituen mempersepsikan perilaku mereka terhadap perusahaan. Berbagai reputasi perusahaan datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, *banker*,

staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan pelanggan di sektor perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. Perusahaan yang mempunyai reputasi positif lebih memungkinkan untuk menarik minat pelamar berkualitas tinggi, membangun pangsa pasar yang luas, menerapkan harga yang tinggi, dan lebih menarik minat investor (Ardianto dan Sumirat 2004). Selanjutnya Daud (2016) menambahkan bahwa perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan akan lebih memperhatikan pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat, hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan mempengaruhi tingkat penjualan. Branco dan Rodrigues (2006) mencatat bahwa perusahaan yang mempunyai profil *ICSR* yang tinggi mampu mengadakan dan meningkatkan interaksi mereka dengan konsumen, pemasok, dan investor yang mana hasilnya meningkatkan reputasi mereka. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengungkapan *ICSR* berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika (Rivai dan Fawzi 2004). Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kesuksesan dalam menjalankan perusahaan. Beberapa penelitian berusaha untuk menilai kinerja dan profitabilitas bank syariah. Penelitian tersebut ada yang berfokus pada kinerja keuangan yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menciptakan laba (Masood *et al.* 2009).

Ukuran yang lazim dipakai untuk menilai kinerja perusahaan dinyatakan dalam rasio keuangan (Xu *et al.* 2014). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Bagi investor jangka panjang, rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Mithas *et al.* 2012). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam operasinya (profitabilitas) merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bagi penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Sebagai contoh profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan melalui perbandingan laba dengan investasi yang digunakan dalam investasi (Triatmodjo 2009).

Deegan *et al.* (2002) menyoroti bahwa *CSR* telah menjadi *driver* penting dalam mempengaruhi opini para pemangku kepentingan mengenai pemenuhan kewajiban perusahaan. Maignan *et al.* (2005) menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan merujuk kepada mereka yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Dalam mengkomunikasikan kegiatan *CSR*, banyak perusahaan yang menggunakan laporan tahunan mereka sebagai media pengungkapan.

Perusahaan dituntut untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dalam masa krisis maupun persaingan yang semakin ketat. Kinerja perusahaan pada akhir periode harus dievaluasi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan melihat kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya dalam persaingan yang seringkali juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari tahun ke tahun (Almilia dan Wijayanto 2007).

Teori *stakeholder* mengemukakan bahwa ketika perusahaan bertemu dengan berbagai macam harapan para *stakeholder* mereka akan lebih mampu menciptakan kinerja perusahaan yang luar biasa (Freeman 1984). Menurut Anwar dan Alfattani (2014) kinerja keuangan menggambarkan peran dalam meningkatkan kegiatan yang ditawarkan oleh bank Islam kepada investor. Transformasi dari beberapa bank konvensional ke bank Islam telah menciptakan reputasi yang baik bagi investor melalui *ICSR* yang baik.

Return on Asset (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dipergunakan. Dalam analisa keuangan *ROA* mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu alat analisis guna mengukur seberapa efisien manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain *ROA* menjadi suatu informasi kepada investor tentang seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal yang telah ditanamkan. Perusahaan yang menghadapi kompetisi yang tajam dalam dunia usaha akan menerapkan strategi perputaran aktiva atau *return on asset* (Husnan 2013).

Return on Equity (ROE) merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi (Indrawan 2011). ROE dapat memberikan gambaran mengenai tiga hal pokok, yaitu; (a) kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (*profitability*), (b) efisiensi perusahaan dalam mengelola *asset* (*assets management*), dan (c) utang yang dipakai dalam melakukan usaha (*financial leverage*). Hasil dari ekuitas (*return on equity*), merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan ekuitas. Menurut Putri (2014), pemilihan *ROA* dan *ROE* sebagai *proxy* dari kinerja keuangan karena *ROA* dan *ROE* dianggap sesuai dalam mencerminkan usaha perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki.

Variabel *ROA* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah *asset* yang digunakan. Dengan ini kita bisa menilai apakah sebuah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivitasnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Variabel *ROA* menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari keseluruhan *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. *ROA* dihitung dengan membagi laba usaha setelah pajak dengan total *asset* dikalikan seratus persen.

Variabel *ROE* mengukur pengembalian atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham, *ROE* dihitung dengan membagi laba usaha setelah pajak dengan ekuitas dikalikan seratus persen. Rata-rata ekuitas diperoleh dari ekuitas awal periode ditambah akhir periode dibagi dua. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Berdasarkan paparan tersebut, selanjutnya diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2a: Pengungkapan *ICSR* berpengaruh positif terhadap *Return on Asset (ROA)*

H2b: Pengungkapan *ICSR* berpengaruh positif terhadap *Return on Equity (ROE)*

Metoda Penelitian

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive judgement sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan *annual report* di website *www.idx.co.id*. Atas dasar kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 11 bank syariah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini mereview data keuangan dan laporan *ICSR* dari 11 bank syariah di Indonesia yang dipilih dengan periode waktu Januari 2011 hingga Desember 2013.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen reputasi perusahaan dan kinerja keuangan yang diprosikan dengan *ROA* dan *ROE*. Variabel Reputasi Perusahaan dalam penelitian ini menggunakan penghitungan reputasi perusahaan dengan *ICSR Index Reputation score* adalah sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{mj} \frac{dj}{N}$$

Untuk mengukur seberapa baik reputasi perusahaan, penelitian ini menggunakan *Global Reporting Initiative* (2015) dengan total 35 *item* untuk pengungkapan standar umum wajib yang diperoleh dari website *www.globalreporting.org*.

Variabel *ROA* menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. *ROA* dihitung dengan membagi laba usaha setelah pajak dengan total aset dikalikan seratus persen. *ROE* mengukur pengembalian atas ekuitas saham biasa, atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham, *ROE* dihitung dengan membagi laba usaha setelah pajak dengan ekuitas dikalikan seratus persen.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *ICSR*. Pada penelitian ini pengungkapan *ICSR* diukur dengan menggunakan index pengungkapan sosial yang merupakan variabel *dummy*. Rumus perhitungan pengungkapan *ICSR* adalah sebagai berikut:

$$ICSRD_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Dimana:

ICSRD Ij: *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j.

Nj : jumlah *item* untuk perusahaan j, nj =38

Xij : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan. Sehingga $0 \leq I_j \leq 1$.

Untuk mengukur seberapa jauh bank syariah menerapkan prinsip Islam yang baik dalam pengungkapan *ICSR* maka penelitian ini akan menilainya berdasarkan model *Islamic Social Reporting Index (ISR Index)*, terdiri dari 38 item yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi *item-item* standar yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI 2002)*.

Hasil dan Pembahasan

Uji Analisis Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap variabel dependen (*ICSR*) dan variabel independen (reputasi, *ROA*, dan *ROE*) ditunjukkan pada Tabel 1. Dijelaskan pada Tabel 1 bahwa rata-rata pengungkapan *ICSR* pada 33 sampel bank syariah di Indonesia adalah 72%. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan *ICSR* pada bank syariah di Indonesia tergolong cukup baik karena sudah di atas nilai tengah (67%) yaitu antara nilai pengungkapan *ICSR* minimum 47% dan maximum 87%.

Tabel 1: Hasil Uji Analisis Deskriptif

	n	Min	Max	Mean	Std. Dev
ICSR	33	.47	.87	.72	.11
REP	33	.77	1	.89	.07
ROA	33	-.59	6.93	1.69	1.37
ROE	33	-3.26	57.98	12.03	12.16

Keterangan:

ICSR= pengungkapan *Islamic Social Responsibility*;

REP = Reputasi;

ROA= Return On Asset;

REO = Return On Equity

Uji Hipotesis

Koefisien determinasi

Berikut ini disajikan hasil pengujian koefisien *Adjusted R Square* dari ketiga variabel independen meliputi Reputasi, ROA, dan ROE.

Tabel 2: Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
Dimension 0	1	,609 ^a	,371	,350	,05211

a. Predictors: (Constant), ICSR b. Dependent Variable: *Reputasi*

Tabel 3: Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
Dimension 0	1	,323 ^a	,104	,074	127,899

a. Predictors: (Constant), ICSR b. Dependent Variable: *ROA*

Tabel 4: Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
Dimension 0	1	,387 ^a	,149	,121	1,126,922

a. Predictors: (Constant), ICSR b. Dependent Variable: *ROE*

Koefisien *Adjusted R Square* (0,350 + 0,074 + 0,121= 0,545)

Tabel 2, 3, dan 4 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* reputasi perusahaan adalah sebesar 0,350 atau 35%, nilai *Adjusted R Square ROA* sebesar 0,074 atau 7,4%, sedangkan nilai *Adjusted R Square ROE* sebesar 0,121 atau 12,1%. Dengan demikian total nilai ketiga variabel tersebut 0,545 atau 54,5%. Hal ini berarti variabel Reputasi, *ROA*, dan *ROE* dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan *ICSR* sebesar 54,5%, selebihnya dijelaskan oleh faktor lainnya.

Uji statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual yaitu pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam menerangkan variasi variabel dependen, yaitu reputasi perusahaan, *Return on Asset*, dan *Return on Equity*.

ICSR dan reputasi

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada Tabel 5, variabel pengungkapan *ICSR* pada bank syariah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa pengungkapan *ICSR* pada bank syariah berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi perusahaan.

Tabel 5: Uji Hipotesis 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	.629	.061		10.239	.000
ICSR	.363	.085	.609	4.272	.000

Dependent Variable: *Reputasi*

Hasil analisis statistik di atas mengindikasikan bahwa bank syariah yang mempunyai tingkat pengungkapan *ICSR* tinggi mempunyai reputasi yang tinggi pula. Hal ini kemungkinan karena bank syariah dengan tingkat pengungkapan *ICSR* yang tinggi mampu berinteraksi dengan konsumen, pemasok, dan investor dengan sangat baik. Borghesi *et al.* (2014) menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya akan mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut karena pihak-pihak di sekitar perusahaan akan meningkatkan kepercayaannya terhadap perusahaan apabila komunikasi diantaranya lancar. Hasil ini selaras dengan beberapa penelitian lainnya seperti; Saeidi dan Sofian (2015), Esen (2013), Farook *et al.* (2010), yang membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan *ICSR* tinggi mendapat kepercayaan yang tinggi dari pelanggannya sehingga reputasi perusahaan semakin baik.

ICSR dan *Return on Asset (ROA)*

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada Tabel 6. Variabel pengungkapan *ICSR* pada bank syariah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,101. Hal ini berarti bahwa pengungkapan *ICSR* pada bank syariah tidak berpengaruh terhadap *ROA*.

Tabel 6: Uji Hipotesis 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	4.31	1.57		2.745	.010
ICSR	-3.668	2.171	-.290	-1.689	.101

Dependent Variable: *ROA*

Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai *ROA* yang tinggi, maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Perusahaan yang menghasilkan laba cenderung akan melakukan *disclosure* yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *ICSR* tidak mempengaruhi *ROA*. Hal ini kemungkinan karena pada bank syariah informasi yang diungkapkan dalam *ICSR* tidak banyak dikaitkan dengan aktivitas perolehan laba atas aktiva yang digunakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Servaes dan Tamayo (2013) serta Firlil dan Akbar (2016) yang menyatakan bahwa tingkat

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan khususnya *ROA*.

ICSR dan Return on Equity (ROE)

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada Tabel 7. Variabel pengungkapan *ICSR* pada bank syariah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,025. Hal ini berarti bahwa pengungkapan *ICSR* pada bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap *ROE*.

Tabel 7: Uji Hipotesis 3

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	-19.109	13.390		-1.427	.164
ICSR	43.545	2.171	.389	2.352	.025

Dependent Variable: ROE

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas tinggi akan mendorong para manajer memberikan informasi yang lebih rinci karena mereka ingin meyakinkan para investor bahwa perusahaannya mampu menghasilkan profit yang tinggi. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kompensasi terhadap manajemen.

Hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Almar *et al.* (2012); Ehsan dan Kaleem (2012); serta Yuniasih dan Wirakusuma (2009) dimana mereka menemukan bukti empiris yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengungkapan tanggungjawab sosial dengan *ROE*. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak mendukung beberapa penelitian sebelumnya yaitu Khan *et al.* (2013); Husnan (2013); dan Anggraini (2006) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan khususnya *ROE*.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian peningkatan kualitas pengungkapan *ICSR* dalam laporan keuangan di kalangan perusahaan perbankan syariah di Indonesia dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan reputasi perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *ROA*. Dengan demikian pengungkapan *ICSR* tidak dapat dijadikan variabel prediktor terhadap *ROA*. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap luas pengungkapan *ICSR* pada bank syariah terutama berkaitan dengan informasi tentang aktivitas kemampuan perolehan laba dari seluruh aset yang diinvestasikan dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *ROE*. Untuk itu manajemen perbankan syariah di Indonesia diharapkan terus meningkatkan kualitas pengungkapan *ICSR* sehingga kinerja keuangan perusahaan khususnya *ROE* mengalami peningkatan.

Daftar Referensi

- AAOIFI. 2002. *Accounting and Auditing, Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. AAOIFI.
- Ahmad, K. 2002. *Ethics in business and management: Islamic and mainstream approaches*. London: Asean Academic Press.
- Albaity, M., dan R. Ahmad. 2008. Performance of syariah and composite indices: Evidence from bursa Malaysia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance* 4 (1): 23-43.
- Almar, M., R. Rachmawati, dan A. Murni. 2012. Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan. *Proceeding Seminar Nasional Akuntansi - Bisnis (SNAB) 2012*, ISSN : 2252-3936.
- Almilia, L.S., dan Wijayanto. 2007. Pengaruh environmental performance dan environmental disclosure terhadap economic performance. *The 1st Accounting Conference*, UI, Depok, 1-23.

- Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77. *The holy qur'an*. 2006. The glorious qur'an. *Translated by King Fahad complex for the printing of Madinah Munawwarah*.
- Anggraini, R.R. 2006. Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Musibah, A. S., dan W. S. W. Y. Alfattani. 2014. The mediating effect of financial performance on the relationship between Shariah supervisory board effectiveness, intellectual capital and corporate social responsibility of Islamic banks in gulf cooperation council countries. *Asian Social Science* 10 (17): 139-164.
- Ardianto, E., dan S. Sumirat. 2004. *Dasar-dasar public relation*. Cetakan Ketiga. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Argenti, P.A., dan B. Druckenmiller. 2004. Reputation and the corporate brand. *Corporate Reputation Review* 6 (4): 368-374.
- Arshad, R., S. Othman, dan R. Othman. 2012. Islamic corporate social responsibility, corporate reputation and performance. *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering* 6 (4): 643-647.
- Baydoun, N., dan R. Willet. 1997. Islam and accounting: Ethical issues in the presentation of financial information. *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic perspective* 1 (1): 1-25.
- Belkaoui, A. R. 2007. *Accounting theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Borghesi, R., J. F. Houston, dan A. Naranjo. 2014. Corporate socially responsible investments: CEO altruism, reputation, and shareholder interests. *Journal of Corporate Finance* 26 (c): 164-181
- Branco, M. C., dan L. L. Rodrigues. 2008. Factors influencing social responsibility disclosure by Portuguese companies. *Journal of Business Ethics* 83 (4): 685-701.
- Brinkman, J. 2003. *Does corporate social responsibility lead to improved financial performance? An analysis of the electric utility industry*. The Center for Corporate Citizenship at Boston College.
- Chapra, M. U. 1992. Islam and the economic challenge. *Leicester: The Islamic Foundation*.
- Daud, A. 2016. Pengaruh inovasi, layanan, dan keunggulan posisional pada kinerja pemasaran. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20 (1): 66-78.
- Deegan, C., M. Rankin, dan J. Tobin. 2002. An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 15 (3): 312-343.
- Dowling, G. 1994. *Corporate reputations: Strategic for developing the corporate brand*. London: Kogan Page.
- Ehsan, S., dan A. Kaleem. 2012. An empirical investigation of the relationship between corporate social responsibility and financial performance (Evidence from manufacturing sector of Pakistan). *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 2 (3): 2909-2922.
- Esen, E. 2013. The influence of corporate social responsibility activities on building corporate reputation. *International Business, Sustainability and Corporate Social Responsibility* 11 (1): 133-149.
- Farook, S., M. K. Hassan, dan R. Lanis. 2010. Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2 (2): 114-141.
- Firli, A., dan N. Akbar. 2016. Does corporate social responsibility solve ROA problem in Indonesia telecommunication industry? *American Journal of Economics* 6 (2): 107-115.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Global Reporting Initiative. 2015. GRI sustainability reporting guidelines G4. Diakses dari www.globalreporting.org.
- Guthrie, J., dan M. R. Mathews. 1985. Corporate social reporting in Australia. *Research in Corporate Social Performance and Policy* 7: 251-277.
- Hasan, A., dan S. S. Harahap. 2010. Exploring corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3 (3): 203-227.

- Haniffa, R.M., dan M. Hudaib. 2007. Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics* 76 (1): 36-51.
- Husnan, A. 2013. Pengaruh corporate social responsibility (CSR disclosure) terhadap kinerja perusahaan. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indrawan, D. C. 2011. Pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Khan, S. A., K. A. Maimani, dan W. A. Al-Yafi. 2013. Exploring corporate social responsibility in Saudi Arabia: The challenges ahead. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 10 (3): 215-231.
- Maignan, I., O. C. Ferrell, dan L. Farrell. 2005. A stakeholder model for implementing social responsibility in marketing. *European Journal of Marketing* 39 (9/10): 956-977.
- Masood, O., B. Aktan, dan S. Chaudhary. 2009. An empirical study on Banks profitability in the KSA: A cointegration approach. *African Journal of Business Management* 3 (8): 374-382.
- Mithas, S., S. Tafti, I. Bardhon, dan J.M. Goh. 2012. Information technology and firm profitability: Mechanisms and empirical evidence. *MIS Quarterly* 36 (1): 205-224.
- Muwazir, M. R., R. Muhamad, dan K. Noordin. 2006. Corporate social responsibility disclosure: A Tawhidic approach. *Journal of Syariah* 14 (1): 125-142.
- Putri, D. 2014. Hubungan antara CSR dan kinerja keuangan industri keuangan syariah di Indonesia. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rice, G. 1999. Islamic ethics and the implications for business. *Journal of business ethic*, 18 (4): 345-358.
- Rivai, V., dan B. A. Fawzi. 2004. *Performance appraisal: Sistem yang tepat untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Saeidi, S. P., dan S. Sofian. 2015. How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. *Journal of Business Research* 68 (2): 341-350.
- Servaes, T., dan A. Tamayo. 2013. The impact of corporate social responsibility on firm value: the role of customer awareness. *Management Science* 59 (5): 1045-1061.
- Syafii, M. A. 2001. Bank syariah dari teori ke praktek. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- The Economist. 2005. *The good company: A survey of corporate social responsibility*. The Economist. Diakses dari <http://www.economist.com/sites/default/files/special-reports-pdfs/3555199.pdf>
- Triatmodjo, H. M. 2009. Pengaruh economic value added dan profitabilitas perusahaan return pemegang saham. Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- UU no. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas.
- UU no. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) tentang Penanaman Modal.
- Xu, W., Z. Xiao, X. Dang, D. Yang, dan X. Yang. 2014. Financial ratio selection for business failure prediction using soft set theory. *Knowledge-Based Systems* 63 (6): 59-67
- Yuniasih, N.W., dan M. G. Wirakusuma. 2009. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4 (1): 1-10.
- Zubairu, U., M. Sakariyau, dan C. K. Dauda. 2011. Social reporting practices of Islamic banks in Saudi Arabia. *International Journal of Business and Social Science* 2 (23): 193-205.